



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG,
SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TRIWULAN IV 2025



**MENGAKSELERASI TRANSFORMASI DAN MEMPERKUAT
RESPONS KEBIJAKAN UNTUK STABILITAS DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN**

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG,
SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA

Triwulan IV 2025

Laporan Kelembagaan Bank Indonesia - Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia adalah laporan kinerja kelembagaan yang disusun sebagai pemenuhan kewajiban akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	viii

BAB 1 Kelembagaan Bank Indonesia 1

1.1.	Profil Bank Indonesia	2
1.2.	Dewan Gubernur Bank Indonesia	3
1.3.	Organisasi Bank Indonesia	10
1.4.	Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia	12

BAB 2 Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia 19

2.1.	Lingkungan Strategis Perekonomian Global dan Nasional	20
2.2.	Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan	23

BAB 3 Respons Kebijakan Bank Indonesia 27

3.1.	Stance Kebijakan Bank Indonesia	28
Boks 1	Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025	29
3.2.	Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia	30

BAB 4 Transformasi Bank Indonesia 35

4.1.	Transformasi Kebijakan	36
Boks 2	Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) 2025	38
Boks 3	Peluncuran Tri-Party Agent Repo dan Perluasan Penandatanganan Global Master Repurchase Agreement (GMRA)	44
4.2.	Transformasi Organisasi dan Proses Kerja	45
4.3.	Transformasi SDM dan Budaya Kerja	47
4.4.	Transformasi Digital	49

BAB 5 Capaian Kinerja Bank Indonesia**53**

PS 01	Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter dan Bauran Kebijakan Bank Indonesia Secara Berkelanjutan, Konsisten, dan Transparan untuk Mencapai Stabilitas Nilai Rupiah dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	54
PS 02	Memperkuat Sinergi Bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan Kebijakan Fiskal dan Reformasi Struktural Pemerintah dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	57
Boks 4	Pengendalian Inflasi Pangan di Sulampua	59
Boks 5	Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan IV 2025	61
PS 03	Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan serta Surveilans Makroprudensial untuk Turut Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	61
PS 04	Memperkuat Sinergi Kebijakan serta Pengawasan Makroprudensial dengan KSSK dan Otoritas Terkait untuk Turut Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	64
PS 05	Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran, serta Pelindungan Konsumen, untuk Memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	66
PS 06	Memperkuat Sinergi Kebijakan, Pengawasan, dan Pelindungan Konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan Otoritas terkait untuk Percepatan Ekonomi dan Keuangan Digital dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	69
Boks 6	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) & Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025	70
PS 07	Mengatur, Mengawasi, dan Mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valas untuk Mendukung Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia serta Memperkuat Sinergi dengan Otoritas Terkait untuk Pengembangan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Ekonomi	73
PS 08	Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Pengembangan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau, baik secara Konvensional maupun Berdasarkan Prinsip Syariah, serta Memperkuat Sinergi dan Koordinasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	79
Boks 7	Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025	81
Boks 8	Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah	83
PS 09	Merumuskan Kebijakan dan Melaksanakan Kerjasama Internasional dengan Bank Sentral, Organisasi, dan Lembaga Internasional untuk Mendukung Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia serta Bersinergi dengan Pemerintah dan Otoritas Lain dalam rangka Memperjuangkan Kepentingan Nasional	84
Boks 9	South East Asian Central Banks (SEACEN) Governors' Conference ke-61	87
Boks 10	69 th EMEAP Deputies and Related Meetings	88
Boks 11	Pertemuan Tahunan IMF-WB Annual Meeting dan G20 2025	89
PS 10	Merumuskan dan Implementasi Bauran Kebijakan Kelembagaan dengan Kepemimpinan Profesional dan Tata Kelola yang Baik untuk Mencapai Kinerja Unggul	90
PS 11	Merumuskan dan Implementasi Kebijakan Komunikasi dan Pengaturan Hukum untuk Memperkuat Akuntabilitas, Transparansi, dan Kredibilitas Bank Indonesia	94
Boks 12	Bank Indonesia Bersama Masyarakat (BIRAMA) 2025	96
PS 12	Merencanakan, Mengembangkan, dan Mengelola Aset Fisik dan Aset Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Pengadaan dan Pengelolaan Program untuk Mendukung Pencapaian Kinerja Kelembagaan Optimal	97

Lampiran**101**

Daftar Istilah

102

Daftar Singkatan

110

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Bank Indonesia dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia periode triwulan IV 2025. Sebagai bagian dari Laporan Kelembagaan Bank Indonesia, laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Laporan ini disusun sebagai perwujudan dari komitmen Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral yang kredibel dalam mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan taat asas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada triwulan IV 2025, perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat. Ketidakpastian di pasar keuangan global juga tetap tinggi seiring semakin terbatasnya ruang penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) yang disertai masih tingginya *yield* UST sejalan dengan defisit fiskal AS yang masih besar. Kebijakan tarif resiprokal AS serta meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik turut memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini mendorong penguatan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan mengakibatkan keluarnya aliran modal ke *emerging market* (EM), termasuk Indonesia. Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 tetap baik dan diperkirakan lebih tinggi, ditopang oleh kenaikan permintaan domestik sejalan dengan membaiknya keyakinan pelaku ekonomi dan peningkatan stimulus fiskal. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik ditopang oleh surplus neraca perdagangan. Kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak peningkatan ketidakpastian global. Kinerja ekonomi Indonesia inflasi terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Kredit tetap kuat dengan ketahanan sistem keuangan terjaga baik, serta

kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital terus meningkat.

Di tengah beratnya tantangan lingkungan strategis pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Arah bauran kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa siklus ekonomi dan siklus keuangan Indonesia masih di bawah potensial. Kebijakan moneter difokuskan pada penguatan stabilitas nilai tukar Rupiah dan efektivitas transmisi pelonggaran melalui pengelolaan suku bunga kebijakan, penguatan operasi moneter *pro-market*, serta pendalaman pasar uang dan valuta asing. Sepanjang triwulan IV 2025 hingga Januari 2026, BI-Rate dipertahankan pada level 4,75%. Intensitas langkah untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah ditingkatkan melalui intervensi *Non-Deliverable Forward* (NDF), transaksi *spot*, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*) termasuk dengan meningkatkan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Seluruh bauran kebijakan tersebut didukung oleh kebijakan pendalaman PUVA, kebijakan internasional, program-program UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, serta sinergi erat bersama Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

Transformasi kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia terus diperkuat untuk memastikan pencapaian tujuan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan. Pada triwulan IV 2025, penyempurnaan kerangka kebijakan dilanjutkan melalui pengaturan lanjutan implementasi UU P2SK, termasuk penerapan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (*KLM forward-looking*) guna mempercepat transmisi pelonggaran moneter dan mendorong penyaluran kredit perbankan. Pada saat yang sama, Bank Indonesia memperkuat ketahanan sistem keuangan melalui penguatan protokol manajemen krisis terintegrasi, pendalaman pasar uang dan keuangan, serta penguatan infrastruktur dan ketahanan industri sistem pembayaran di tengah akselerasi digitalisasi. Di bidang kelembagaan, transformasi diarahkan pada penguatan tata kelola, proses bisnis, dan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi strategis, guna memastikan Bank Indonesia tetap tangguh dan relevan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks.

Di tengah beratnya tantangan lingkungan strategis yang dihadapi, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan IV 2025 sesuai tahapannya. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons

kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah inisiatif transformasi, baik di area kebijakan maupun di area kelembagaan. Penerapan kebijakan yang konsisten dan bertata kelola, inovasi yang berkelanjutan, serta eratnya sinergi yang dilakukan telah menghasilkan persepsi yang positif dari mitra kerja, termasuk sejumlah pengakuan secara nasional dan internasional.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas mulia dalam menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami berharap Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia periode triwulan IV 2025 ini dapat menjadi rujukan terpercaya bagi masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam menyusun langkah bersama untuk memajukan perekonomian Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan keberkahan, kesempurnaan, dan kemudahan bagi setiap langkah kita untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional.

Jakarta, Maret 2026



Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo

A formal portrait of three Indonesian government officials. On the left, Filianingsih Hendarta, Deputy Governor, stands wearing a black suit and a pearl necklace. In the center, Juda Agung, Deputy Governor, stands wearing a dark suit and a red tie. On the right, Perry Warjiyo, Governor, is seated in a wooden chair, wearing a dark suit and a red tie. The background features a large, ornate golden geometric pattern on the left and a wooden wall with a large, intricate golden relief sculpture on the right.

FILIANINGSIH HENDARTA
Deputi Gubernur

JUDA AGUNG
Deputi Gubernur

PERRY WARJIYO
Gubernur



DESTRY DAMAYANTI
Deputi Gubernur Senior

AIDA S. BUDIMAN
Deputi Gubernur

RICKY PERDANA GOZALI
Deputi Gubernur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia

Perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan sedikit lebih rendah menjadi sebesar 3,2% dibandingkan dengan capaian 2025 sebesar 3,3%. Pertumbuhan yang lebih rendah tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak lanjutan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan kerentanan rantai pasok global, meskipun prospek perekonomian AS membaik, didorong oleh investasi sektor teknologi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI), dan stimulus fiskal berupa pengurangan pajak. Pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India pada 2026 diperkirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor di tengah meningkatnya investasi AI.

Dari pasar keuangan global, ketidakpastian juga tetap tinggi seiring semakin terbatasnya ruang penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) yang disertai masih tingginya *yield UST* sejalan dengan defisit fiskal AS yang masih besar. Selain itu, kebijakan tarif resiprokal AS serta meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik turut memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini mendorong penguatan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan mengakibatkan keluarnya aliran modal ke *emerging market* (EM), termasuk Indonesia. Berbagai lembaga internasional seperti European Central Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menegaskan bahwa lingkungan strategis global pada triwulan IV 2025 semakin berat dan diliputi ketidakpastian tinggi. Ekonomi global semakin dihadapkan pada risiko perlambatan pertumbuhan akibat hambatan perdagangan dan disrupsi rantai pasok, kerentanan pasar keuangan serta implikasi fragmentasi ekonomi global. World Economic Forum juga mengingatkan potensi risiko keuangan yang dapat meningkatkan volatilitas ke depan.

Pada triwulan IV 2025, tantangan perekonomian domestik yang dihadapi masih berat. Hal ini tecermin dari tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang besar akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global, meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap pelebaran defisit fiskal, serta kenaikan permintaan valas oleh perbankan dan korporasi. Dengan kondisi tersebut, posisi cadangan devisa tetap tinggi sebesar 156,5 miliar dolar AS pada Desember 2025 di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang ditempuh Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Selain itu, tekanan pada inflasi juga meningkat terutama pada inflasi *volatile food* akibat gangguan produksi dan distribusi karena kendala cuaca serta dampak bencana di Sumatera, sementara dampak pelemahan nilai tukar terhadap inflasi relatif terbatas. Pemulihan intermediasi perbankan juga belum merata di tengah risiko kredit yang masih tinggi pada segmen konsumsi dan UMKM, serta masih perlunya percepatan penurunan suku bunga perbankan untuk memperkuat transmisi pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia. Kondisi tersebut, sebagaimana pandangan tokoh pemerintahan dan sektor keuangan, juga dibarengi dengan tantangan dalam memastikan keamanan sistem pembayaran, membangun kepercayaan masyarakat terhadap keuangan digital, serta meningkatkan sinergi kebijakan antarotoritas untuk lebih merespons tantangan struktural perekonomian.

Di tengah ketidakpastian global yang tinggi dan tantangan perekonomian domestik yang berat, perekonomian Indonesia pada triwulan IV 2025 tetap baik dan masih dapat terus ditingkatkan agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 diperkirakan lebih tinggi ditopang oleh kenaikan permintaan domestik sejalan dengan membaiknya keyakinan pelaku ekonomi dan peningkatan stimulus fiskal. Kinerja eksternal tetap solid, tecermin dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang diperkirakan tetap baik ditopang neraca perdagangan November 2025 yang kembali mencatat surplus. Posisi cadangan devisa

pada akhir Desember 2025 meningkat menjadi sebesar 156,5 miliar dolar AS. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada akhir triwulan IV 2025 tercatat mengalami depresiasi 0,06% (qtq), utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global yang berdampak terhadap aliran modal asing pada investasi portofolio. Guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia meningkatkan intensitas langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar NDF, baik di *offshore* maupun *onshore* (DNDF) dan pasar *spot*. Respons kebijakan ini dapat menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah dan tetap konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ pada 2026. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ dengan inflasi inti yang tetap terjaga rendah. Intermediasi perbankan dan stabilitas sistem keuangan tetap kuat, tecermin dari pertumbuhan kredit perbankan sebesar 9,69% (yoy) yang berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia sebesar 8-11% (yoy), didukung oleh likuiditas dan kapasitas permodalan perbankan yang memadai serta risiko kredit yang rendah. Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan IV 2025 juga mencatat pertumbuhan yang tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Selain dinamika perekonomian global dan nasional, Bank Indonesia juga mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan. Sinergi bauran kebijakan bank sentral dengan kebijakan fiskal dan sektor riil, serta kebijakan stabilitas sistem keuangan sangat dibutuhkan di tengah meningkatnya dampak ketidakpastian global. Selain itu, diperlukan penguatan respons dan transformasi kebijakan dan kelembagaan untuk mengawal penyelesaian pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK, menjaga kecermatan, kepatuhan hukum, dan kepentingan Bank Indonesia dalam berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh K/L lain, serta mengelola perubahan demografi pegawai melalui digitalisasi dan otomasi dengan sejumlah manfaat dan risikonya. Tantangan

lingkungan strategis global, domestik, dan kelembagaan yang berat tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik terhadap rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Respons Kebijakan Bank Indonesia

Di tengah beratnya tantangan lingkungan strategis pada triwulan IV 2025, bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter diarahkan pada keseimbangan *pro-stability and growth*, antara lain dengan mempertahankan suku bunga BI-Rate pada bulan Oktober, November dan Desember 2025, serta Januari 2026 pada level 4,75%, sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial. Intensitas langkah untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah ditingkatkan melalui intervensi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri maupun intervensi di pasar dalam negeri melalui transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder. Selanjutnya, strategi operasi moneter *pro-market* terus diperkuat untuk mendorong penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas melalui optimalisasi penerbitan SRBI dan pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur. Bank Indonesia juga mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) guna memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mendorong penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas. Sementara itu, kebijakan makroprudensial akomodatif dioptimalkan untuk memperkuat fleksibilitas likuiditas perbankan serta mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan guna mendukung intermediasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada penguatan keandalan

infrastruktur, struktur industri, serta perluasan akseptasi digitalisasi. Untuk mendukung ketiga kebijakan tersebut, Bank Indonesia juga mendorong pendalaman PUVA, kebijakan internasional, serta program-program UMKM dan ekonomi-keuangan syariah. Sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) turut diperkuat guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

Transformasi Bank Indonesia

Di tengah tantangan dinamika lingkungan strategis yang semakin berat, pada triwulan IV 2025, transformasi kebijakan terus diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. Transformasi kebijakan terus diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. Penyempurnaan kerangka kebijakan dan kelembagaan diwujudkan melalui pengaturan lanjutan implementasi UU P2SK. Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Pengaturan ini mengimplementasikan skema pemberian insentif yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (KLM *forward-looking*) guna mempercepat penurunan suku bunga perbankan dengan tetap mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan. Pada akhir tahun 2025, ketentuan internal mengenai pengaturan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT) telah diterbitkan, yang menjadi pedoman dalam melaksanakan langkah pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, termasuk proses surveilans dan asesmen, pengambilan keputusan, hingga koordinasi dengan pemerintah, komite stabilitas sistem keuangan, dan/atau institusi terkait. Dalam rangka memperkuat instrumen operasi moneter untuk mendukung pendalaman pasar uang domestik agar mendorong *Overnight Index Swap* (OIS) market berbasis INDONESIA, Bank Indonesia telah mengembangkan BI *Floating Rate Notes* (BI FRN) melalui *Dealer Utama* PUVA. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia menerbitkan PBI dan PADG mengenai Pengaturan Industri Sistem Pembayaran dalam rangka meningkatkan daya tahan struktur industri sistem

pembayaran di tengah pesatnya arus digitalisasi. Bank Indonesia juga mendorong perluasan fungsi *Central Counterparty* (CCP) sebagai *tri-party agent* untuk transaksi repo (TPA repo) sebagai upaya memperkuat infrastruktur pasar keuangan melalui transaksi repo yang lebih efisien, mengurangi risiko operasional, dan terstandarisasi. Di area kelembagaan, inisiatif transformasi diarahkan pada penyempurnaan proses bisnis dan penguatan fungsi organisasi melalui pendekatan *strategy-driven*, terintegrasi, serta adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Pada triwulan IV 2025 dilakukan pembentukan *working group* integrasi transformasi guna mempercepat penyelesaian dan penyelarasan inisiatif strategis Bank Indonesia yang saling terinterkoneksi. Penguatan aspek *people* di Bank Indonesia dilakukan melalui penyempurnaan ketentuan terkait SDM, penguatan kepemimpinan, pengembangan *new capabilities*, serta penguatan *employee value proposition* (EVP). Sepanjang triwulan IV 2025, Bank Indonesia juga terus melanjutkan pengembangan *Integrated Digital Payment System and Finance*, *Integrated Digital Central Bank* (IDCB), dan *Integrated Digital Technology*.

Capaian Kinerja Bank Indonesia

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tahapan yang sudah direncanakan, didukung berbagai inisiatif transformasi dan respons kebijakan di tengah semakin beratnya tantangan lingkungan strategis global, nasional, dan kelembagaan. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, berbagai upaya penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia. Penerapan kebijakan yang konsisten dan bertata kelola, inovasi yang berkelanjutan, serta eratnya sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang triwulan IV 2025 telah menghasilkan persepsi yang positif dari mitra kerja, termasuk sejumlah pengakuan secara nasional dan internasional.





Komplek Perkantoran Bank Indonesia (Koperbi) Jakarta

BAB 1

KELEMBAGAAN BANK INDONESIA



1.1. Profil Bank Indonesia

Status dan Kedudukan

Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Republik Indonesia diamanatkan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Amanat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999, yang kemudian beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku sejak 12 Januari 2023. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan UU Bank Indonesia tersebut.

Dalam menjalankan independensinya, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Sebagai perwujudan dari tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, Bank Indonesia mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) selama 22 tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Hal ini merupakan bukti komitmen Bank Indonesia untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kinerja kelembagaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden, serta memublikasikannya kepada masyarakat.

Visi

“Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan dengan Tata Kelola Kuat, yang Berkontribusi Nyata terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju.”

MISI

- 01 Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 02 Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 03 Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 04 Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional.
- 05 Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing (valas), termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
- 06 Turut meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Bank Indonesia.
- 07 Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Tujuan dan Tugas

Tujuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK, adalah: (i) mencapai stabilitas nilai Rupiah; (ii) memelihara stabilitas Sistem Pembayaran; dan (iii) turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. Stabilitas nilai Rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta kestabilan nilai tukar Rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai Rupiah dalam arti inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar Rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi secara eksplisit dan diumumkan secara transparan untuk memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku pasar mengenai komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan publik.

Dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memastikan seluruh perangkat pengaturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana berjalan lancar untuk memenuhi setiap kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Teknologi digital dan inovasi kini telah memungkinkan perkembangan sistem pembayaran yang nyaman, cepat, dan efisien serta membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi-keuangan. Tren digitalisasi tersebut memengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, baik individu maupun korporasi, dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, tidak terkecuali di sektor keuangan. Hal ini menjadi tantangan kebijakan bagi otoritas, khususnya Bank Indonesia, dalam mencari titik keseimbangan yang tepat antara upaya mengoptimalkan

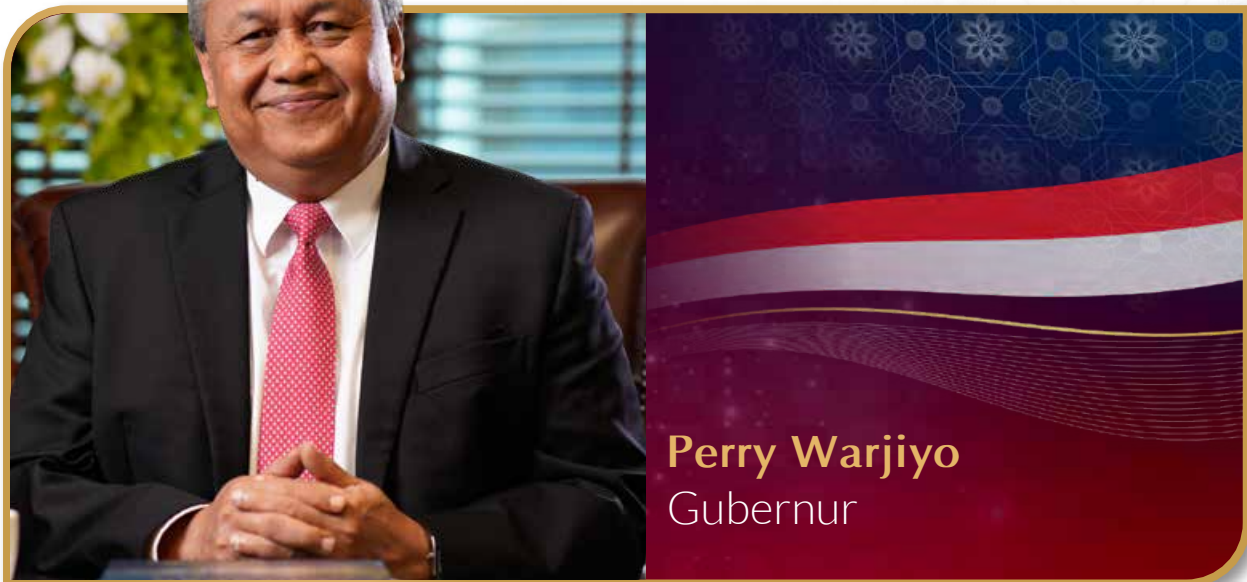
peluang yang diusung oleh inovasi digital dengan upaya untuk memitigasi risiko. Oleh karena itu, Bank Indonesia menginisiasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia dan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas, guna memperoleh manfaat dari digitalisasi dengan tetap menjamin terlaksananya mandat Bank Indonesia dalam pengedaran uang, moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta keuangan berkelanjutan. Dengan semakin berkembangnya sistem keuangan, Bank Indonesia terus mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, bersama dengan kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran.

1.2. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas: Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) hingga 7 (tujuh) Deputy Gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Gubernur menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis. Dalam kaitan ini, RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Setiap anggota Dewan Gubernur mempunyai hak suara yang sama. Pengambilan keputusan oleh Dewan Gubernur di dalam RDG dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menerapkan prinsip kolektif kolegial. Keputusan Dewan Gubernur dalam RDG merupakan keputusan Bank Indonesia dan mengikat seluruh anggota Dewan Gubernur.

Saat ini Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) Deputy Gubernur dengan profil sebagai berikut:



PERRY WARJIYO menjabat kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, dan diambil sumpahnya pada 24 Mei 2023 untuk masa jabatan 2023–2028. Sebelumnya, Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018–2023 dan sebagai Deputy Gubernur untuk masa jabatan 2013–2018.

Sebelum menduduki jabatan Deputy Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Jabatan ini diembannya setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia sejak 2009. Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada Juli 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam the South-East Asia Voting Group (SEAVG), yang berkedudukan di Washington DC, AS. Perry Warjiyo mempunyai karier yang panjang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa, dan utang luar negeri.

Perry Warjiyo saat ini juga menduduki posisi sebagai *Chair of Asian Consultative Council – Bank for International Settlements (ACC-BIS)*, *Chairman of Executive Committee (EC)*

– Islamic Financial Services Board (IFSB), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (KAFEGAMA). Selain itu, Perry Warjiyo juga mewakili Bank Indonesia dan Indonesia dalam Keketuaan The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting, serta di IMF, ASEAN, ASEAN+3, Financial Stability Board (FSB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Islamic International Liquidity Management (IILM). Selama tahun 2023, Perry Warjiyo aktif menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, di samping sebagai dosen tamu pada sejumlah universitas di dalam dan luar negeri.

Perry Warjiyo juga telah menulis dan memublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu Internasional. Salah satu bukunya, yaitu *“Central Bank Policy: Theory and Practice”* yang ditulis bersama Dr. Solikin M. Juhro, mendapat pengakuan nasional dan internasional sebagai referensi penting dalam perumusan bauran kebijakan bank sentral.

Perry Warjiyo dilahirkan di Sukoharjo pada tahun 1959. Gelar Sarjana diraih dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982. Gelar Master dan Ph.D. di bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991.



DESTRY DAMAYANTI menjabat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019–2024, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024 Destry Damayanti kembali ditetapkan menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024–2029 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus 2024. Sebelum menjabat sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner LPS periode 2015–2019. Selain menjabat sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner (*ex officio*) Bank Indonesia pada LPS sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Destry Damayanti mengawali kariernya sebagai Asisten Peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) pada tahun 1988, lalu peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 1987–1990. Selanjutnya, Destry Damayanti bekerja di Kementerian Keuangan selama periode 1992–1997. Pada tahun 1997–2000, Destry Damayanti menjadi ekonom di Citibank, yang kemudian diteruskan menjadi

Senior Economic Advisor Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000–2003. Kariernya sebagai ekonom berlanjut sebagai Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri selama periode 2005–2015 dan sekaligus sebagai Direktur Eksekutif untuk Mandiri Institute. Pada 2015–2019 Destry Damayanti juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selama tahun 2014–2015, Destry Damayanti juga menjabat sebagai Ketua Task Force Ketahanan Ekonomi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2015, Destry Damayanti dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015–2019. Pada tahun 2019–2021, Destry Damayanti dipercaya menjadi Ketua Iluni FEB UI dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Paguyuban MASTRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) dari tahun 2015 sampai saat ini.

Destry Damayanti dilahirkan di Jakarta pada tahun 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraihnya dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Science pada *Field of Regional Science* diraihnya dari Cornell University, New York, AS, pada tahun 1992.



JUDA AGUNG menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan 2022–2027.

Memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991, Junda Agung memiliki pengalaman yang panjang melalui sejumlah penugasan, baik di eksternal Bank Indonesia sebagai Economist di Netherlands Central Planning Bureau, Advisor to Executive Director di International Monetary Fund (IMF), dan Direktur Eksekutif IMF, yang mewakili 13 negara Southeast Asian dan Pacific, maupun di internal Bank Indonesia yang meliputi area riset ekonomi dan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, manajemen strategis, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sebelum terpilih sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, Junda Agung menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP), sekaligus Asisten Gubernur yang membawahi Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020–2022. Dalam kepemimpinannya di DKMP, Junda Agung berperan penting untuk meletakkan pondasi dasar kerangka kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, termasuk dalam merumuskan sejumlah kebijakan Makroprudensial untuk mendukung inklusi keuangan dan keuangan berkelanjutan.

Sebagai ekonom, Junda Agung telah memublikasikan sejumlah artikel di bidang moneter, finansial, dan perbankan pada berbagai jurnal internasional, antara lain *Review of International Economics*, *Applied Economics*, dan *Asian Economic Journal*. Salah satu publikasi yang pernah diterbitkan Junda Agung adalah buku “Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi”, yang menjadi salah satu referensi utama terkait kerangka kebijakan Makroprudensial di Indonesia. Junda Agung juga aktif menjadi pembicara pada berbagai forum dan seminar internasional, antara lain IMF, FSB, BIS, Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) dan berbagai forum internasional lainnya, serta memberikan berbagai kuliah tamu di Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri. Junda Agung juga pernah menjadi staf pengajar di Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Junda Agung lahir di Pontianak pada tahun 1964. Setelah menempuh pendidikan di bidang Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Junda Agung melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Master di bidang Money Banking and Finance pada tahun 1995. Junda Agung kemudian melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Ph.D. di bidang Economics pada tahun 1999.



Aida S. Budiman
Deputi Gubernur

AIDA S. BUDIMAN menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan yang akan berlangsung hingga tahun 2027. Selain itu, Aida S. Budiman juga dilantik menjadi Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (*ex officio*) Bank Indonesia untuk sisa masa jabatan tahun 2020–2025, berdasarkan Keputusan Presiden RI No.101/P Tahun 2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner LPS.

Aida S. Budiman memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991 dan selama perjalanan kariernya telah memiliki pengalaman yang luas melalui berbagai penugasan, termasuk sebagai Wakil Direktur Eksekutif untuk South East Asia Voting Group (SEAVG) *office* di International Monetary Fund (IMF). Sebelum terpilih menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menjabat sebagai Kepala Departemen Internasional (DIInt) dari tahun 2014–2018, dan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) pada tahun 2018, sekaligus sebagai Asisten Gubernur yang bertugas mengoordinir kebijakan strategis sektor moneter, bauran kebijakan Bank Indonesia, dan sinerginya dengan kebijakan nasional dalam kurun waktu tahun 2020–2022. Di bawah kepemimpinannya di DKEM, Aida S. Budiman memainkan peran kunci dalam merumuskan penguatan Kerangka Bauran Kebijakan Bank Indonesia, mengembangkan sektor prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,

serta memperkuat peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat regional dan nasional.

Sebagai seorang ekonom, Aida S. Budiman telah menerbitkan sejumlah artikel dalam bidang moneter, keuangan, dan perbankan di berbagai jurnal internasional, termasuk di antaranya *The Falsification of Four Popular Hypotheses about the Asian Crisis*, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, dan *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Selain itu, Aida S. Budiman aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum dan seminar baik di tingkat nasional maupun internasional, serta pernah memberikan berbagai kuliah umum di Perguruan Tinggi. Aida S. Budiman juga telah menjadi pengajar dalam berbagai diklat internal Bank Indonesia dan Sekolah Staf dan Komando TNI serta menjadi dosen pengajar di Program Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Saat ini, Aida S. Budiman menjabat sebagai Ketua Bidang II Perumusan Kebijakan di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menyelesaikan pendidikan pada bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di University of Southern California dan meraih gelar Master di bidang Ekonomi pada tahun 1996. Aida S. Budiman kemudian melanjutkan pendidikan di Claremont Graduate University dan mendapat gelar Ph.D. di bidang Ekonomi pada tahun 2001.



FILIANINGSIH HENDARTA ditetapkan sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 18 April 2023 untuk masa jabatan 2023–2028.

Filianingsih Hendarta memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1986. Sebelum menjabat sebagai Deputy Gubernur, Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi kebijakan strategis di sektor sistem pembayaran sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019–2023). Sebelumnya, Filianingsih Hendarta memimpin Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015–2019) dan Departemen Pengelolaan Moneter (2013–2015).

Sepanjang kariernya, Filianingsih Hendarta memimpin berbagai proyek berskala nasional dan internasional. Filianingsih Hendarta merupakan figur kunci dalam peluncuran Proyek Garuda yang mengawali eksplorasi desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Rupiah Digital. Filianingsih Hendarta juga memimpin implementasi *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia* (BSPI) 2025 yang diarahkan untuk mempercepat transformasi dan integrasi ekonomi serta keuangan digital guna meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Dengan pengalaman lebih dari 36 tahun di hampir seluruh sektor di Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta dipercaya untuk terlibat dalam berbagai forum strategis lintas Kementerian/Lembaga di tingkat domestik maupun internasional. Di dalam negeri, Filianingsih Hendarta berperan dalam berbagai forum, antara lain Penyusunan Regulasi dan Kelembagaan Sektor Keuangan, Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Elektronifikasi Lintas Kementerian/Lembaga, serta berbagai komite internal Bank Indonesia. Di kancah internasional, Filianingsih Hendarta acapkali mewakili Bank Indonesia dalam berbagai fora, seperti G20, Bank for International Settlements (BIS), FSB, IMF, World Bank, ECB, dan Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP).

Filianingsih Hendarta lahir di Surabaya pada tahun 1963. Setelah menempuh pendidikan pada bidang hukum di Universitas Airlangga, Filianingsih Hendarta melanjutkan pendidikan di Boston University dan mendapatkan gelar *Master of Business Administration (Economics and Finance)* pada tahun 1992. Filianingsih Hendarta juga pernah aktif terlibat sebagai pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) *Focus Group Moneter* dan Makroprudensial pada tahun 2018–2021. Saat ini, Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Wakil Ketua 1 – Dewan Kehormatan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga periode tahun 2021–2025.



Ricky Perdana Gozali
Deputi Gubernur

RICKY P. GOZALI menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68/P Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.

Ricky P. Gozali memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1995 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Dalam perjalanan kariernya selama lebih dari dua dekade, Ricky P. Gozali banyak terlibat dalam pengelolaan portofolio cadangan devisa negara, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, Ricky P. Gozali juga pernah ditugaskan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York selama empat tahun (2004–2008), dan menjadi *Chief Dealer* di pasar valuta asing. Pengalaman tersebut melengkapi pemahamannya atas dinamika pasar keuangan global secara menyeluruh.

Setelah kembali ke tanah air, Ricky P. Gozali melanjutkan penugasan strategis di Departemen Pengelolaan Devisa sebagai Kepala Divisi Manajemen Valuta Asing, Kepala Divisi Analisa Pasar Internasional, serta di Departemen Internasional sebagai Kepala Grup Hubungan Internasional dan Kepala Grup Kebijakan Internasional. Karier Ricky P. Gozali termasuk memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia di sejumlah provinsi, seperti Gorontalo (2018–

2019), Kalimantan Timur (2022–2023), Sumatera Selatan (2023–2025), dan terakhir di Provinsi DKI Jakarta (2025). Dalam kapasitas ini, Ricky P. Gozali berperan aktif dalam mendorong pengembangan UMKM, ekonomi syariah, digitalisasi sistem pembayaran, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Ricky P. Gozali juga berpengalaman di bidang keorganisasian dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) periode 2020–2023, serta mengoordinasikan pelaksanaan event Presidensi G20 Sektor Keuangan.

Ricky P. Gozali lahir di Jakarta pada tahun 1970. Setelah menempuh pendidikan di bidang Manajemen Universitas Pancasila, Ricky P. Gozali melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia pada tahun 2011. Ricky P. Gozali juga mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia – SESPIBI (2019) serta beragam program pengembangan kompetensi dan kepemimpinan strategis di berbagai lembaga internasional, seperti *Strategic Leadership Program* di London Premier Center Spanyol (2024), Columbia University (2023), dan Bayes Business School London (2022). Selain itu, Ricky P. Gozali juga aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi kebanksentralan dan pasar keuangan baik di dalam maupun di luar negeri.

1.3. Organisasi Bank Indonesia

Struktur Organisasi Bank Indonesia

Per Desember 2025



Keterangan:

¹⁾ Komite adalah organ pendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melakukan perumusan rekomendasi kebijakan prinsipil dan strategis yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur

²⁾ Satuan Kerja khusus yang bersifat sementara



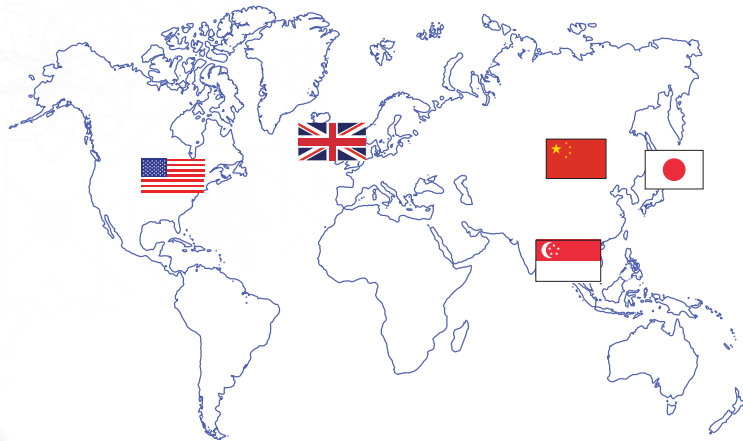
Sebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI)

Per Desember 2025



KPw BI Luar Negeri

- KPw BI London
- KPw BI New York
- KPw BI Singapura
- KPw BI Tokyo
- KPw BI Beijing



Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi Gorontalo

Provinsi Maluku Utara

Provinsi
Sulawesi Tengah

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi Papua Barat

Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Maluku

Provinsi Papua

Provinsi
Sulawesi Selatan

WILAYAH KOORDINASI
SULAMPUA

WILAYAH KOORDINASI
BALINUSRA

Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali

- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan

- KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
- KPw BI Provinsi Papua
- KPw BI Provinsi Maluku
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
- KPw BI Provinsi Gorontalo
- KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
- KPw BI Provinsi Maluku Utara
- KPw BI Provinsi Papua Barat

1.4. Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia

Per Desember 2025

KANTOR PUSAT BANK INDONESIA

MONETER

FIRMAN MOCHTAR	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
ERWIN GUNAWAN HUTAPEA	Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
RAHMATULLAH	Departemen Pengelolaan Devisa
AGUSTINA DHARMAYANTI	Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
IMAM HARTONO	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

MAKROPRUDENSIAL

SOLIKIN M. JUHRO	Departemen Kebijakan Makroprudensial
MALIS NAINI SRI MEYYANTI	Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
ANTON DARYONO	Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen
ANASTUTY K.	Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DICKY KARTIKOYONO	Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
DWI SUSLAMANTO	Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
M. ANWAR BASHORI	Departemen Pengelolaan Uang
YUDI HARYMUKTI	Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, <i>Data Center</i> , dan <i>Business Resumption Site</i>

PENDUKUNG KEBIJAKAN

YOGA AFFANDI	Departemen Internasional
RIZA TYAS U. H.	Departemen Statistik
SUSSY WANDAYANI S.	Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
MUSNI HARDI K. ATMAJA	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
GIRI KOORNIHARTHA P.	Departemen Manajemen Risiko
RAMDAN DENNY PRAKOSO	Departemen Komunikasi

PENDUKUNG ORGANISASI

MARDIANTO JATNA (Plt.)	Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
IMAM SUBARCAH	Departemen Hukum
IDAH ROSIDAH A.	Departemen Sumber Daya Manusia
ENDANG TRIANTI	Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital
DIAH ROSDIANA	Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data
RETNO PONCO WINDARTI	Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber

J. B. P. SIMANDJUNTAK	Departemen Keuangan
HARUM SETIAWATI	Departemen Manajemen dan Advisory Pengadaan
FERRY B. TAMPUBOLON	Departemen Audit Intern
ARLYANA ABUBAKAR	Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran
BUDIYONO	Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non Perkantoran
EVA ADERIA S.	Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas
CLARITA LIGAYA ISKANDAR	Institut Bank Indonesia

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) DALAM NEGERI

ARIEF HARTAWAN	Departemen Regional
RUDY BRANDO HUTABARAT	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sumatera Utara
IBRAHIM	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Jawa Timur
R. ERWIN SOERADIMADJA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali
FADJAR MAJARDI	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan
RIZKI ERNADI WIMANDA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan
AGUS CHUSAINI	KPw BI Provinsi Aceh
MOHAMAD ABDUL MAJID IKRAM	KPw BI Provinsi Sumatera Barat
PANJI ACHMAD	KPw BI Provinsi Riau
WARSONO	KPw BI Provinsi Jambi
BAMBANG PRAMONO	KPw BI Provinsi Sumatera Selatan
WAHYU YUWANA HIDAYAT	KPw BI Provinsi Bengkulu
BIMO EPYANTO	KPw BI Provinsi Lampung
ROMMY SARIU TAMAWIWY	KPw BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
RONY WIDIJARTO P.	KPw BI Provinsi Kepulauan Riau
IWAN SETIAWAN	KPw BI Provinsi DKI Jakarta
MUHAMAD NUR	KPw BI Provinsi Jawa Barat
MOHAMAD NOOR NUGROHO	KPw BI Provinsi Jawa Tengah
SRI DARMADI SUDIBYO	KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
AMERIZA MA'RUF MUSA	KPw BI Provinsi Banten
HARIO KARTIKO PAMUNGKAS	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
ADIDOYO PRAKOSO	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur
DONI SEPTADIJAYA	KPw BI Provinsi Kalimantan Barat

YULIANSAH ANDRIAS	KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah
BUDI WIDIHARTANTO	KPw BI Provinsi Kalimantan Timur
HASIANDO GINSAR MANIK	KPw BI Provinsi Kalimantan Utara
JOKO SUPRATIKTO	KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
MUHAMAD IRFAN SUKARNA	KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
EDWIN PERMADI	KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
BAMBANG SATYA PERMANA	KPw BI Provinsi Gorontalo
EKA PUTRA BUDI NUGROHO	KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
WAHYU INDRA SUKMA	KPw BI Provinsi Maluku
DWI PUTRA INDRAWAN	KPw BI Provinsi Maluku Utara
FATURACHMAN	KPw BI Provinsi Papua
SETIAN	KPw BI Provinsi Papua Barat
PRABU DEWANTO	KPw BI Lhokseumawe
AHMADI RAHMAN	KPw BI Pematangsiantar
RIZA PUTERA	KPw BI Sibolga
JAJANG HERMAWAN	KPw BI Cirebon
LAURA RULIDA EKA SARI P.	KPw BI Tasikmalaya
BIMALA	KPw BI Tegal
CHRISTOVENY	KPw BI Purwokerto
DWIYANTO CAHYO SUMIRAT	KPw BI Solo
YAYAT CADARAJAT	KPw BI Kediri
IQBAL REZA NUGRAHA	KPw BI Jember
FEBRINA	KPw BI Malang
ROBI ARIADI	KPw BI Balikpapan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) LUAR NEGERI

WAHYU AGUNG NUGROHO	KPw BI New York
I GEDE PUTU WIRA K.	KPw BI London
IMADUDDIN SAHABAT	KPw BI Tokyo
WIDI AGUSTIN S.	KPw BI Singapura
YULIAN WIHANTORO	KPw BI Beijing





Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat

BAB 2

LINGKUNGAN STRATEGIS KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA



2.1. Lingkungan Strategis Perekonomian Global dan Nasional

Perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diperkirakan sedikit lebih rendah menjadi sebesar 3,2% dibandingkan dengan capaian 2025 sebesar 3,3%. Pertumbuhan yang lebih rendah tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak lanjutan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan kerentanan rantai pasok global, meskipun prospek perekonomian AS membaik didorong investasi sektor teknologi termasuk *Artificial Intelligence* (AI) dan stimulus fiskal pengurangan pajak. Pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India pada 2026 diperkirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor di tengah investasi AI yang juga meningkat.

Dari pasar keuangan global, ketidakpastian juga tetap tinggi seiring semakin terbatasnya ruang penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) yang disertai masih tingginya *yield* UST sejalan defisit fiskal AS yang masih besar. Selain itu, kebijakan tarif resiprokal AS serta meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik turut memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini mendorong penguatan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan mengakibatkan keluarnya aliran modal ke *emerging market* (EM), termasuk Indonesia. Kondisi tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Berbagai lembaga internasional seperti European Central Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menegaskan bahwa lingkungan strategis global pada triwulan IV 2025 semakin berat dan diliputi ketidakpastian tinggi. Ekonomi global semakin dihadapkan pada risiko perlambatan pertumbuhan akibat hambatan perdagangan dan disrupsi rantai pasok, kerentanan pasar keuangan serta implikasi fragmentasi ekonomi global. World Economic Forum juga mengingatkan potensi risiko keuangan yang dapat meningkatkan volatilitas ke depan.

Pada triwulan IV 2025, tantangan perekonomian domestik yang dihadapi juga tetap berat. Hal ini tecermin dari tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang besar akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global, meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap pelebaran defisit fiskal, serta kenaikan permintaan valas oleh perbankan dan korporasi. Dengan kondisi tersebut, posisi cadangan devisa tetap tinggi sebesar 156,5 miliar dolar AS pada Desember 2025 di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang ditempuh Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang

meningkat. Selain itu, tekanan pada inflasi meningkat terutama pada inflasi *volatile food* akibat gangguan produksi dan distribusi karena kendala cuaca serta dampak bencana di Sumatera, sementara dampak pelemahan nilai tukar terhadap inflasi relatif terbatas. Pemulihan intermediasi perbankan juga belum merata di tengah risiko kredit yang masih tinggi pada segmen konsumsi dan UMKM, serta masih perlunya percepatan penurunan suku bunga perbankan untuk memperkuat transmisi pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia. Kondisi tersebut, sebagaimana pandangan tokoh pemerintahan dan sektor keuangan, juga dibarengi dengan tantangan dalam memastikan keamanan sistem pembayaran, membangun kepercayaan masyarakat terhadap keuangan digital, serta meningkatkan sinergi kebijakan antar-otoritas untuk lebih merespon tantangan struktural perekonomian.

Di tengah ketidakpastian global yang tinggi dan tantangan perekonomian domestik yang berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan makin perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 diperkirakan lebih tinggi ditopang oleh kenaikan permintaan domestik sejalan dengan membaiknya keyakinan pelaku ekonomi dan peningkatan stimulus fiskal. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), LU utama seperti LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Informasi dan Komunikasi menunjukkan kinerja positif. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercatat di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), diikuti Jawa dan Kalimantan didorong kenaikan permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 4,7–5,5%. Pada 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,9–5,7%, ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Efektivitas berbagai program stimulus Pemerintah pada tahun 2026 perlu diperkuat untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja. Investasi juga diperkirakan lebih tinggi ditopang oleh berlanjutnya program prioritas Pemerintah, termasuk hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), sehingga diharapkan makin dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global. NPI

triwulan IV 2025 diperkirakan tetap baik ditopang neraca perdagangan yang pada November 2025 kembali mencatat surplus sebesar 2,7 miliar dolar AS didukung oleh ekspor nonmigas berbasis sumber daya alam seperti logam mulia dan perhiasan/permata, nikel dan barang daripadanya, serta bahan bakar mineral. Sementara itu, aliran modal triwulan IV 2025 mencatat *net inflows* terutama ditopang kenaikan cukup tinggi pada bulan Desember 2025 yang bersumber dari penerbitan *global bond*, setelah sebelumnya pada bulan Oktober dan November 2025 tercatat rendah sejalan dengan ketidakpastian global yang masih tinggi. Dengan perkembangan ini, NPI 2025 diperkirakan tetap berdaya tahan dengan transaksi berjalan yang masih sehat dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan surplus 0,3% dari PDB. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat menjadi sebesar 156,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, secara keseluruhan NPI pada tahun 2026 tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9–0,1% PDB. Dari sisi neraca transaksi modal dan finansial, meningkatnya ketidakpastian keuangan global mendorong aliran keluar modal asing pada investasi portofolio yang hingga 19 Januari 2026 mencatat *net outflows* sebesar 1,6 miliar dolar AS. Sehubungan dengan itu, perlu penguatan respons kebijakan guna tetap menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak peningkatan ketidakpastian global. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada akhir triwulan IV 2025 tercatat mengalami depresiasi sebesar 0,06% dibandingkan dengan nilai tukar pada akhir triwulan III 2025. Adapun rerata keseluruhan tahun 2025 nilai tukar Rupiah melemah 3,80% dibandingkan dengan tahun 2024. Pelemahan nilai tukar tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global yang berdampak terhadap aliran modal asing pada investasi portofolio, khususnya SBN yang mencatat *net outflows* sebesar 1,52 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025, lebih besar dari *net outflows* pada triwulan III 2025 sebesar 565 juta dolar AS. Dari domestik, kekhawatiran pasar terhadap pelebaran defisit fiskal serta kenaikan permintaan valas oleh perbankan dan korporasi domestik sejalan dengan kegiatan ekonomi, turut memengaruhi kinerja Rupiah. Guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia menempuh intensitas langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar NDF, baik di *offshore* maupun *onshore* (DNDF) dan pasar *spot*. Respons kebijakan ini dapat menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah dan tetap konsisten dengan upaya pencapaian sasaran

inflasi $2,5\pm 1\%$ pada 2026. Peningkatan konversi valas ke Rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) juga mendukung tetap terkendalnya nilai tukar Rupiah. Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah termasuk melalui intervensi terukur di transaksi NDF, DNDF, dan pasar *spot*, serta memperkuat strategi operasi moneter *pro-market*. Nilai tukar Rupiah diperkirakan akan stabil dengan kecenderungan menguat didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$, dengan Inflasi IHK Desember 2025 sebesar 2,92% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga rendah sebesar 2,38% (yoy), sejalan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya dan *imported inflation* yang tetap terkendali. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) terjaga rendah sebesar 1,93% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* (VF) masih relatif tinggi sebesar 6,21% (yoy) disumbang terutama oleh komoditas pangan seiring pasokan yang terbatas akibat gangguan cuaca, gangguan produksi dan distribusi akibat bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pola musiman kenaikan permintaan pada HBKN Nataru, serta kenaikan harga jagung pakan untuk ternak. Guna mengendalikan inflasi pangan, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dalam TPIP-TPID melalui berbagai program yang diimplementasikan oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah, diantaranya operasi pasar atau gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, serta kerja sama antar daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap terjaga rendah dalam sasaran $2,5\pm 1\%$. Inflasi inti diperkirakan tetap rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi VF diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.

Kebijakan moneter Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. Sejak September 2024, BI-Rate telah turun sebesar 150 bps, yaitu 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025 menjadi 4,75% hingga

Desember 2025, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar *offshore* melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar *spot*, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Ekspansi likuiditas Rupiah juga ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp730,90 triliun pada akhir tahun 2025. Bank Indonesia juga membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp332,14 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* dengan Pemerintah sebesar Rp246,68 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.

Transmisi pelanggaran kebijakan moneter terus didorong. Pelanggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia dan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat. Seiring dengan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps selama tahun 2025 dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia, suku bunga INDONIA menurun sebesar 190 bps dari 6,03% pada awal 2025 menjadi 4,13% pada 31 Desember 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan menurun masing-masing sebesar 231 bps, 230 bps, dan 234 bps sejak awal 2025 menjadi 4,85%; 4,90%; dan 4,92% pada 19 Desember 2025, sehingga mendukung kebijakan moneter yang ekspansif. Sementara itu, imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun sebesar 197 bps dari 6,96% pada awal 2025 menjadi 4,99% pada 31 Desember 2025, sementara untuk tenor 10 tahun menurun sebesar 119 bps dari tingkat tertinggi 7,26% pada pertengahan Januari 2025 menjadi 6,07% pada 31 Desember 2025. Transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, baik pada suku bunga dana maupun suku bunga kredit. Suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025, meskipun upaya lanjutan perlu terus dilakukan untuk penurunan pemberian *special rate* kepada deposan besar. Dengan penurunan suku bunga dana tersebut, suku bunga kredit perbankan mulai menurun, yaitu sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025. Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Jumlah uang beredar meningkat sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong efektivitas ekspansi likuiditas moneter guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada Desember 2025, pertumbuhan M0 tercatat sebesar 11,4% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,5% (yoy). Bahkan, pertumbuhan uang Primer (M0) *Adjusted*, yaitu uang primer yang telah menetralkan dampak KLM, tercatat lebih tinggi yaitu 16,8% (yoy) dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13,3% (yoy). Dari komponennya, pertumbuhan M0 yang meningkat dipengaruhi oleh meningkatnya uang kartal dan giro bank di Bank Indonesia sejalan dengan kenaikan kegiatan ekonomi. Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M0 yang lebih tinggi dipengaruhi oleh koordinasi fiskal dan moneter sejalan dengan ekspansi likuiditas bank sentral dan stimulus fiskal Pemerintah di akhir tahun. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2025 tercatat 8,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2025 sebesar 7,7% (yoy). Dari sisi faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M2 yang meningkat dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan perkembangan penyaluran kredit. Ke depan, pertumbuhan uang yang beredar perlu terus dimonitor dan kelola melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kredit perbankan pada 2025 tumbuh sebesar 9,69% (yoy), berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia sebesar 8-11% (yoy). Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06% (yoy), 4,52% (yoy), dan 6,58% (yoy). Capaian tersebut sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) serta realisasi program prioritas Pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga. Sementara dari sisi permintaan, pelaku usaha perlu terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*) yang tercatat masih cukup besar pada Desember 2025, yaitu mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia. Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57% dan DPK yang tumbuh tinggi sebesar 13,83% (yoy) pada Desember 2025. Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan terus membaik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (*lending requirement*) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Bank Indonesia memprakirakan

pertumbuhan kredit 2026 pada kisaran 8-12%. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk terus memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan tersebut.

Ketahanan sistem keuangan terjaga baik didukung likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada November 2025 tercatat tinggi sebesar 26,05%, tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,21% (bruto) dan 0,86% (neto) pada November 2025. Hasil *stress test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan IV 2025 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 14,26 miliar transaksi atau tumbuh 39,21% (yoy) pada triwulan IV 2025 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui aplikasi *mobile* dan internet masing-masing tumbuh sebesar 12,10% (yoy) dan 15,10% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 139,99% (yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1.358,65 juta transaksi atau tumbuh 30,44% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp3.442,26 triliun pada triwulan IV 2025. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 2,88 juta transaksi atau tumbuh 3,82% (yoy), dengan nilai sebesar Rp65.069,78 triliun pada triwulan IV 2025. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,90% (yoy) menjadi Rp1.359,94 triliun pada triwulan IV 2025.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada triwulan IV 2025. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD)

yang meluas. Perluasan adopsi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) mendukung penguatan interkoneksi, tecermin dari transaksi pembayaran berbasis SNAP yang terus meningkat. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun *wholesale*, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Selain itu, struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri, sejalan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP). Bank Indonesia konsisten menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) serta untuk pemenuhan kebutuhan uang dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

2.2. Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan

Selain dinamika perekonomian global dan nasional di atas, Bank Indonesia juga terus mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga publik. Lingkungan strategis yang memerlukan penguatan respons dan transformasi kebijakan dan kelembagaan dimaksud termasuk pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK dan perlunya menjaga kecermatan, kepatuhan hukum, dan kepentingan Bank Indonesia dalam berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh K/L lain, meningkatnya dampak ketidakpastian global, serta perubahan demografi pegawai yang perlu diimbangi dengan digitalisasi dan otomasi dengan sejumlah manfaat dan risikonya.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis tersebut, UU P2SK telah memperkuat landasan hukum bagi tujuan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia telah menyelesaikan seluruh ketentuan yang diamanatkan oleh UU tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan pada awal Januari 2025. Sebagai tindak lanjut, diperlukan penyempurnaan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia, termasuk pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK. Di samping itu, Bank Indonesia juga perlu menjaga kecermatan dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk keterlibatan aktif dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi kementerian/lembaga lain guna melindungi kepentingan Bank Indonesia. Upaya tersebut memerlukan



Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan IV 2025 di Jakarta.

koordinasi lintas fungsi, penguatan kapasitas analisis hukum, dan advokasi regulasi yang responsif agar setiap kebijakan dan regulasi baru tetap selaras dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia sesuai mandat UU.

Dengan ketidakpastian global yang tetap tinggi, penguatan bauran kebijakan bank sentral diperlukan untuk memitigasi dampak rambatan gejolak global, menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti dikemukakan di atas, perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat. Ketidakpastian pasar keuangan juga tinggi dengan ruang penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) yang berkurang dan disertai masih tingginya *yield* UST sejalan defisit fiskal AS yang masih besar. Dampak kebijakan tarif resiprokal AS dan meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik juga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini mendorong penguatan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan mengakibatkan peningkatan aliran modal ke *emerging market* (EM) tertahan, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut menuntut penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia fokus pada penguatan stabilitas dengan tetap turut mendukung pertumbuhan. Di sinilah pentingnya bauran kebijakan bank sentral, khususnya antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial. Dari sisi kebijakan moneter, kebijakan suku bunga untuk pencapaian sasaran inflasi perlu didukung dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valuta asing. Hal ini agar stabilitas Rupiah tetap terjaga dan berdampak positif pada pengendalian inflasi, stabilitas sistem keuangan, dan keberlanjutan fiskal di dalam negeri. Sementara itu, kebijakan makroprudensial diarahkan

untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan bagi pertumbuhan ekonomi serta tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Bauran kebijakan bank sentral tersebut perlu dirumuskan ke dalam kerangka kerja dan pengaturan sebagai acuan dalam merumuskan respon yang diperlukan sesuai dengan dinamika perekonomian global dan nasional yang berkembang.

Di tengah tingginya ketidakpastian, bauran kebijakan ekonomi nasional juga perlu terus diperkuat untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Seperti dikemukakan di atas, ketidakpastian global meningkat disertai dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Di sinilah pentingnya bauran kebijakan ekonomi nasional yang mencakup kebijakan fiskal dan sektor riil sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah, kebijakan moneter dan makroprudensial oleh Bank Indonesia, kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta kebijakan transformasi sektor riil. Koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ditempuh melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan, serta pengelolaan defisit dan pembiayaan fiskal yang terjaga. Sementara itu, koordinasi dalam mendorong pertumbuhan ditempuh melalui pemberian insentif fiskal dari Pemerintah dan insentif likuiditas makroprudensial dari Bank Indonesia pada sektor-sektor prioritas pendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kebijakan transformasi sektor riil juga penting untuk makin diperkuat, yakni mencakup kebijakan reformasi struktural dan kebijakan industrialisasi. Penguatan kebijakan reformasi struktural

ditempuh melalui perbaikan iklim investasi, penciptaan persaingan usaha yang sehat, peningkatan keandalan infrastruktur, serta penguatan kerja sama perdagangan dan investasi. Sementara kebijakan industrialisasi diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, memperkuat basis manufaktur, dan memperbaiki ketahanan eksternal.

Selain itu, cepatnya perkembangan teknologi digital dan pergeseran demografi pegawai ke generasi milenial dan generasi Z yang semakin besar menuntut Bank Indonesia untuk mempercepat transformasi digital proses bisnis kebijakan dan kelembagaan dengan tetap menjaga tata kelola yang baik dan profesional. Transformasi digital dimaksud ditempuh secara terintegrasi, yang dikenal dengan *Integrated Digital Central Banking* (IDCB). Dalam kaitan ini, digitalisasi proses bisnis dimulai untuk proses bisnis perumusan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dari satuan kerja ke komite dan kemudian ke RDG Bulanan. Proses bisnis perumusan bauran kebijakan yang semula 8 (delapan) tahap dikurangi menjadi hanya 3 (tiga) tahap. Hal ini didukung dengan penguatan proses bisnis di dalam satuan kerja melalui *Collaborative Digital Work Process* (DWP), dimana para pegawai dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam mempersiapkan bahan yang akan disampaikan ke Komite

dan RDG secara digital. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) telah dilakukan untuk analisis dan proyeksi sejumlah indikator kunci perekonomian, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kredit perbankan, dan lainnya. Digitalisasi proses bisnis dilakukan secara *end-to-end*, yaitu dari *input* metadata dan penggunaan AI untuk analisis dan proyeksi sejumlah indikator ekonomi kunci, penyusunan bahan hingga pembahasan di Komite dan RDG. Digitalisasi proses bisnis secara bertahap akan terus diperluas ke area kebijakan dan kelembagaan lainnya sebagai bagian dari transformasi digital secara menyeluruh.

Di sisi lain, perkembangan digital dan adopsi teknologi tersebut juga disertai berbagai risiko termasuk potensi ancaman dan serangan siber terhadap sistem dan informasi strategis Bank Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kerangka manajemen risiko teknologi informasi dan ketahanan siber, serta mekanisme respons insiden menjadi prioritas untuk menjaga keberlangsungan layanan dan integritas proses bisnis. Langkah-langkah ini memastikan bahwa inovasi kelembagaan dapat berjalan dengan tetap mengedepankan pengelolaan informasi yang transparan dan bertanggung jawab serta menjaga reputasi Bank Indonesia dalam mewujudkan visi menjadi bank sentral digital terdepan.



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember

BAB 3

RESPONS KEBIJAKAN BANK INDONESIA





Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bulanan di Jakarta.

3.1. Stance Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia menerapkan bauran kebijakan untuk memelihara keseimbangan antara terjaganya stabilitas dan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mempertimbangkan dampak dari dinamika perekonomian global. Bauran kebijakan tersebut sekaligus merupakan pelaksanaan dari amanat UU P2SK yang memperkuat tujuan dan tugas Bank Indonesia. Sesuai UU P2SK, tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tujuan ini dicapai dengan 3 (tiga) tugas, yaitu: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Bauran kebijakan dimaksud didasarkan pada asesmen, proyeksi, dan simulasi Bank Indonesia terhadap pergerakan siklus ekonomi dan keuangan nasional ke depan. Dalam hal ini, “stance” bauran kebijakan longgar ditempuh pada waktu siklus menurun dan di bawah kapasitas perekonomian potensial (“stagnan atau resesi”), dan sebaliknya “stance” kebijakan ketat pada waktu siklus menanjak di atas kapasitas potensial (“boom atau overheating”).

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2025 terus diperkuat dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Dewasa ini siklus ekonomi dan keuangan Indonesia dalam tren meningkat tetapi masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial, yang tecermin antara lain pada inflasi inti yang

rendah, defisit transaksi berjalan yang kecil, dan pertumbuhan ekonomi yang belum meluas pada sebagian besar sektor ekonomi. Namun demikian, sebagai negara dengan ekonomi terbuka, dampak rambatan gejala global antara lain seperti kebijakan tarif AS dan ketegangan geopolitik, berpengaruh pada stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, bauran kebijakan moneter lebih diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas (“*pro-growth and stability*”), sementara kebijakan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (“*pro-growth*”). Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dimaksud didukung oleh akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) sesuai dengan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, membangun pasar sekunder yang modern dan memiliki standar internasional, dan mengembangkan instrumen pembiayaan perekonomian. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2026 akan terus diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Arah bauran kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa siklus ekonomi dan siklus keuangan Indonesia masih di bawah potensial dan sedang meningkat menuju optimal pada sekitar tahun 2027-2028. Bank Indonesia memprakirakan

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 dan 2027 masing-masing dalam kisaran 4,9–5,7% dan 5,1–5,9% didukung oleh konsumsi dan investasi yang meningkat, serta ekspor yang cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia. Inflasi akan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2026 dan 2027 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, eratnya sinergi pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah, dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, disertai digitalisasi yang

terus berkembang pesat. Ke depan, lima tantangan global perlu terus dicermati dan diwaspadai, yakni berlanjutnya kebijakan tarif AS, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya utang Pemerintah dan suku bunga negara maju, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia, serta maraknya uang kripto dan *stablecoins* pihak swasta. Arah kebijakan Bank Indonesia dan tantangan perekonomian ke depan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 pada 28 November 2025 di Jakarta.

Boks.1: Pertemuan Tahunan Bank Indonesia



Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta

PTBI merupakan forum strategis yang secara konsisten diselenggarakan setiap akhir tahun sebagai wujud akuntabilitas dan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan perekonomian nasional. Melalui forum ini, Bank Indonesia menyampaikan secara komprehensif evaluasi kondisi perekonomian terkini, mengidentifikasi berbagai tantangan global dan domestik, serta memaparkan prospek dan arah bauran kebijakan ke depan yang terintegrasi antara kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. PTBI juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi kebijakan nasional melalui arahan langsung Presiden Republik Indonesia. Penyelenggaraan PTBI 2025 yang dilaksanakan pada 28 November 2025 di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, mengusung tema **“Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”**, yang menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan kualitas pertumbuhan, serta memastikan perekonomian Indonesia semakin tangguh dan berdaulat dalam menghadapi dinamika global.

Dalam sesi utama PTBI 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap peran Bank Indonesia yang secara konsisten mengawal stabilitas perekonomian sekaligus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden menegaskan bahwa capaian positif perekonomian Indonesia di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global tidak terlepas dari kerja kolektif seluruh elemen bangsa serta sinergi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter bersama para pemangku kepentingan pengelolaan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan tersebut memungkinkan stabilitas dan pertumbuhan berjalan secara beriringan dan saling memperkuat. Dalam kesempatan tersebut juga ditekankan bahwa perumusan kebijakan ekonomi harus dilandasi ketenangan, dilaksanakan dengan kepercayaan diri, serta diarahkan pada tekad nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan berdiri di atas kemampuan bangsa sendiri.

Gubernur Bank Indonesia menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia ke depan memiliki prospek yang semakin baik, dengan potensi

pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus didukung oleh fondasi ketahanan ekonomi yang semakin kuat. Optimisme tersebut didasarkan pada solidnya stabilitas makroekonomi, terjaganya koordinasi kebijakan, serta penguatan berbagai sektor strategis yang menopang perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia. Inflasi akan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2026 dan 2027, didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, eratnya sinergi pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah, dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, disertai digitalisasi yang terus berkembang pesat. Bank Indonesia tetap mencermati dan mewaspadaikan lima tantangan global, yakni berlanjutnya kebijakan tarif AS, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya utang Pemerintah dan suku bunga negara maju, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia, serta maraknya uang kripto dan *stablecoins* pihak swasta.

Sinergi merupakan prasyarat dalam memperkuat transformasi ekonomi nasional agar pertumbuhan dapat lebih tinggi dan berdaya tahan. Sinergi kebijakan perlu terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, yang meliputi lima area penting, yakni: (i) memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan; (ii) mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan; (iii) meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan; (iv) mengakselerasi digitalisasi ekonomi-keuangan nasional; serta (v) memperkuat kerja sama ekonomi bilateral dan regional. Sinergi kebijakan transformasi sektor riil untuk meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Kebijakan transformasi sektor riil ditempuh baik melalui kebijakan industri maupun kebijakan reformasi struktural, yang saling melengkapi. Kebijakan industri diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produksi dari sektor-sektor prioritas nasional, termasuk di antaranya hilirisasi khususnya berbasis sumber daya alam, industri teknologi, serta industri padat karya. Sementara itu, kebijakan struktural diarahkan untuk perbaikan iklim investasi, persaingan usaha yang sehat, konektivitas infrastruktur, serta penguatan kebijakan perdagangan dan investasi, termasuk melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat-pusat pertumbuhan.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2026 akan terus diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, dalam sinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional.

Kebijakan moneter pada tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas (*"pro-stability"*) dengan tetap memanfaatkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (*"pro-growth"*). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran pada 2026 tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi (*"pro-growth"*). Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dimaksud didukung dengan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) sesuai dengan BPPU 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pengembangan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, serta perluasan instrumen pembiayaan perekonomian. Program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif, termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, juga akan terus diperluas. Bank Indonesia juga terus memperkuat transformasi kelembagaan dengan berfokus pada tiga pilar utama, yakni penguatan fungsi organisasi dan proses kerja yang terintegrasi, percepatan digitalisasi kebijakan dan kelembagaan melalui penyempurnaan *business process re-engineering* dalam kerangka *Integrated Digital Central Bank* (IDCB), serta penguatan sumber daya manusia melalui kepemimpinan, pengembangan kapabilitas baru, dan penguatan *Employee Value Proposition*. Sejalan dengan upaya transformasi tersebut, Bank Indonesia sepanjang 2025 meraih 10 (sepuluh) penghargaan internasional yang semakin mengukuhkan citra Bank Indonesia sebagai salah satu bank sentral terbaik di *emerging markets*.

PTBI 2025 juga dirangkaikan dengan penganugerahan TPID Award dan TP2DD Championship serta BI Award 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi berbagai pihak dalam mendukung stabilitas dan kemajuan perekonomian nasional. Penganugerahan TPID Award diberikan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan kinerja terbaik sedangkan TP2DD Championship diberikan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang berhasil mengakselerasi digitalisasi keuangan daerah. Sementara itu, BI Award 2025 diberikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai otoritas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran, kepada 47 mitra strategis atas kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan kebijakan serta penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga menganugerahkan 3 (tiga) Special Award kepada Mitra Strategis Bank Indonesia yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa dalam menjaga nasionalisme dan memperkuat kedaulatan Republik Indonesia.

3.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan moneter Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dalam sinergi yang erat dengan kebijakan Pemerintah. Pada triwulan IV 2025, kebijakan moneter ditempuh melalui langkah yang terukur dengan mempertahankan suku bunga BI-Rate, memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah, serta memperkuat strategi operasi moneter pro-market. Strategi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, mendorong penurunan suku bunga secara bertahap, serta memastikan kecukupan likuiditas moneter di sistem keuangan guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Konsisten dengan bauran kebijakan tersebut, di bidang moneter Bank Indonesia menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

- a) **Pertama, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan pada bulan Oktober, November dan Desember 2025, serta Januari 2026 pada level 4,75%** sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, serta perlunya turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
- b) **Kedua, Bank Indonesia meningkatkan intensitas langkah untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi NDF di pasar luar negeri maupun intervensi di pasar dalam negeri melalui transaksi *spot* dan DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder.** Bank Indonesia terus memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter dan *swap* valas untuk menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen *spot* dan *swap* dalam valuta Chinese Yuan (CNY) dan Japanese Yen (JPY) terhadap Rupiah yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valas untuk

mendukung penguatan *Local Currency Transaction* (LCT). Ke depan, Rupiah diperkirakan akan cenderung menguat sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar oleh Bank Indonesia dan fundamental ekonomi Indonesia yang akan lebih baik.

- c) **Ketiga, Bank Indonesia terus memperkuat strategi operasi moneter pro-market untuk mendorong penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas, melalui optimalisasi penerbitan SRBI dan pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur.** Ekspansi likuiditas moneter ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp730,90 triliun pada akhir tahun 2025. Bank Indonesia juga telah melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder sejalan dengan kebijakan moneter ekspansif dimaksud. Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp332,1 triliun selama tahun 2025, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* dengan Pemerintah sebesar Rp246,6 triliun. Pembelian SBN oleh Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar dan tetap konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Langkah tersebut juga merupakan wujud sinergi yang erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta mendukung momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia memberikan remunerasi atas penempatan dana perbankan pada *excess reserves* sebesar 25 bps di bawah tingkat suku bunga *Deposit Facility*, yaitu sebesar 3,50% guna meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam mengelola kelebihan likuiditas. Kebijakan ini diharapkan mendorong optimalisasi pemanfaatan likuiditas perbankan untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor riil, sehingga dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- d) **Keempat, Bank Indonesia juga terus mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) guna memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mendorong penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas, melalui:** (i) penguatan efektivitas penerbitan BI-FRN (*Floating Rate Note*) dan pengembangan *Overnight Index Swap* (OIS) tenor di atas *overnight* untuk membentuk struktur suku bunga yang efisien di pasar uang; dan (ii) penguatan peran *dealer* utama

untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi *repurchase agreement* (repo) antarpelaku pasar melalui *Central Counterparty* (CCP).

2. Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia melaksanakan strategi untuk memperkuat fleksibilitas likuiditas perbankan serta mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan guna mendukung intermediasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada triwulan IV 2025, respons kebijakan makroprudensial Bank Indonesia antara lain:

- a) Memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (*forward-looking*) untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit/pembiayaan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang lebih tinggi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Kebijakan tersebut mulai diimplementasikan pada 16 Desember 2025, dengan memberikan insentif kepada bank sebesar total 5,5% dari DPK perbankan berdasarkan:
 - i) Komitmen bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu (*lending channel*) paling tinggi sebesar 4,5% dari DPK; dan
 - ii) Penyesuaian suku bunga kredit atau pembiayaan baru bank yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*interest rate channel*) paling tinggi sebesar 1% dari DPK.
- b) Mempertahankan kebijakan Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%;
- c) Mempertahankan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%;
- d) Melanjutkan Rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor paling rendah sebesar 0%, berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026;
- e) Mempertahankan Rasio Pendanaan Luar Negeri bank (RPLN) paling tinggi sebesar 35% terhadap modal bank;
- f) Mempertahankan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4% dengan fleksibilitas repo sebesar 4%, dan rasio PLM

Syariah sebesar 2,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%; dan

- g) Memperkuat publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM, termasuk respons perubahan SBDK terhadap perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

3. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Pada triwulan IV 2025, respons kebijakan sistem pembayaran yang ditempuh untuk perluasan akseptasi digital dilakukan melalui:

- a) Perluasan akseptasi digital dilakukan melalui:
 - i) Implementasi strategi pencapaian target QRIS, baik dari sisi *supply* maupun *demand*;
 - ii) Edukasi QRIS Antarnegara kepada *merchant* dan pengguna di berbagai destinasi pariwisata;
 - iii) Akselerasi persiapan implementasi QRIS Antarnegara;
 - iv) Penguatan edukasi dan sosialisasi QRIS Tanpa Pindai (TAP) kepada pengguna dan *merchant* khususnya di sektor transportasi melalui berbagai upaya peningkatan *awareness* baik di sisi operator transportasi maupun masyarakat di berbagai wilayah;
 - v) Pelaksanaan *event* inovasi melalui Hackathon 2025 dan Pembentukan DIGDAYA (Digital Talenta Berdaya dan Berkarya);
- b) Perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan Kartu Kredit (KK) sampai dengan 31 Desember 2025, yang terdiri dari:
 - i) tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia kepada bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah; dan
 - ii) kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000;
- c) Memperluas implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk integrasi layanan pembayaran industri serta memperkuat stabilitas infrastruktur pembayaran dan

pengawasan terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan lembaga pendukung;

- d) Menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah 3T.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait dengan pengendalian inflasi khususnya harga

pangan (*volatile food*), sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus dilakukan dengan dukungan penuh Bank Indonesia, baik dari kantor pusat maupun 46 kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia. Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

BAB 4

TRANSFORMASI BANK INDONESIA



Bank Indonesia terus memperkuat transformasi yang telah ditempuh sejak tahun 2018 guna memperkuat kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia dalam merespons lingkungan strategis yang berkembang. Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global, Bank Indonesia memperkuat sinergi bauran kebijakan guna mendukung transformasi ekonomi nasional sejalan dengan program Asta Cita. Selain dinamika perekonomian global dan nasional yang terjadi sepanjang triwulan IV 2025, termasuk perkembangan digitalisasi, Bank Indonesia juga perlu mencermati perubahan lingkungan strategis yang berasal dari perubahan demografi pegawai yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Perkembangan ini menjadi beberapa faktor yang mendorong Bank Indonesia untuk mempercepat transformasi digital proses bisnis kebijakan dan kelembagaan dengan tetap menjaga tata kelola yang baik dan profesional. Bank Indonesia juga menegaskan komitmen untuk menjaga kecermatan, kepatuhan hukum, serta kepentingan institusi melalui keterlibatan aktif dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan lintas kelembagaan. Selain itu, dinamika kebutuhan dan proses bisnis yang terus berkembang berdampak pada keperluan Bank Indonesia untuk melakukan reprioritasi program kerja, serta memastikan implementasi yang senantiasa memenuhi standar mutu nasional dan internasional. Mencermati berbagai lingkungan strategis tersebut, selain melakukan penguatan respons kebijakan dan prioritas program kerja, Bank Indonesia mempertajam sejumlah agenda transformasi dan mengimplementasikannya secara bertahap.

Transformasi Bank Indonesia mencakup empat area utama, yaitu Kebijakan, Organisasi dan Proses Kerja, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Kerja, serta Digital. Transformasi kebijakan mencakup penyempurnaan ketentuan bauran kebijakan utama dan pendukung, serta pengembangan berbagai konsepsi/kerangka kerja dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, dengan berlandaskan pada penerapan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional. Di sisi lain, transformasi organisasi dan proses kerja diarahkan pada penguatan lembaga yang berkinerja optimal dan digitalisasi proses bisnis kebijakan dan kelembagaan berbasis efektif, efisien, dan kepatuhan. Sementara itu, transformasi SDM dan budaya kerja ditempuh untuk mendukung pelaksanaan digital *Digital Business Process Reengineering* (DBPR) melalui penguatan aspek kepemimpinan SDM Bank Indonesia yang berintegritas, kompeten, profesional, *agile* terhadap perubahan, dan berperilaku mulia. Selanjutnya,

transformasi digital diarahkan untuk mendukung proses bisnis kebijakan dan kelembagaan yang semakin efektif dan efisien menuju visi sebagai bank sentral digital terdepan.

4.1. Transformasi Kebijakan

Bank Indonesia melanjutkan penguatan bauran kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mencapai tujuan sebagaimana amanat UU. Pada triwulan IV 2025, di tengah tantangan lingkungan strategis yang semakin berat, Bank Indonesia memperkuat pengaturan terkait implementasi dari integrasi kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran sebagai bagian dari Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI). BKBI akan memperkuat integrasi kerangka kerja perumusan dan pelaksanaan antarkebijakan utama, yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung. Integrasi ini konsisten dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia, yakni mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia terus memperkuat pengaturan terkait BKBI. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari integrasi kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran yang turut ditopang oleh kebijakan pendukung untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. Transformasi kebijakan utama mencakup reformasi regulasi dan penyusunan kerangka kerja terkait pengelolaan aset sekuritas serta protokol manajemen krisis terintegrasi. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memperkuat proses bisnis statistik untuk meningkatkan kualitas data melalui penguatan sinergi bersama Kementerian/Lembaga dalam membangun integrasi data terkait perizinan sektor keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat transformasi kebijakan pendukung melalui pengaturan Kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB), Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (EKDA) serta pendalaman infrastruktur pasar keuangan melalui penguatan dan perluasan fungsi *Central Counter Party* (CCP) dan layanan *Third Party Agent* (TPA) Repo. Seluruh langkah ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk memastikan tata kelola kebijakan yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis data, sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

4.1.1. Transformasi di Bidang Kebijakan Moneter

1) Reformasi Regulasi Area Moneter

Bank Indonesia memperkuat kerangka kerja kebijakan moneter melalui penyempurnaan pengaturan yang selaras dengan BKBI. Penyempurnaan ini menjadi landasan hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang moneter sesuai amanat UU BI jo. UU P2SK. Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia tengah menyusun pengaturan di area moneter yang selaras dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) BKBI, yakni ketentuan internal tentang Pengelolaan Aset Sekuritas (PAS) Bank Indonesia. Peraturan tersebut ditujukan untuk memastikan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pengelolaan aset sekuritas sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan Undang-Undang, sekaligus menjadi acuan utama bagi peraturan pelaksanaan lebih lanjut serta pedoman umum dalam pelaksanaannya. Penerbitan ketentuan terkait Pengelolaan Aset Sekuritas tersebut direncanakan terbit pada triwulan I 2026.

2) Pengembangan Digitalisasi Proses Bisnis Statistik

Kebutuhan akan data dan informasi yang berkualitas terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan yang semakin kompleks, serta pesatnya perkembangan teknologi digital. Ketersediaan data yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi menjadi prasyarat penting untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, responsif, dan kredibel, termasuk komitmen Bank Indonesia untuk penyediaan data dan informasi ekonomi pada tingkat nasional dan internasional. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia melanjutkan transformasi proses bisnis statistik secara *end-to-end*, mulai dari perolehan, pemrosesan, hingga diseminasi, serta aktivitas pendukung (*overarching*) yang memperkuat tata kelola, kualitas, dan pemanfaatan data sebagai aset strategis.

Bank Indonesia mengakselerasi digitalisasi proses bisnis statistik untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, ketepatan waktu, dan konsistensi penyediaan data guna memperkuat pengambilan kebijakan yang berbasis data (*data-driven policymaking*). Dari sisi perolehan data, pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia melanjutkan penguatan berbagai aplikasi pelaporan serta sarana pertukaran data antarlembaga guna merespons dinamika kebutuhan data dan informasi yang semakin kompleks serta memastikan

agar perolehan data semakin aman, *seamless*, terstandarisasi, efisien, bertata kelola, dan berbasis metadata. Penguatan dimaksud juga diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia serta mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, antara lain pada Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) serta Laporan Lalu Lintas Devisa – Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (LLD-KPPK). Pada periode yang sama, Bank Indonesia juga menghasilkan konsepsi awal penguatan pelaporan monitoring Lalu Lintas Devisa untuk menjawab kebutuhan pengembangan dalam jangka pendek.

Bank Indonesia juga terus melanjutkan penyusunan program digitalisasi proses bisnis dan diseminasi statistik untuk mewujudkan proses bisnis statistik yang lebih terstandar, efisien, adaptif terhadap kebutuhan kebijakan, serta selaras dengan *best practices*. *Milestone* penting pada periode ini adalah akselerasi integrasi input ke pusat data sebagai fondasi digitalisasi pemrosesan dan diseminasi yang andal dan *straight-through*. Inisiatif ini berdampak pada peningkatan efisiensi alur kerja, penurunan potensi kesalahan, dan peningkatan pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan.

Dari sisi penguatan *overarching activities* serta tata kelola data dan informasi statistik, Bank Indonesia berhasil menyelesaikan pengembangan *prototipe* digitalisasi pengelolaan hak akses yang lebih adaptif, efisien, dan terintegrasi. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola yang bertujuan untuk memastikan proses pengelolaan akses data menjadi lebih cepat, terukur, dan aman melalui penerapan otomatisasi alur kerja, standarisasi dokumen, penguatan monitoring serta *audit trail*. Dengan pendekatan ini, proses pemberian hak akses menjadi lebih terkendali dan terdokumentasi secara menyeluruh, sekaligus mendukung proses analisis dan perumusan kebijakan yang berbasis data secara lebih optimal. Sebagai salah satu bentuk inovasi digital, Bank Indonesia juga berkolaborasi bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Kemeninvesthil) dalam membangun integrasi data terkait perizinan sektor keuangan melalui integrasi sistem aplikasi layanan perizinan sektor keuangan Bank Indonesia (EASE) dengan *One Single Submission* (OSS) Kemeninvesthil. Hal ini diluncurkan melalui forum *Central Banking Service Excellence Achievement* (CBSEA) pada 26 November 2025.

Boks.2: Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) 2025



Pembukaan Central Bank Service Excellence Achievement di Jakarta

Central Bank Service Excellence Achievement (CBSEA) merupakan agenda tahunan Bank Indonesia untuk mengapresiasi sekaligus mengomunikasikan berbagai capaian kinerja dan inovasi layanan kebanksentralan kepada para pemangku kepentingan. Mengusung tema “Driving Service Excellence through Digitalization: Agile Central Banking Services Journey in a Dynamic Global Landscape”, CBSEA 2025 diselenggarakan pada 26 November 2025 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta.

CBSEA merupakan forum ini menjadi momentum strategis bagi Bank Indonesia untuk menegaskan komitmen penguatan layanan kebanksentralan yang unggul, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. CBSEA 2025 dihadiri oleh Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Kemenveshil). Hal ini mencerminkan komitmen

bersama dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menghadirkan layanan kebanksentralan yang modern, *agile*, dan berstandar internasional.

Penyelenggaraan CBSEA 2025 dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas sistem keuangan, pesatnya transformasi digital, serta tingginya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap layanan kebanksentralan yang cepat, transparan, dan terintegrasi. Dalam konteks ini, layanan kebanksentralan menjadi instrumen strategis yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung iklim investasi yang kondusif, serta memperkuat kepercayaan publik. Penguatan *service excellence* menjadi fokus utama yang terus dikembangkan melalui berbagai inovasi dan digitalisasi proses bisnis, penguatan tata kelola, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, telah dilaksanakan modernisasi sistem perizinan melalui



pengembangan aplikasi EASE yang telah mendorong proses perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terstandarisasi. Di sisi operasional, penerapan Sistem Manajemen Aplikasi Tresuri Terintegrasi (SMART) mendukung administrasi operasional tresuri yang lebih akurat dan terukur, sementara implementasi sistem *Safety, Effectiveness, Compliance, Underlying Risk Evaluation* (SECURE) memperkuat penatausahaan agunan PLJP/PLJPS secara lebih akurat dan terdokumentasi secara digital. Seluruh inisiatif tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada standar internasional sebagai fondasi tata kelola yang andal dan berkelanjutan.

Salah satu agenda penting dalam CBSEA 2025 adalah peluncuran *dashboard* Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui hak akses ke aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Peluncuran *dashboard* ini merupakan tindak lanjut dari sinergi Bank Indonesia dengan Kemenveshil dalam memperkuat integrasi

data perizinan. Dengan adanya *dashboard* tersebut diharapkan proses verifikasi legalitas perizinan dapat lebih cepat dan akurat. Ke depan, integrasi data perizinan melalui OSS diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pengembangan layanan yang semakin terintegrasi dan berkelanjutan.

Sinergi lintas sektor yang diperkuat melalui CBSEA 2025 tidak hanya meningkatkan efisiensi proses internal, tetapi juga mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, inklusif, dan berdaya saing. Melalui forum ini, Bank Indonesia menegaskan bahwa transformasi layanan kebanksentralan merupakan sebuah perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan inovasi, kolaborasi, dan komitmen bersama, guna memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan, penguatan kepercayaan publik, serta stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

3) Pengembangan Instrumen Moneter

Bank Indonesia mengembangkan instrumen OM *Pro-Market* dalam rangka mendukung tercapainya Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) yang modern dan maju, guna memperkuat transmisi BKBI serta mendukung pembiayaan pembangunan. Instrumen OM *Pro-Market* di pasar Rupiah saat ini mencakup SRBI, SUKBI, dan Repo. Sementara itu, instrumen kebijakan moneter di pasar valas mencakup SVBI, SUVBI, dan DNDF. Penyempurnaan instrumen bertujuan untuk menciptakan produk PUVA yang lebih variatif, likuid, efisien, dan kredibel, antara lain melalui pengembangan ragam, tenor, dan nominal transaksi, serta pembagian tahap implementasinya dalam operasi moneter (OM) melalui *Dealer Utama* PUVA.

Dalam rangka memperkuat instrumen operasi moneter untuk mendukung pendalaman pasar uang domestik agar mendorong *Overnight Index Swap* (OIS) *market* berbasis *INDONIA*, Bank Indonesia mengembangkan Bank Indonesia *Floating Rate Notes* (BI-FRN). Penerbitan BI-FRN telah dimulai sejak 17 November 2025 melalui *Dealer Utama* PUVA. Ke depan, penerbitan BI-FRN akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan OIS *market* serta inisiatif pengembangan instrumen *floating rate* oleh *market*. Selanjutnya, untuk mengakselerasi pengembangan pasar valas domestik, Bank Indonesia juga telah melakukan perluasan *currency* dalam OM Valas melalui instrumen swap dan spot non-USD dalam mata uang RMB (mata uang

Tiongkok) dan JPY (mata uang Jepang) yang telah diimplementasikan sejak 23 Desember 2025.

4.1.2. Transformasi di Bidang Makroprudensial

1) Reformasi Regulasi Area Makroprudensial

Bank Indonesia memperkuat pengaturan terkait pengelolaan likuiditas perbankan dan perekonomian, antara lain melalui penerbitan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan makroprudensial yang sejalan dengan BKBI. Hal ini ditujukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Sehubungan dengan pengaturan untuk mendorong kredit atau pembiayaan yang optimal, Bank Indonesia mengimplementasikan skema pemberian insentif yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (KLM *forward-looking*). Pelaksanaan ini didasarkan pada komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan sektoral bank (*lending channel*) dan transmisi suku bunga (*interest rate channel*). Insentif tersebut diberikan dalam bentuk pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah secara rata-rata.

Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan Bank Indonesia berupa PBI dan ketentuan internal mengenai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) pada triwulan IV tahun 2025. Berdasarkan ketentuan

terkini, insentif KLM ditetapkan paling tinggi 5,5% dari dana pihak ketiga yang berasal dari insentif penyaluran kredit/pembiayaan (*lending channel*) paling tinggi sebesar 5% dan transmisi suku bunga (*interest rate channel*) paling tinggi sebesar 0,5%. Selanjutnya pada pertengahan Desember 2025, dilakukan penguatan KLM *forward-looking* untuk mempercepat penurunan suku bunga perbankan dengan tetap mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan, melalui peningkatan insentif yang berasal dari transmisi suku bunga (*interest rate channel*) menjadi paling tinggi sebesar 1%, sementara insentif yang berasal dari penyaluran kredit/pembiayaan (*lending channel*) menjadi paling tinggi sebesar 4,5%, sedangkan untuk total insentif KLM tetap paling tinggi sebesar 5,5% yang mulai berlaku sejak 16 Desember 2025.

Pada triwulan IV 2025 Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan makroprudensial. Peraturan dimaksud antara lain mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial (RIM PLM), pinjaman likuiditas jangka pendek, dan *loan to value* (LTV) atau *financing to value* (FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka pembelian kendaraan bermotor. Ketentuan RIM PLM dan PLJP disempurnakan dalam rangka mendukung serta mengakomodasi perluasan surat berharga dalam operasi moneter (OM) melalui implementasi perluasan *underlying* transaksi repo OM berupa obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM dan agunan PLJP. Selanjutnya terkait ketentuan LTV/FTV yang akan berakhir di akhir Desember 2025, diperpanjang sampai dengan akhir Desember 2026. Untuk itu, batasan rasio LTV/FTV dan uang muka longgar yang ditetapkan pertama kali pada tahun 2021 masih dipertahankan untuk mendukung pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang optimal.

Sehubungan dengan penguatan upaya pencegahan dan penanganan krisis, sebagai bagian dari kontribusi Bank Indonesia untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan, pada triwulan IV 2025 Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal tentang Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT) pada tanggal 24 Desember 2025. Penerbitan ketentuan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kerangka kesiapsiagaan dan respons kelembagaan Bank Indonesia dalam menghadapi potensi krisis, melalui pengaturan mekanisme koordinasi termasuk dengan Pemerintah dan KSSK, pengambilan keputusan, serta langkah penanganan yang terstruktur dan terintegrasi. Dengan adanya PMKT, Bank Indonesia semakin memperkuat kapasitas kelembagaan dalam

mendeteksi, merespons, dan memitigasi risiko sistemik secara lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif guna turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Kerangka kerja PMKT mengharmonisasikan pelaksanaan PMK Kebijakan (terdiri dari subprotokol moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran) dengan PMK Kelembagaan (terdiri dari aspek tata kelola, keuangan, dan operasional). PMKT tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung tercapainya stabilitas nilai Rupiah, terpeliharanya stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga SSK serta terjaganya aspek tata kelola, keuangan, dan operasional kelembagaan melalui PMKT Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas dan keberlangsungan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis.

4.1.3. Transformasi di Bidang Sistem Pembayaran

1) Reformasi Regulasi Area Sistem Pembayaran

Dalam rangka mendukung implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP), Bank Indonesia telah memperkuat aspek pengaturan. Penguatan aspek pengaturan dimaksud dilakukan melalui penerbitan ketentuan yang relevan guna mendukung stabilitas, efisiensi, dan integrasi sistem pembayaran nasional, serta diselaraskan dengan ketentuan BKBI.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 10 Tahun 2025 dan PADG tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran sebagai wujud implementasi inisiatif regulasi pada tanggal 24 Desember 2025. Pengaturan tersebut akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan SP ke depan sehingga dapat meningkatkan daya tahan struktur industri SP di tengah pesatnya arus digitalisasi. Penguatan penataan struktur industri pada peraturan tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan industri SP yang konsolidatif dan berdaya tahan sesuai dengan BSPI 2030. Ke depan, Bank Indonesia tengah mempersiapkan implementasi PBI tersebut terhadap seluruh PJP guna memastikan kepatuhan yang seragam dan menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang lebih sehat.

Bank Indonesia juga telah menerbitkan ketentuan internal tentang Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam pada tanggal 31 Desember 2025. Sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Rupiah memiliki kedudukan yang penting sebagai simbol kedaulatan negara dan kekuatan ekonomi nasional. Sehubungan

HIGH LEVEL TALK: SINERGI DAN KOLABORASI KEBIJAKAN UNTUK MENDUKUNG DIGITALISASI SEBAGAI NEW SOURCE OF GROWTH



High Level Talk: Sinergi dan Kolaborasi Kebijakan untuk Mendukung Digitalisasi sebagai New Source of Growth pada FEKDI x IFSE di Jakarta

dengan hal tersebut, ketentuan internal disusun sebagai acuan Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan uang Rupiah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan menjaga tata kelola yang baik agar uang Rupiah tetap berperan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang ekonomi dan stabilitas sistem pembayaran.

2) Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran

Bank Indonesia secara berkelanjutan memperkuat infrastruktur SP yang tangguh dan terintegrasi guna mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. Pengembangan infrastruktur SP terus dilanjutkan untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, secara lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Infrastruktur SP diimplementasikan melalui penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur SP ritel dan *wholesale*, antara lain mencakup BI-FAST dan *new* BI-FAST.

Pada triwulan IV 2025, upaya Bank Indonesia dalam pengembangan infrastruktur SP retail dan *wholesale* terus dilanjutkan. Arah kebijakan infrastruktur SP Ritel mencakup pengembangan *New* BI-FAST dan *fast payment* industri. Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengembangan infrastruktur SP yang 3I (interkoneksi, integrasi, dan interoperabilitas), Bank Indonesia juga secara proaktif menjalin koordinasi dan komunikasi dengan otoritas serta industri terkait.

Dari sisi perkembangan transaksi, penggunaan infrastruktur sistem pembayaran ritel terus tumbuh positif, didukung oleh penyediaan dan pengembangan

infrastruktur yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Hal ini semakin mendorong perkembangan penggunaan infrastruktur pembayaran ritel. Pada triwulan IV 2025, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1,36 miliar transaksi atau tumbuh 30,44% (yoy), dengan nominal transaksi mencapai Rp 3.442,26 triliun.

3) Pengembangan Inovasi dan Perluasan Akseptasi

Bank Indonesia terus berupaya untuk mendukung inovasi dan akseptasi di industri sistem pembayaran. Melalui BSPI 2030, Bank Indonesia menginisiasi pembentukan Bank Indonesia-Digital Innovation Center (BIDIC) atau Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) yang dikembangkan untuk mendorong inovasi dan akseptasi digital secara seimbang dengan perlindungan konsumen, integritas, stabilitas dan persaingan usaha yang sehat. Tujuan ini akan dicapai melalui tiga besaran kebijakan, yaitu: (i) mendorong inovasi layanan pembayaran; (ii) memperkuat literasi dan akseptasi digital masyarakat; dan (iii) memperkuat aspek manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Ketiga besaran strategi tersebut akan diimplementasikan dalam wadah yang kolaboratif antara Bank Indonesia dan industri. Inisiatif tersebut merupakan upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan inovasi layanan pembayaran yang diarahkan untuk dapat berlangsung di dalam koridor persaingan usaha yang sehat secara kolaboratif dengan industri.

Pada triwulan IV 2025, BIDIC/PIDI telah diimplementasikan melalui eksplorasi ide inovatif pada Hackathon. Cakupan eksplorasi pada Hackathon 2025 berfokus pada 3 (tiga) area, yaitu: (i) *AI as a Service (AlaaS) for digital-delivered service export*; (ii) inovasi

keuangan dan layanan publik; serta (iii) manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Pemenang BI-OJK Hackathon 2025 diumumkan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI x IFSE) 2025 yang terpilih dari 2.336 orang pendaftar dan 743 proposal inovasi. Pelaksanaan Hackathon bukan hanya perlombaan, tetapi juga menjadi upaya pengembangan talenta digital Tanah Air yang inovatif dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

4) Pengembangan Konektivitas Sistem Pembayaran Lintas Negara

Bank Indonesia terus melanjutkan komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas melalui kesepakatan kerja sama dengan beberapa bank sentral. Kerja sama dilakukan dalam rangka mewujudkan konektivitas pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Kerja sama tersebut juga berpotensi membuka akses pasar bagi para pelaku usaha Indonesia ke kawasan. Ke depan, Bank Indonesia akan terus melakukan perluasan kerja sama *Regional Payment Connectivity* (RPC) dengan negara lainnya. Arah strategis inisiatif internasional tersebut ditujukan untuk mendorong interkoneksi lintas negara serta perluasannya dalam koridor yang menjamin kepentingan nasional. Inisiatif ini akan diwujudkan melalui dua besaran kebijakan, yaitu: (i) memperluas cakupan kerjasama pembayaran antarnegara; dan (ii) mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional untuk siap terkoneksi antarnegara. Prinsip yang terkandung dalam kerangka RPC akan menjadi landasan bagi inisiatif ini dalam mengimplementasikan kedua besaran kebijakan tersebut.

Bank Indonesia turut terlibat aktif dalam proyek Nexus dengan mempersiapkan proses *onboarding* pada Nexus. Akselerasi proses *onboarding* tersebut diawali dengan ditandatanganinya *letter of intent* keikutsertaan Bank Indonesia pada Nexus. Proyek Nexus ini merupakan inisiatif pengembangan konektivitas SP lintas negara untuk memperkuat integrasi SP domestik dan antarnegara yang lebih cepat, murah, mudah, transparan, dan inklusif. Proyek Nexus merupakan inisiatif Bank for International Settlements (BIS) melalui *BIS Innovation Hub* yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran antarnegara dengan menghubungkan berbagai sistem pembayaran instan domestik (*instant payment systems/IPS*) secara global. Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Nexus Global Payment, entitas yang dibentuk untuk mengelola

implementasi Proyek Nexus, untuk mengeksplorasi bisnis dan skema Nexus sebagai tindak lanjut penerimaan Bank Indonesia sebagai anggota yang berpartisipasi dalam Proyek Nexus.

5) Pengembangan Infrastruktur Data

Bank Indonesia terus melanjutkan eksplorasi dan eksperimentasi terkait pengembangan infrastruktur data SP untuk memperkuat integritas transaksi dan mendukung perumusan kebijakan. Arah strategis ini ditempuh melalui pengembangan *Payment Info* serta *BI-Payment Clear* sebagai infrastruktur publik untuk pemberian layanan pada berbagai *usecase*. Selanjutnya, perolehan data profil dan transaksi granular dilakukan melalui sistem *capturing* yang akan dibangun melalui mekanisme *push* untuk perolehan data periodik serta mekanisme *pull* untuk perolehan data insidental. Sedangkan, pengembangan *BI-Payment Clear* diarahkan untuk memperkuat integritas transaksi *retail fast payment* dan menjadi acuan untuk pengembangan infrastruktur data. Penguatan integritas transaksi akan didukung oleh pengembangan modul *fraud detection system* (FDS) yang tersedia pada *payment clear*.

Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mendukung integrasi dan konsolidasi data transaksi secara nasional, sekaligus memperkuat pengawasan dan keamanan sistem pembayaran di era digital. Dengan identifikasi transaksi yang lebih presisi, otoritas dapat melakukan deteksi lebih dini terhadap potensi *fraud*, mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar, serta memitigasi risiko sistemik secara lebih efektif.

4.1.4. Transformasi di Bidang Kebijakan Pendukung

1) Reformasi Regulasi Area Kebijakan Pendukung

Implementasi kebijakan Bank Indonesia di daerah didukung oleh Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA). KEKDA berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan utama Bank Indonesia, yaitu menjaga stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat pengaturan terkait KEKDA agar pelaksanaannya senantiasa berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia tengah menyusun penyempurnaan terhadap acuan dan pedoman umum terkait KEKDA dalam bentuk ketentuan internal. Secara khusus, tujuan,

sasaran, strategi, dan proses KEKDA dilakukan berdasarkan prinsip sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi. Mengacu pada prinsip sistem tata kelola tersebut, pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia terkait KEKDA didasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu: (i) bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; (ii) sejalan dengan mandat dan norma pada peraturan perundang-undangan dan/atau prosedur; (iii) merupakan bagian dari bauran kebijakan nasional; dan (iv) menerapkan transparansi kebijakan.

2) Pengembangan Kerangka Kerja Kebijakan Pendukung

Bank Indonesia terus memperkuat perumusan kebijakan pendukung, antara lain melalui penyusunan kerangka kerja/konsepsi, dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pendukung untuk menopang BKBI. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam memperkuat perumusan kerangka kerja, memberikan gambaran konsepsi model bisnis, kebutuhan layanan dan model operasional, serta solusi teknologi digital untuk kebijakan pendukung.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia mengembangkan kerangka kerja Kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB) sebagai kebijakan pendukung atas kebijakan utama Bank Indonesia. Kebijakan IEKB berfokus pada kebijakan dan implementasi program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, serta upaya memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berorientasi pada kepentingan nasional. Melalui ketentuan internal tentang IEKB, diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berdaya saing, mengoptimalkan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan, serta memperluas literasi dan sinergi ekonomi-keuangan.

3) Pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan

Bank Indonesia terus mendukung pengembangan dan penguatan *Central Counterparty* (CCP) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). CCP adalah lembaga yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi keuangan sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli. Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai penyelenggara CCP agar pengembangan dan penguatan CCP sesuai dengan arah kebijakan

Bank Indonesia dan standar internasional *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) yang dikeluarkan oleh *Committee on Payments and Market Infrastructures-International Organization of Securities Commissions* (CPMI-IOSCO). Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung tata kelola dan manajemen risiko CCP yang komprehensif.

Pengembangan CCP juga memperhatikan prinsip interkoneksi, integrasi dan, interoperabilitas (3I) dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia berkoordinasi dengan penyelenggara CCP, perbankan, dan *penyedia electronic trading platform* untuk mengembangkan konektivitas sistem CCP yang mendukung *straight through processing* (STP), termasuk keterhubungan dengan BI-RTGS dan BI-SSSS sebagai sistem setelmen dana dan surat berharga. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi yang erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar antarbank yang tidak dikliringkan melalui CCP (*Non-Centrally Cleared Derivatives/NCCD*), termasuk pengaturan kebutuhan permodalan bank atas eksposur terhadap CCP.

Bank Indonesia juga mendorong perluasan fungsi CCP sebagai *tri-party agent* untuk transaksi repo (TPA repo). Peluncuran TPA Repo merupakan wujud nyata sinergi antara OJK, Bank Indonesia, PT KPEI, dan 8 (delapan) *pilot bank* dalam memperkuat infrastruktur pasar keuangan. Melalui TPA repo, bank dapat mengalihkan fungsi manajemen agunan dari *back-office* ke sistem TPA, sehingga transaksi repo menjadi lebih efisien, mengurangi risiko operasional, dan terstandardisasi.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat infrastruktur pasar keuangan dan mendukung pendalaman pasar uang nasional, Bank Indonesia bersinergi dengan OJK untuk terus mendorong pemanfaatan dan penguatan fungsi CCP. Bank Indonesia berkolaborasi dengan OJK menyelenggarakan seminar nasional dengan tema "*Strengthening Indonesia's Repo Market through Synergy and Global Best Practice*" pada 19 – 21 November 2025 di Jakarta. Seminar nasional tersebut turut mengundang perwakilan *International Capital Market Association* (ICMA) sebagai narasumber serta diikuti oleh lebih dari 200 orang secara luring dan lebih dari 420 orang secara daring. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme CCP Repo dan *Tri-Party Agent* (TPA) Repo sesuai praktik global untuk mendorong peningkatan likuiditas di pasar repo.

Boks.3: Peluncuran Tri-Party Agent Repo dan Perluasan penandatanganan Global Master Repurchase Agreement (GMRA)



Peluncuran Tri-Party Agent Repo dan Perluasan Penandatanganan Global Master Repurchase Agreement (GMRA) di Jakarta

Dalam upaya mewujudkan pasar repo yang semakin modern, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan *Tri-Party Agent* atas transaksi repo (TPA repo) sekaligus melakukan perluasan penandatanganan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) pada Senin, 6 Oktober 2025 di Birawa Hall, Hotel Bidakara Jakarta. Acara tersebut merupakan sinergi antara Bank Indonesia dan pemangku kepentingan strategis, antara lain Kementerian Keuangan, OJK, LPS, KPEI, BEI, APUVINDO, HIMDASUN, serta pemangku kepentingan lainnya. Acara tersebut juga dihadiri oleh lebih dari 250 pelaku pasar yang terdiri dari sektor perbankan dan korporasi. Peluncuran TPA repo ini merupakan momentum

penting bagi penguatan infrastruktur pasar uang nasional melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak yang terlibat.

Kehadiran TPA repo sebagai pihak ketiga yang menatausahakan agunan dan membantu proses penyelesaian transaksi akan memberikan kemudahan bagi bank maupun pelaku pasar non-bank untuk melakukan transaksi repo secara lebih efisien dan aman. Layanan TPA repo bertujuan untuk mengatasi kendala operasional dan risiko agunan yang selama ini dihadapi pelaku pasar melalui pemanfaatan peran pihak ketiga yang independen untuk mengelola administrasi agunan secara otomatis. Dukungan pihak ketiga dalam transaksi repo membantu pelaku pasar untuk dapat



mengoptimalkan pengelolaan transaksi repo, antara lain melalui penerapan valuasi untuk manajemen agunan yang lebih baik.

Perluasan penandatanganan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) juga dilakukan untuk mendorong peningkatan interkoneksi antarpelaku transaksi repo. Melalui penandatanganan bersama dan standardisasi ini, diharapkan akan mendorong perluasan pelaku pasar dan meningkatkan kepercayaan antarpelaku pasar (*interbank trust*). Atas hal tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan peningkatan volume transaksi harian secara signifikan serta terciptanya kurva imbal hasil (*yield curve*) yang lebih kredibel. Hal ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme transmisi kebijakan

moneter dan memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi perbankan maupun korporasi di tengah dinamika ekonomi global.

Peluncuran layanan TPA repo dan perluasan GMRA menandai transformasi fundamental dalam struktur pasar keuangan domestik. Layanan TPA repo oleh KPEI telah beroperasi sejak 29 September 2025. Delapan bank telah berpartisipasi sebagai pengguna jasa tahap awal, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, Permata, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan BPD Jatim. Semakin berkembangnya pasar repo di Indonesia akan mendorong pendalaman pasar dan memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas yang lebih tinggi bagi lembaga jasa keuangan.

Transformasi Kelembagaan

Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan kerangka Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) sebagai bentuk penerapan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, serta dukungan kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sesuai mandat UU P2SK. Penguatan kerangka BKK adalah langkah strategis untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip kepatuhan. Penerapan BKK menggunakan strategi 3P yaitu perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian yang terintegrasi di setiap area kelembagaan. Ketentuan internal telah disusun sebagai pedoman untuk mengintegrasikan proses BKK dengan BKBI untuk menyelaraskan strategi jangka menengah dan tahunan antara area kelembagaan dan area kebijakan.

Bank Indonesia juga memperkuat integrasi tata kelola sejalan dengan penguatan area dukungan organisasi dan sumber daya sesuai kerangka BKK. Penguatan ini diarahkan pada asesmen kecukupan pengaturan melalui integrasi fungsi hukum, manajemen risiko, dan audit intern. Langkah tersebut bertujuan mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan kredibel dalam menghadapi dinamika global dan tuntutan akuntabilitas publik. Upaya ini ditempuh melalui peningkatan koordinasi antarfungsi dan penyelarasan proses pengambilan keputusan, sehingga memperkuat ketahanan kelembagaan (*institutional strength*) Bank Indonesia. Pelaksanaan asesmen integrasi tata kelola di 5 (lima) area yaitu pengendalian moneter, pengadaan, Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan (EPML), pengelolaan cadangan devisa, dan pengelolaan uang rupiah. Secara umum, kelima area dinilai telah

memadai dari aspek kecukupan ketentuan, keandalan manajemen risiko, dan efektivitas pengendalian intern.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus mempertajam agenda transformasi kelembagaan pada tiga area utama yaitu organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digital. Pada Triwulan IV 2025, pelaksanaan transformasi kelembagaan diarahkan pada penyempurnaan proses bisnis dan penguatan fungsi organisasi melalui pendekatan *strategy-driven*, terintegrasi, serta adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui reformulasi regulasi, penyempurnaan struktur organisasi, serta penguatan digitalisasi proses kerja melalui implementasi *Digital Business Process Reengineering* (BPR). Sejalan dengan hal tersebut, transformasi sumber daya manusia difokuskan pada penerapan sistem kerja unggul di era digital guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja, sekaligus memperkuat *employee value proposition* Bank Indonesia melalui reformulasi regulasi. Di sisi lain, transformasi digital terus dilanjutkan untuk mendukung penguatan proses kerja, baik pada area kebijakan maupun kelembagaan, dalam rangka mewujudkan visi Bank Indonesia sebagai bank sentral digital terdepan.

4.2. Transformasi Organisasi dan Proses Kerja

Pada area organisasi dan proses kerja, fokus transformasi diarahkan untuk penguatan kerangka bauran kebijakan kelembagaan Bank Indonesia dan penyempurnaan ketentuan kelembagaan, termasuk pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK. Upaya ini didukung oleh penyelarasan proses bisnis dan proses kerja berbasis digital. Hal ini ditempuh guna mewujudkan organisasi dengan

proses bisnis yang lebih sederhana, ringkas, dan standar, serta proses kerja yang *agile* dan sejalan dengan kebutuhan di era digital.

1) **Reformasi Regulasi di area Organisasi dan Proses Kerja**

Reformasi regulasi pada area organisasi dan proses kerja merupakan langkah transformatif yang dilakukan untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan efisiensi proses bisnis di Bank Indonesia. Langkah ini ditempuh untuk memastikan organisasi dan proses kerja di Bank Indonesia senantiasa dapat beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. Reformasi regulasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan maupun pelaksanaan tugas pada area organisasi dan proses kerja dapat berjalan secara optimal.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan internal terkait pembentukan peraturan di Bank Indonesia. Implementasi ketentuan ini dilakukan dalam rangka penerapan tata kelola yang baik dan profesional serta sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU PUU), khususnya terkait penguatan aspek teknik penyusunan peraturan melalui metode omnibus, partisipasi masyarakat (*meaningful participation*), serta penyusunan peraturan secara elektronik. Penyusunan ketentuan dimaksud ditujukan untuk (i) memastikan proses pembentukan peraturan di Bank Indonesia berlangsung sesuai tugas dan wewenang Bank Indonesia serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta (ii) menyediakan landasan hukum serta pedoman yang komprehensif dalam pembentukan peraturan di Bank Indonesia.

2) **Penguatan dan Penyempurnaan Organisasi Bank Indonesia**

Penguatan dan penyempurnaan organisasi Bank Indonesia dilakukan selaras dengan strategi organisasi dalam rangka menjalankan mandat UU Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan UU P2SK. Upaya tersebut berbasis strategi (*strategy-driven*), dengan memperhatikan kerangka kerja pada masing-masing area serta memastikan kesinambungan antara struktur organisasi dan proses bisnis. Penguatan organisasi juga mencakup penerapan praktik terbaik (*best practices*) serta

pemanfaatan infrastruktur dan teknologi secara adaptif sesuai kebutuhan. Seluruh inisiatif penguatan dan penyempurnaan organisasi dimaksud dilandasi oleh prinsip 3S, yaitu Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi, yang bertujuan mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia secara efektif, efisien, dan berkepatuhan.

Lebih lanjut, pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia melanjutkan agenda transformasi kelembagaan melalui integrasi transformasi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan respons bauran kebijakan serta mengakselerasi penyelesaian dan penyelarasan inisiatif strategis yang saling terinterkoneksi. Integrasi transformasi juga dilakukan untuk memastikan keselarasan visi, arah kebijakan, serta pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian, dalam rangka mendukung modernisasi dan digitalisasi proses kerja serta mewujudkan transformasi Bank Indonesia secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

3) **Business Process Re-engineering (BPR)**

Sejalan dengan visi organisasi sebagai bank sentral digital terdepan, penyempurnaan *Digital Work Process* – *Decision Making Process* (DWP-DDM) dilakukan secara berkelanjutan sesuai konsepsi *Integrated Digital Central Bank* (IDCB). Penyempurnaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan melalui eliminasi redundansi dan digitalisasi proses dengan tetap mengedepankan tata kelola, serta kolaborasi proses kerja antarsatuan kerja/unit kerja sejalan dengan prinsip *one input, one process*, dan *multi purposes*. Proses dimaksud dilakukan melalui penajaman proses bisnis, evaluasi kebutuhan, pengembangan *platform*, pengujian, uji coba dan sosialisasi internal.

Pada triwulan IV 2025 dilakukan penyempurnaan DWP-DDM berdasarkan evaluasi secara iteratif terhadap proses bisnis perumusan bauran kebijakan pada RDG Bulanan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pengembangan DWP-DDM yang mampu memfasilitasi kolaborasi penyusunan materi pada setiap tahapan pengambilan keputusan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola, termasuk optimalisasi pemanfaatan data dan informasi dari pusat data. Penyempurnaan mencakup berbagai aspek, antara lain peningkatan kapabilitas *straight-through processing*, penguatan pengaturan hak akses yang *prudent* dan bertata kelola, pengembangan fitur *meeting management*

serta integrasi yang lebih *seamless* dengan Microsoft Outlook, serta penyempurnaan ketentuan dan petunjuk teknis pendukung. Ke depan, pengembangan dan implementasi DWP-DDM direncanakan diperluas ke area proses pengambilan keputusan lainnya. Pada area OM Pro-Market, pendalaman kerangka kerja serta pengembangan lanjutan DWP-DDM Pelaksanaan Bauran Kebijakan terus dilakukan dan akan berlanjut pada tahun 2026.

4.3. Transformasi SDM dan Budaya Kerja

Pelaksanaan digital BPR juga didukung oleh penguatan aspek *people* melalui penyempurnaan ketentuan terkait SDM, penguatan kepemimpinan, pengembangan *new capabilities*, serta penguatan *employee value proposition* (EVP). Transformasi SDM dilakukan melalui penerapan sistem kerja unggul di era digital yang didukung oleh fasilitas fisik dan digital untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. Sistem kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja di seluruh lini organisasi. Selain itu, sistem kerja unggul di era digital diharapkan dapat memperkuat EVP Bank Indonesia yang pada akhirnya berdampak positif terhadap upaya memenuhi SDM dengan talenta terbaik dan menciptakan suksesi kepemimpinan yang berkelanjutan.

1) Reformasi Regulasi di Area SDM dan Budaya Kerja

Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan internal dalam rangka penguatan *Employee Value Proposition* (EVP) berdasarkan prinsip kesetaraan antarpegawai, dengan tetap menjaga kondisi keuangan Bank Indonesia. Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal mengenai manfaat pensiun serta menyusun ketentuan mengenai Peraturan Dana Pensiun (PDP) Bank Indonesia termasuk Iuran Pasti (IP). Pengaturan ditujukan untuk memastikan kebijakan manfaat pensiun dapat menjamin kesinambungan penghasilan yang layak bagi pegawai Bank Indonesia setelah memasuki masa pensiun, dengan memperhatikan *Employee Value Proposition* berdasarkan prinsip kesetaraan antarpegawai.

2) Penguatan Strategi Perencanaan SDM

Bank Indonesia terus mendorong SDM yang berkinerja tinggi dan berakhlak mulia guna mewujudkan visi menjadi bank sentral digital terdepan. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia mengoptimalkan strategi pengelolaan SDM yang didukung oleh *Digital Business Process* (DBP). Hal ini diharapkan dapat menghasilkan SDM yang unggul baik dari sisi kompetensi teknis maupun kompetensi

perilaku. Pengelolaan SDM juga diarahkan untuk menciptakan calon pemimpin Bank Indonesia yang profesional, dengan memiliki aspek 3-Smart, yaitu: berkompetensi (*book smart*), berpengalaman (*street smart*), dan berperilaku mulia (*spiritual smart*).

Bank Indonesia terus mendorong optimalisasi strategi pengelolaan SDM yang didukung oleh *Digital Business Process* (DBP) guna memperkuat efektivitas, transparansi, dan ketepatan pengambilan keputusan di bidang kepegawaian. Upaya ini diarahkan untuk menghasilkan SDM unggul, baik dari sisi kompetensi teknis maupun kompetensi perilaku, dalam rangka menyiapkan calon pemimpin Bank Indonesia yang profesional yang memiliki aspek 3-Smart, yaitu: berkompetensi (*book smart*), berpengalaman (*street smart*), dan berperilaku mulia (*spiritual smart*). Sebagai landasan implementasi, Bank Indonesia telah menyusun perencanaan SDM jangka menengah (2025–2030), termasuk strategi pemenuhan dan pengembangan SDM untuk mengakselerasi pencapaian aspek 3-Smart. Dari sisi kuantitas, pemenuhan SDM dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu (i) *build, buy, dan borrow* dari eksternal, (ii) promosi, reposisi, dan rotasi, serta (iii) penugasan internal. Sementara itu, dari sisi kualitas, penguatan dilakukan melalui perencanaan pengembangan kompetensi, antara lain melalui optimalisasi Program Tugas Belajar (PTB) dengan penetapan target jumlah kandidat serta pemilihan program studi yang selaras dengan kebutuhan *current skill* dan *future skill* Bank Indonesia.

3) Penguatan Strategi Pemeliharaan SDM

Bank Indonesia terus memperkuat pemenuhan SDM berkualitas melalui transformasi strategi rekrutmen dan penguatan manajemen karier, di tengah disrupsi inovasi era digital yang memengaruhi pola ketenagakerjaan dan kebutuhan keahlian baru. Upaya ini ditujukan untuk memastikan tersedianya SDM yang adaptif, memiliki kepemimpinan kuat, serta mampu bekerja secara optimal dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai ketentuan pendukung pengelolaan SDM, antara lain Manajemen Karier, Pemenuhan Internal, serta Pengelolaan Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Ketentuan tersebut menjadi landasan penguatan tata kelola SDM yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan strategis organisasi.

Di tengah disrupsi inovasi era digital yang memengaruhi pola ketenagakerjaan dan tuntutan

kompetensi baru, penguatan strategi pemenuhan SDM berkualitas menjadi semakin krusial. Transformasi pada area pemenuhan SDM dilakukan melalui penyempurnaan strategi rekrutmen dan penguatan manajemen karier, guna membentuk pegawai dengan kepemimpinan yang kuat, *agile*, dan mampu bekerja optimal dalam lingkungan digital. Strategi pemenuhan SDM eksternal dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu (i) *build*, melalui rekrutmen Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM); (ii) *buy*, melalui skema *pro-hire* untuk mengisi jabatan dengan kebutuhan kompetensi spesifik; dan (iii) *borrow*, melalui rekrutmen tenaga kerja PKWT untuk kebutuhan sementara atau berbasis proyek, termasuk pemanfaatan Program Magang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam rangka mendukung Asta Cita.

Guna memperkuat budaya pencegahan (*preventive culture*) dan menjamin keberlanjutan kinerja, Bank Indonesia memperluas cakupan program kesehatan preventif dengan melaksanakan program *General Medical Check-Up* (GMCU) 2 tahun sekali bagi seluruh pegawai organik jenjang Asisten sampai dengan Asisten Manajer tanpa batas usia, dan Skrining Periodik setiap 6 bulan bagi pegawai jenjang Asisten sampai dengan Asisten Manajer (tanpa batas usia). Kebijakan ini merefleksikan komitmen Bank Indonesia dalam menjadikan kesehatan pegawai sebagai variabel kunci kesiapan suksesi kepemimpinan. Bank Indonesia senantiasa berkomitmen menempatkan kesehatan pegawai sebagai aset dalam pencapaian visi dan misi lembaga. Pelaksanaan kebijakan ini menjadi bukti nyata kepedulian institusi terhadap keberlangsungan kualitas SDM, sekaligus wujud tanggung jawab dalam menciptakan ekosistem kerja yang berkelanjutan.

Bank Indonesia juga melakukan penugasan pegawai pada berbagai lembaga eksternal, baik di dalam maupun luar negeri, serta pada lembaga afiliasi sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia. Penugasan tersebut dilakukan pada lembaga yang relevan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia. Melalui penugasan ini, pegawai diharapkan memperoleh pengalaman, memperluas jejaring, serta memperkaya wawasan strategis yang mendukung peningkatan kompetensi dan kontribusi bagi organisasi.

4) Pengembangan Kapabilitas Digital SDM Bank Indonesia

Pengembangan kapabilitas digital bagi SDM merupakan bagian penting dari transformasi SDM dan budaya kerja di Bank Indonesia. Kapabilitas ini diperlukan untuk mendukung digitalisasi proses kerja

dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan kapabilitas digital yang kuat, SDM dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas, mendorong efisiensi, dan memperkuat daya saing kelembagaan di era digital.

Bank Indonesia terus menyempurnakan aplikasi HR Apps dalam rangka optimalisasi dan perluasan fitur aplikasi untuk mendukung strategi pengelolaan SDM melalui proses perencanaan, pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan (4P). Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan karier pegawai ke depan. Sebagai *employee experience platform*, HR Apps menyediakan data dan informasi kepegawaian yang terintegrasi, interaktif, serta dapat diakses (*mobile, anytime, anywhere*), sehingga diharapkan dapat meningkatkan *engagement* pegawai. Pada pengembangan Tahap II, dilakukan sejumlah penyempurnaan, antara lain penambahan *personalized content* melalui fitur *Enriched Information*, penguatan *engagement features* berupa layanan terintegrasi untuk memudahkan pegawai seperti *enrollment In-house Training* (IHT) dan *reschedule General Medical Check-Up* (GMCU), serta pemanfaatan AI yang memungkinkan interaksi dua arah untuk memberikan informasi dan rekomendasi yang lebih personal bagi pegawai.

Lebih lanjut, pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia melakukan asesmen terhadap postur program pembelajaran, khususnya terkait integrasi modul kompetensi Program Meningkatkan Kompetensi (PMK) yang diselenggarakan oleh pihak eksternal dengan modul pembelajaran internal Bank Indonesia. Integrasi tersebut ditujukan untuk mendukung pemenuhan kompetensi pegawai secara lebih optimal, efisien, dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Melalui integrasi ini, pegawai yang telah mengikuti PMK atau pelatihan eksternal dengan topik yang sejalan dengan PMK internal Bank Indonesia tidak diwajibkan kembali mengikuti IHT dengan materi yang sama. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber pengembangan kompetensi. Pelaksanaan program pembelajaran tersebut didukung oleh infrastruktur pembelajaran berupa *Learning Management System* (LMS) yang terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan SDM, yaitu HR Apps. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur informasi profil kompetensi pegawai serta rekomendasi *in-house training* yang dapat diikuti untuk menutup *competency gap* masing-masing pegawai.

Program pembelajaran ke depan akan lebih disempurnakan lagi dengan *Competency Development Program* yang bersifat reguler untuk seluruh pegawai, *Executive Central Banking Program* untuk kelompok pegawai potensial, dan *Leadership Program* untuk pegawai yang akan promosi pangkat. Selain itu, sebagai kelanjutan dari integrasi modul kompetensi, ke depan akan dilakukan integrasi modul kompetensi program pembelajaran yang ada di Bank Indonesia dengan modul pembelajaran program tugas belajar pegawai yang mengikuti pendidikan S2 dan S3.

4.4. Transformasi Digital

Transformasi digital Bank Indonesia terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan transformasi kebijakan dan kelembagaan guna tercapainya visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan. Transformasi digital dilakukan melalui perwujudan tiga visi inovasi digital yang meliputi: (i) pengembangan digitalisasi di area sistem pembayaran dan pendalaman pasar uang (*integrated digital payment system and finance*); (ii) pengembangan digitalisasi pendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, serta IDCB (*integrated digital central bank*); dan (iii) peningkatan kapabilitas teknologi dan pengamanan secara *end-to-end* (*integrated digital technology*).

1) Pengembangan *Integrated Digital Payment System and Finance*

Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi di bidang SP serta PUVA. Transformasi di sistem pembayaran dilakukan melalui pengembangan berbagai inisiatif pada *retail payment* maupun *wholesale payment*. Pada triwulan IV 2025, fokus pengembangan mencakup (i) New BI-FAST, yang terdiri dari finalisasi aspek bisnis, layanan, dan teknologi digital untuk meningkatkan performa dan ketahanan sistem; serta (ii) Infrastruktur SP terintegrasi, meliputi *BI-Payment Clear*, *BI-Payment Info*, dan *Data Capturing*.

2) Pengembangan *Integrated Digital Central Bank (IDCB)*

Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan digitalisasi *Decision Making Process (DMP)* dan BPR di area perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya manusia. Pengembangan IDCB juga tengah memanfaatkan data dan AI sebagai katalisator dalam transformasi proses bisnis.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan IDCB melalui sejumlah inisiatif strategis. Pengembangan tersebut antara lain mencakup implementasi digitalisasi *Decision Making*

Process (DMP) dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pada RDG Bulanan, serta digitalisasi pengelolaan aset di Bank Indonesia, khususnya pada pengelolaan aset fisik dan proses pengadaan. Selain itu, beberapa inisiatif digitalisasi proses bisnis masih berada pada tahap konsepsi dan perancangan untuk digitalisasi proses bisnis di area bauran kebijakan kelembagaan, digitalisasi proses bisnis di area kepemimpinan (*human resource*), serta digitalisasi proses bisnis di area pengelolaan aset, baik untuk aset fisik maupun aset teknologi digital.

Bank Indonesia juga terus memperluas pemanfaatan inovasi data berbasis *Artificial Intelligence (AI)* dan *Machine Learning (ML)* pada sektor moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Pengembangan model AI/ML tersebut dilakukan secara kolaboratif oleh engineer, *data scientist*, dan ekonom Bank Indonesia dengan mengacu pada prinsip VITAL (*Visualizing the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning*) guna memastikan integrasi yang optimal dalam proses bisnis. Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia melakukan pengembangan analisis posisi devisa neto (PDN) dan interkoneksi pelaku di pasar uang dan pasar valas. Pengembangan lanjutan model ini turut memperluas portofolio pemanfaatan AI/ML di sektor moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran lainnya yaitu proyeksi indikator utama, antara lain inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar, *yield USD*, arus masuk portofolio, kredit, *non-performing loan*, *interest coverage ratio*, *capital expenditure*, *digital payment*, interkoneksi antarpelaku transaksi, serta transaksi repo, DNDF, dan *swap*.

3) Pengembangan *Integrated Digital Technology*

Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur teknologi digital guna meningkatkan kapabilitas dan kualitas aset teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia. Upaya pengembangan dilakukan melalui adopsi berbagai teknologi terkini, penguatan, serta peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi yang telah tersedia. Pengembangan kapabilitas teknologi juga dilakukan pada area Pusat Data, antara lain melalui digitalisasi pengolahan data (*data factory*), eksperimentasi inovasi data, serta eksplorasi teknologi data dan pengembangan solusi teknologi untuk mendukung pengelolaan Pusat Data yang lebih andal.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia melanjutkan penyusunan konsepsi dan perancangan infrastruktur teknologi, khususnya terkait pemanfaatan *cloud*,

penguatan data center, serta pengembangan sistem *core banking*. Selain itu, Bank Indonesia mendukung area *New Technology* melalui penguatan *Data Center* (DC), *End User Device* (EUD), *software platform*, *integrated security*, infrastruktur *security* dan infrastruktur *cloud*. Di sisi lain, dilakukan pula modernisasi pada sistem manajemen layanan TI

(MLTI), sistem pengelolaan layanan kas, *capturing* transaksi valas dan sistem perizinan Bank Indonesia dalam rangka mendukung *continuity technology*. Upaya tersebut juga disertai dengan kegiatan monitoring terhadap aplikasi dan infrastruktur digital yang telah dikembangkan.





BAB 5

CAPAIAN KINERJA BANK INDONESIA



Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) didukung program transformasi dan respons kebijakan di tengah beratnya tantangan lingkungan strategis global, nasional, dan kelembagaan. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, berbagai upaya penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia. Penerapan kebijakan yang konsisten dan bertata kelola, inovasi yang berkelanjutan, serta eratnya sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang triwulan IV 2025 telah menghasilkan persepsi yang positif dari mitra kerja, termasuk sejumlah pengakuan secara nasional dan internasional.

Pencapaian kinerja Bank Indonesia sepanjang triwulan IV 2025 tecermin pada capaian IKU Bank Indonesia dalam 12 Program Strategis (PS) sebagai berikut:

PS 01 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Perekonomian dunia masih dalam tren melambat akibat dampak penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan ketidakpastian yang masih tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di sebagian besar negara disertai dengan disparitas pertumbuhan antarnegara. Prospek ekonomi dunia yang belum kuat dan menurunnya tekanan inflasi mendorong sebagian bank sentral menempuh kebijakan moneter akomodatif. Dengan masih tingginya ketidakpastian, aliran modal global ke komoditas *safe haven* seperti emas makin meningkat sedangkan aliran modal ke *emerging market* (EM) tertahan dan berfluktuasi. Ke depan, volatilitas pasar keuangan global masih terus berlanjut sehingga perlu diantisipasi dengan penguatan berbagai respons dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter Bank Indonesia tetap diarahkan pada keseimbangan untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-stability and growth*). Sejalan dengan itu, ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk menurunkan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mendorong kredit atau pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

1) Inflasi inti yang rendah dan stabil pada kisaran sasarannya

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan Inflasi IHK Desember 2025 sebesar 2,92% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga rendah sebesar 2,38% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya dan *imported inflation* yang tetap terkendali. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) terjaga rendah sebesar 1,93% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* (VF) masih relatif tinggi sebesar 6,21% (yoy) disumbang terutama oleh komoditas bawang merah seiring pasokan yang terbatas akibat gangguan cuaca dan kenaikan harga benih.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*pro-stability and growth*). Pada triwulan IV 2025, suku bunga BI-Rate dipertahankan di 4,75%, sesuai dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Kebijakan ini juga memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran moneter dan makroprudensial guna menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau potensi penurunan suku bunga BI-Rate, mengingat inflasi 2026 yang diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, disertai dorongan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selama triwulan IV 2025, Bank Indonesia juga memperkuat kerja sama dalam pengendalian inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat/ Daerah (TPIP/TPID) dan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Nasional. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat kolaborasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan program Asta Cita Pemerintah.

2) Terjangkarnya ekspektasi inflasi sesuai dengan target inflasi

Ekspektasi inflasi tetap terkendali didukung oleh konsistensi bauran kebijakan. Hasil survei *Consensus Forecast* (CF) yang dirilis pada Desember 2025 menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi untuk akhir 2026 (*end of period*/EoP) berada di bawah titik tengah kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$, yakni sebesar 2,7% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan hasil survei CF pada November 2025. Selain itu, berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada triwulan IV 2025, responden memprakirakan rata-rata inflasi nasional tahun 2025 sebesar 2,72% (yoy), tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2025 sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Sejalan dengan itu, hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) pada November 2025 menunjukkan bahwa tekanan inflasi tiga bulan yang akan datang, yaitu Februari 2026, diperkirakan meningkat, sementara pada enam bulan yang akan datang, yaitu Mei 2026, diperkirakan menurun. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Februari 2026 yang tercatat sebesar 168,6, lebih tinggi dibandingkan dengan 163,2 pada periode sebelumnya, didorong oleh ekspektasi kenaikan harga menjelang periode Ramadan 1447 H. Sementara itu, IEH Mei 2026 tercatat sebesar 154,5, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 161,7.

Lebih lanjut, Bank Indonesia secara konsisten menetapkan suku bunga kebijakan moneter secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mengarahkan ekspektasi inflasi tetap terkendali sesuai sasaran. Upaya Bank Indonesia dalam mempertahankan suku bunga kebijakan BI-Rate sebesar 4,75% konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026 yang terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, serta perlunya turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

3) Tercapainya suku bunga pasar uang sesuai dengan suku bunga kebijakan yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur

Bank Indonesia mengarahkan suku bunga antara lain melalui penetapan suku bunga kebijakan,

pelaksanaan Operasi Moneter (OM) kontraksi dan ekspansi, serta penguatan proyeksi likuiditas harian. Bank Indonesia telah menurunkan BI-Rate sebesar 150 bps menjadi 4,75%, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022, dan mempertahankan BI-Rate pada Oktober hingga Desember 2025. Seiring dengan penurunan BI-Rate dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia, suku bunga INDONESIA menurun dari 5,28% pada akhir triwulan II 2025 (30 Juni 2025) menjadi 4,13% pada 31 Desember 2025. Suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan juga turun dari masing-masing 6,13%; 6,17%; dan 6,19% pada 25 Juni 2025 menjadi 4,85%; 4,90%; dan 4,92% pada 19 Desember 2025. Perkembangan ini mencerminkan penyesuaian kondisi likuiditas jangka pendek, sementara *stance* kebijakan moneter tetap akomodatif.

Strategi OM *pro-market* terus diperkuat untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, meningkatkan likuiditas, dan memperdalam pasar uang serta pasar valas. Strategi ini disertai dengan (i) pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur, (ii) pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter, dan (iii) pengoptimalan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Optimalisasi SRBI dilakukan melalui asesmen *pricing yield* yang lebih kompetitif, penyempurnaan fitur yang lebih *market-friendly*, serta perluasan basis investor nonresiden. Sejak 17 Mei 2024, mekanisme lelang SRBI dilaksanakan melalui *Primary Dealer* PUVA dengan penguatan implementasi melalui kewajiban transaksi sekunder dan repo. Penguatan strategi OM *pro-market* juga ditempuh melalui penyesuaian struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas, pelaksanaan Repo/PASBI FTO dan repo melalui *agent bank* (AB), serta perluasan peran *Primary Dealer* untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repo antar pelaku pasar.

Hingga triwulan IV 2025, total *outstanding* SRBI tercatat sebesar Rp730,90 triliun, naik Rp21,77 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan strategi menjaga kecukupan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Total volume transaksi SRBI di pasar sekunder pada triwulan IV 2025 mencapai Rp404,38 triliun (55,33% dari *outstanding* akhir tahun). Kepemilikan nonresiden tercatat mencapai Rp114,05 triliun atau 15,60% dari *outstanding* SRBI, atau naik dibandingkan dengan posisi akhir triwulan III 2025 yang sebesar Rp90,82 triliun. Peningkatan kepemilikan nonresiden yang terjadi di triwulan IV 2025 sejalan dengan

upaya Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui penguatan bauran kebijakan stabilisasi, yang mendukung terjaganya kondisi pasar keuangan domestik dan daya tarik SRBI bagi investor nonresiden.

4) **Tercapainya stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental perekonomian**

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali di tengah meningkatnya tekanan eksternal pada triwulan IV 2025 yang dipicu oleh tingginya ketidakpastian global. Pada akhir triwulan IV 2025, nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp16.865 per dolar AS, atau melemah 0,61% (qtoq) dibandingkan dengan posisi akhir triwulan III 2025. Secara year-on-year, Rupiah juga melemah 3,60% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2024. Pelemahan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran keluar modal asing seiring meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor eksternal, antara lain terjadinya government shutdown terpanjang dalam sejarah pemerintahan AS, meningkatnya tensi geopolitik global, termasuk eskalasi konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah, serta berlanjutnya fragmentasi perdagangan global. Dari sisi domestik, sentimen pasar juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap meningkatnya risiko fiskal, sejalan dengan pelebaran defisit APBN dan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang masih tinggi, yang tercermin pada meningkatnya tekanan jual dan penyesuaian portofolio investor pada aset keuangan domestik.

Meskipun demikian, pergerakan Rupiah relatif sejalan dengan mata uang regional dan mitra dagang utama Indonesia, bahkan tercatat lebih kuat dibandingkan dengan sebagian mata uang negara maju di luar dolar AS. Stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia melalui intensifikasi intervensi di pasar valas, baik melalui transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar *offshore*, maupun transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik. Selain itu, Bank Indonesia turut memperkuat operasi moneter valas melalui pelaksanaan lelang operasi moneter valas non-dolar AS dalam mata uang CNY dan JPY, baik dalam instrumen *spot* maupun *swap*, serta perluasan counterparty transaksi NDF *offshore* untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan di pasar global.

Stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung oleh tambahan pasokan valas dari korporasi, termasuk peningkatan konversi valas ke Rupiah oleh eksportir seiring penguatan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui penguatan bauran kebijakan, termasuk strategi *triple intervention* melalui transaksi *spot*, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder, serta optimalisasi seluruh instrumen moneter. Dengan dukungan imbal hasil domestik yang tetap menarik, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik, nilai tukar Rupiah diperkirakan akan tetap stabil dan konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ pada 2026.

5) **Tercapainya kecukupan cadangan devisa yang memenuhi standar internasional dan sesuai target yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur**

Strategi pengelolaan cadangan devisa ditujukan untuk menjaga nilai cadangan devisa (*preserved value*) dan memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter serta pembayaran utang luar negeri Pemerintah dengan tetap mempertimbangkan dinamika pasar keuangan global. Pada triwulan IV 2025, posisi cadangan devisa mencapai USD 156,5 miliar, setara dengan pembiayaan 6,25 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pelaksanaan strategi dimaksud antara lain dilaksanakan melalui penambahan kepemilikan emas dalam komposisi cadangan devisa, sejalan dengan tren kenaikan harga emas pada tahun 2025.

Sejalan dengan hal tersebut, strategi pengelolaan cadangan devisa diperkuat melalui koordinasi yang erat dengan pemerintah, bank sentral, dan lembaga internasional. Pada triwulan IV 2025, telah dilakukan penandatanganan perjanjian dengan Reserve Bank of India dalam rangka kerja sama keuangan internasional, terkait fasilitasi investasi SBN di pasar domestik yang menjadi tambahan sumber cadangan devisa untuk memperkuat kecukupan cadangan devisa.

Selanjutnya, Bank Indonesia tetap aktif dan *agile* dalam menjaga kecukupan cadangan devisa di tengah dinamika pasar keuangan global, serta

memperkuat proses bisnis berbasis digital antara lain melalui pemanfaatan aplikasi digital. Pada triwulan IV tahun 2025, Bank Indonesia telah menyusun *dashboard* terintegrasi mengenai pengelolaan cadangan devisa yang dapat mendukung pengambilan keputusan pengelolaan cadangan devisa dengan lebih optimal.

PS 02 Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan asesmen, rekomendasi, serta koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), di tengah dinamika tingginya ketidakpastian global dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah yang efektif dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah, baik pada level nasional maupun regional. Sinergi tersebut berkontribusi pada inflasi yang terjaga rendah di dalam rentang sasaran inflasi, serta transaksi berjalan yang sehat dan mendukung stabilitas eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sasaran pencapaian *high income country*.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

6) Terjalinnnya koordinasi dengan Pemerintah untuk mendukung pengendalian inflasi

Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Daerah, dan mitra strategis lainnya terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), termasuk melalui penguatan program GNPIP, untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasarannya. Respons kebijakan moneter yang konsisten dengan mandat Bank Indonesia serta sinergi melalui TPIP, TPID, dan GNPIP turut mendukung agar inflasi IHK pada triwulan IV 2025 tetap terjaga dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia bersama Kementerian/Lembaga (K/L) anggota TPIP melanjutkan sinergi dalam sejumlah kegiatan koordinasi TPIP. Kegiatan koordinasi TPIP yang dilakukan antara lain melakukan (i) evaluasi program kerja TPIP 2025 dan koordinasi rencana program kerja TPIP 2026; (ii) pembahasan prospek dan risiko inflasi 2026; serta (iii) koordinasi pengendalian inflasi periode Natal Tahun Baru bersama K/L anggota TPIP tingkat Eselon II K/L. Hasil dari kegiatan koordinasi digunakan sebagai materi untuk persiapan *high-level meeting* (HLM) TPIP 2026 guna mengawal pencapaian sasaran inflasi di tengah berbagai tantangan struktural maupun siklikal ke depan.

Dari sisi upaya pengendalian inflasi daerah, Bank Indonesia bersama anggota Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) TPIP pada triwulan IV 2025 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat-Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakorpusda TPID). Penyelenggaraan Rakorpusda TPID dimaksudkan untuk penyelarasan program pengendalian inflasi antara pusat dan daerah, serta memperkuat dukungan daerah dalam implementasi program prioritas nasional, di antaranya swasembada pangan. Selain itu, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pemberian apresiasi terhadap kinerja TPID (TPID Awards) 2025. Rakorpusda TPID diharapkan juga menjadi sarana kolaborasi, dan mendorong replikasi *success story* upaya pengendalian inflasi di daerah.

Bank Indonesia juga terus melanjutkan koordinasi dan sinergi bauran kebijakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di sektor manufaktur. Dalam rangka mendorong kinerja sektor manufaktur, Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian telah melaksanakan hasil kesepakatan Program Kerja Sama Tahun 2025 sebagai bentuk sinergi untuk memperkuat industri dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, sinergi dilakukan a.l. melalui: (i) penyusunan kajian awal terkait optimalisasi jalur perdagangan dalam rangka mengidentifikasi dan merumuskan strategi peningkatan daya saing industri dalam negeri; (ii) diskusi kebijakan mengenai *debottlenecking* Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mengidentifikasi hambatan kunci yang menahan daya tarik investasi bagi kawasan, serta (iii) kegiatan dan program kerja bersama terkait pengembangan industri a.l. Diskusi kebijakan terkait efektivitas



Peluncuran Indonesia Tourism Outlook 2025/2026 di Jakarta

penyaluran pembiayaan industri padat karya, penyelenggaraan *dedicated team meeting* terkait arah kebijakan perdagangan internasional dan strategi peningkatan peran UMKM dalam ekosistem ekspor dan industri nasional, serta fasilitasi akses pasar bagi pelaku industri halal. Ke depan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja Sama Tahun 2025 antara Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian akan menjadi acuan bagi pelaksanaan Program Kerja Sama Tahun 2026 mengenai optimalisasi strategi kebijakan pengembangan industri prioritas, termasuk penguatan hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Sinergi lintas K/L untuk penguatan sektor jasa, khususnya terkait pariwisata dan konektivitas, juga terus dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam upaya mendorong pengembangan pariwisata sebagai sumber penerimaan devisa *travel* dan penguatan ekonomi kerakyatan, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata, serta Kemenko Perekonomian, terus mengakselerasi pengembangan pariwisata berkualitas (*Quality Tourism*, QT), terutama di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Destinasi Pariwisata Regeneratif. Pada triwulan IV 2025, finalisasi evaluasi dan asesmen penerapan QT di DPP telah dilakukan, termasuk melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I serta pembahasan

bersama seluruh pemerintah daerah yang menjadi lokasi destinasi pariwisata terkait. Evaluasi dan asesmen QT tersebut merupakan kelanjutan dari inisiatif sejak 2022 yang dilakukan bersama Sekretariat Bersama Pariwisata. Hasil evaluasi dan asesmen penerapan QT juga dituangkan dalam Buku Indonesia *Tourism Outlook* yang telah diluncurkan secara simbolis pada 20 November 2025 oleh Menteri Pariwisata, Deputy Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri PPN/Bappenas dalam acara *Wonderful Indonesia Outlook* (WIO) di Kantor Kemenpar. Selain kemajuan pariwisata berkualitas, Buku Indonesia *Tourism Outlook* tersebut juga menjelaskan mengenai lanskap pariwisata domestik dan global, peluang perubahan tren berwisata, serta rekomendasi arah pengembangan pariwisata nasional ke depan untuk mendukung pencapaian Asta Cita.

Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ekosistem logistik, Bank Indonesia juga terus berkoordinasi secara intensif dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, BPS, Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L terkait dalam finalisasi kajian dampak kebijakan penanganan kendaraan lebih dimensi-lebih muatan. Hasil kajian tersebut merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional yang menjadi salah satu basis strategi kebijakan penanganan kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih (*Over Dimension Over Load/ODOL*) dalam Perpres Penguatan Logistik Nasional.

Boks.4: Pengendalian Inflasi Pangan di Sulampua



Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Sulampua Tahun 2025 di Sulawesi Utara

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di Kawasan Timur Indonesia, Pemerintah bersama Bank Indonesia kembali menyalakan semangat kolaborasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025. Mengusung tema penguatan sinergi produksi, efisiensi distribusi, dan digitalisasi, kegiatan ini diselenggarakan secara meriah di Manado pada 27 Oktober 2025. Kegiatan strategis ini menyatukan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari hulu ke hilir, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Pangan, Kementan, Kemendagri, KKP, Kemenhub, para Gubernur se-Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bapanas, Bulog, hingga Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID). GNPIP Sulampua ini sekaligus menjadi penutup dari seluruh rangkaian GNPIP regional pada tahun 2025.

Di tengah pencapaian inflasi nasional yang terkendali pada level 2,65% (yoy) pada September 2025, wilayah Sulampua nyatanya masih dibayangi oleh tekanan inflasi pangan (*volatile food*) yang tinggi. Tingginya inflasi pangan dipicu oleh gangguan pasokan pangan akibat

anomali cuaca dan serangan hama. Lonjakan harga pangan komoditas strategis (beras, cabai, bawang, ikan) tersebut akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya dihabiskan untuk kebutuhan pangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah merumuskan strategi intervensi dengan prinsip “Tiga Tepat” (Tepat Lokasi, Tepat Sasaran, dan Tepat Waktu) melalui optimalisasi Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar. Rapat Koordinasi TPIP-TPID di acara tersebut menghasilkan tiga kesepakatan strategis sebagai berikut:

- i. Penurunan inflasi pangan bergejolak di bawah 5% hingga akhir 2025.
- ii. Penguatan pasokan hortikultura dan perikanan melalui *contract farming*, *smart farming*, dan pengadaan *cold storage* di pelabuhan strategis.
- iii. Efisiensi logistik dan pembiayaan melalui perluasan tol laut, subsidi jembatan udara atau ongkos angkut, serta optimalisasi KUR untuk modernisasi alat nelayan dan penggilingan padi.



Di sisi lain, wilayah yang surplus (seperti Sulawesi) didorong untuk proaktif memenuhi kebutuhan wilayah defisit melalui skema Kerja Sama Antardaerah (KAD). Sebagai langkah analisis ke depan, Bank Indonesia mendorong agar seluruh agenda stabilitas pasokan pangan ini disinergikan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan rantai pasok lokal juga akan terus digenjut dengan mereplikasi kesuksesan kemitraan hulu-hilir berbasis *business-to-business* (B2B), seperti pelibatan Koperasi Wale Tani Mapalus, BUMD, kelompok tani, hingga ritel modern agar dampak pengendalian inflasi lebih nyata di lapangan.

GNPIP Sulampua 2025 memberikan penegasan kuat bahwa tantangan geografis berupa wilayah kepulauan dan pegunungan tidak akan menjadi penghalang jika efisiensi logistik dan kolaborasi antar-lembaga dijalankan dengan konsisten. Melalui komitmen antisipasi risiko cuaca ekstrem dan pemerataan distribusi tersebut, diharapkan disparitas harga antarwilayah dapat terus ditekan. Pada akhirnya, harga pangan akan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, yang sekaligus menjadi pilar penguat bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

7) Terjalannya sinergi kebijakan moneter-fiskal untuk menjaga stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi

Bank Indonesia dan Pemerintah terus melanjutkan sinergi kebijakan moneter dan fiskal, dimana sepanjang 2025 Bank Indonesia menyampaikan 7 rekomendasi pertimbangan kepada Pemerintah untuk menjaga stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia melakukan koordinasi bersama Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), antara lain melalui pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN TA 2026. Dalam beberapa kesempatan, Bank Indonesia telah menyampaikan pandangan terkait asumsi makroekonomi yang digunakan dalam penyusunan target-target Pemerintah di bidang pertumbuhan ekonomi, nilai tukar Rupiah, dan inflasi tahun 2025 dan 2026. Pandangan-pandangan tersebut juga dilengkapi dengan respons bauran kebijakan Bank Indonesia yang terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas.

Sinergi kebijakan moneter-fiskal juga dilakukan melalui Forum Harmonisasi (Forhar) yang merupakan agenda tahunan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Forhar diselenggarakan sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi efektif untuk membahas isu strategis yang memerlukan kesepakatan serta tindak lanjut bersama dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Forhar yang dilaksanakan pada 13-14 November 2025 menyepakati 16 topik strategis yang mencakup berbagai ruang lingkup kebijakan dan layanan. Salah satu pembahasan utama adalah tindak lanjut implementasi UU P2SK, khususnya dalam penguatan ekonomi syariah melalui kajian insentif fiskal bagi produk *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) serta harmonisasi kebijakan pengembangan pasar sekunder SBSN. Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan Pemerintah, Bank Indonesia turut berperan dalam memberikan fungsi *advisory* terkait

rencana penerbitan Global Bond (GB). Sepanjang 2025, Bank Indonesia telah menyampaikan *advisory* terkait penunjukan agen penatausaha dan agen pembayar, termasuk rekomendasi untuk penerbitan Samurai Bond, Dim Sum Bond, dan Kangaroo Bond. Selain itu, *advisory* berupa hasil evaluasi terhadap agen untuk penerbitan Global Bond juga telah diselesaikan pada triwulan IV 2025. Rekomendasi tersebut mendukung kelancaran proses penerbitan GB sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan. Selain itu, pengelolaan Global Bond sejak penerbitan hingga jatuh tempo dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, sekaligus berkontribusi pada penguatan kredibilitas Pemerintah di mata investor melalui kinerja agen yang optimal.

Sinergi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam mewujudkan *Asta Cita*, khususnya terkait penguatan ekonomi kerakyatan. Dukungan tersebut dilakukan melalui pemberian tambahan bunga kepada pemerintah dalam rangka mendukung Program Perumahan Rakyat dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pelaksanaan dukungan dimaksud memiliki dasar hukum yang memadai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, serta ketentuan turunannya dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan ketentuan internal terkait Pengelolaan Kas Pemerintah. Untuk memperkuat implementasinya, Bank Indonesia bersama Kemenkeu menandatangani Keputusan Bersama terkait Tambahan Bunga dan penyusunan mekanisme pelaksanaan KB dalam bentuk PKS, serta telah dilakukan penyesuaian ketentuan internal mengenai pengelolaan kas pemerintah dengan menambahkan klausul terkait pemberian tambahan bunga kepada Pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap Program Ekonomi Kerakyatan dan wujud sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Boks.5: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan IV

Konfrensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan IV 2025 di Jakarta

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisier Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisier Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respons kebijakan yang efektif. KSSK telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK IV tahun 2025 pada Jumat, 31 Oktober 2025. Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain, dalam upaya memastikan agar SSK senantiasa terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

SSK triwulan III tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. Perekonomian dunia masih menghadapi tantangan akibat dampak tarif impor AS yang menyebabkan ketidakpastian tetap tinggi, namun ekspektasi perbaikan ekonomi ke depan mulai menguat. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian sejalan dengan program prioritas pemerintah. Kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan pada keseimbangan untuk menjaga stabilitas serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-stability and growth*).

KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi potensi risiko dari perkembangan ekonomi dan dinamika geopolitik dunia, terutama rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK. KSSK juga telah dan akan terus mendukung sektor riil dan program prioritas Pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi mencapai kemakmuran bangsa.

Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat.

PS 03 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas yang mendukung penciptaan lapangan kerja sejalan dengan Asta Cita serta untuk mempercepat transmisi penurunan suku

bunga perbankan. Bank Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan dan *surveilans* makroprudensial secara *forward-looking* dan inovatif, turut menjaga SSK melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan dengan tetap memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta mendorong inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

8) **Tercapainya pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal dalam kisaran target sesuai dengan prakiraan makroekonomi dan siklus keuangan**

Pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 tercatat sebesar 9,69% (yoy), berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia sebesar 8-11%. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06% (yoy), 4,52% (yoy), dan 6,58% (yoy). Capaian tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) serta realisasi program prioritas Pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga. Sementara dari sisi permintaan, pelaku usaha perlu terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*) yang tercatat masih cukup besar pada Desember 2025, yaitu mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia. Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57% dan DPK yang tumbuh tinggi sebesar 13,83% (yoy) pada Desember 2025. Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan terus membaik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (*lending requirement*) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit pada 2026 pada kisaran 8–12%.

Ketahanan sistem keuangan terjaga baik didukung likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Desember 2025 tercatat tinggi sebesar 25,89%, tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,05% (bruto) dan 0,79% (neto) pada Desember 2025. Hasil *stress test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga.

Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Implementasi penguatan KLM yang berlaku pada 16 Desember 2025 diarahkan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit atau pembiayaan perbankan, melalui peningkatan besaran insentif bagi bank yang lebih

cepat menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Hingga 16 Desember 2025, total insentif KLM mencapai Rp388,1 triliun, masing-masing kelompok bank BUMN sebesar Rp177,1 triliun, BUSN sebesar Rp169,5 triliun, BPD sebesar Rp34,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,0 triliun. Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

Bank Indonesia juga mempertahankan instrumen kebijakan makroprudensial lainnya tetap longgar. Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) tetap dipertahankan sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, rasio *Loan to Value* (LTV)/*Financing to Value* (FTV) paling tinggi sebesar 100% dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah 0, berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026. Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) bank paling tinggi sebesar 35% terhadap modal bank (berlaku efektif sejak 1 Juni 2025), serta Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4% dengan fleksibilitas repo sebesar 4%, dan rasio PLM Syariah sebesar 2,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5% (berlaku efektif sejak 1 Juni 2025).

9) **Terjaganya risiko likuiditas perbankan**

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia turut mendukung terjaganya ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Perbankan terpantau mampu melanjutkan intermediasi dengan tetap menjaga likuiditas. Hal ini tecermin pada indikator rasio AL/DPK yang mencapai 28,57%. Perkembangan tersebut sejalan dengan berlanjutnya akselerasi penyaluran kredit yang disertai penurunan suku bunga perbankan dan aktivitas pasar uang yang diperkuat oleh *stance* kebijakan OM *pro-market*. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas sehingga dapat menopang penyaluran kredit/pembiayaan perbankan secara optimal serta memperkuat sinergi dengan KSSK untuk memitigasi berbagai risiko ekonomi akibat dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan domestik.

Dalam rangka mendukung implementasi Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) guna mencapai stabilitas Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem

keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia melakukan fungsi pengawasan pada bidang makroprudensial, moneter dan *market*, serta sistem pembayaran, yang terintegrasi dan berbasis digital. Pada Triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah menyusun ketentuan pengawasan terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan tersebut. Strategi pengawasan terintegrasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai potensi terjadinya risiko sistemik, dengan mempertimbangkan antara lain dinamika perekonomian global dan domestik, siklus ekonomi dan siklus keuangan, keterkaitan sistem keuangan, serta kerentanan dan sumber gejolak dalam sistem keuangan. Fokus pelaksanaan strategi pengawasan Bank Indonesia berbasis perilaku (*behavior*), risiko (*risk*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap objek pengawasan yaitu pelaku dan infrastruktur pasar keuangan baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan asesmen terhadap objek pengawasan terintegrasi yang ditujukan untuk menilai dan/atau menetapkan prioritas pengawasan, perkembangan eksposur risiko, keterkaitan dan kerentanan dalam sistem keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan standar internasional yang berlaku.

Bank Indonesia melanjutkan pengembangan *suptech analytics* guna semakin memperkuat kapabilitas pengawasan sistem keuangan berbasis data. Selama triwulan IV 2025, pengembangan difokuskan pada penyempurnaan dan perluasan kapabilitas analitik yang telah dibangun sebelumnya. Dalam periode ini, telah dilakukan penyempurnaan *news monitoring* dengan peningkatan kemampuan *filtering* serta *mapping* konten yang lebih komprehensif untuk mendukung deteksi dini risiko dan isu strategis terkait objek pengawasan. Selain itu, Bank Indonesia juga telah melakukan eksplorasi lanjutan *use case contagion analysis* yang bertujuan untuk menganalisis dampak simulasi kegagalan satu bank terhadap bank lain yang memiliki keterkaitan dalam sistem keuangan. Eksplorasi ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi transmisi risiko (*spillover effect*) dan mekanisme penularan yang berdampak pada ketahanan (resiliensi) perbankan. Pengembangan *suptech analytics* dimaksud diharapkan dapat mendukung proses identifikasi risiko sistemik, pemantauan perilaku objek pengawasan, serta penguatan asesmen pengawasan secara terintegrasi.

Bank Indonesia juga semakin memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka

penguatan pengawasan perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kolaborasi dilakukan melalui mekanisme pertukaran informasi dan penyelarasan langkah pengawasan, termasuk dalam forum Komite Kerja Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisiner OJK Kebijakan Makroprudensial-Mikroprudensial (KKD 1) yang membahas isu strategis pengawasan baik pada level pimpinan maupun teknis. Koordinasi mencakup pembahasan kondisi likuiditas perbankan, termasuk pemenuhan kebutuhan likuiditas melalui perizinan utang luar negeri dan pemantauan risiko likuiditas yang berpotensi menimbulkan tekanan pendanaan dan transmisi risiko yang lebih luas, serta pemantauan perilaku dan kepatuhan bank tertentu terhadap ketentuan.

Bank Indonesia dan OJK telah memperkuat fondasi kerja sama melalui penyusunan pedoman teknis pertukaran data yang lebih komprehensif dan terstandar, termasuk pemanfaatan data hasil integrasi pelaporan (ANTASENA) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menyempurnakan tata kelola kerja sama kedua otoritas. Kedua otoritas juga bersinergi secara aktif mendukung proses perizinan *spin-off* Unit Usaha Syariah atas bank yang terdampak oleh perubahan ketentuan terkini, sehingga berhasil mendukung penyelesaian proses *spin-off* dan seluruh aksi korporasi terkait sesuai target. Kerja sama juga dilakukan dengan baik dalam kerangka KSSK, terutama dalam pelaksanaan simulasi krisis 2025 bertema *Weekend Resolution*, yang berjalan dengan lancar. Rangkaian koordinasi tersebut mencerminkan keselarasan fungsi dan tugas antarotoritas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK, serta memperkuat kesiapsiagaan sistem keuangan melalui pengawasan terintegrasi yang berorientasi pada pencegahan risiko dan penanganan permasalahan perbankan secara lebih awal dan lebih efektif. Dengan sinergi yang semakin erat, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sebagai landasan utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

10) Pangsa kredit yang inklusif dan/atau hijau

Bank Indonesia terus mendorong pembiayaan kepada UMKM dalam rangka mendorong inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Bank Indonesia berupaya mendorong optimalisasi kontribusi perbankan melalui penetapan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) di mana hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar 32,04%. Di samping itu, Bank Indonesia juga memberikan insentif KLM kepada bank yang

menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas termasuk UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan. Bank Indonesia juga melakukan asesmen terhadap realisasi RPIM dan faktor-faktor pendukungnya, serta mengevaluasi RPIM secara berkala untuk memantau pencapaian target RPIM perbankan pada 2025 serta memantau implementasi Giro RPIM. Di samping itu, Bank Indonesia selaku penerbit ketentuan RPIM, secara rutin berkoordinasi dengan OJK selaku pengawas mikroprudensial untuk memastikan efektivitas implementasi RPIM, pencapaian realisasi RPIM secara nasional, dan dampak RPIM dalam mendorong pembiayaan inklusif. Peran IKNB, terutama perusahaan pembiayaan dan fintech, turut menjadi katalisator peningkatan RPIM melalui inovasi digitalisasi pembiayaan UMKM. Ke depan, di tengah intermediasi keuangan inklusi yang masih termoderasi, penguatan RPIM akan terus dilakukan untuk dapat mendorong pertumbuhan kredit UMKM dengan tetap memperhatikan kapasitas bank dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di tengah berbagai upaya tersebut, kredit UMKM pada triwulan IV 2025 masih tercatat tumbuh melambat, yaitu sebesar -0,30% (yoy). Dari sisi *supply*, perlambatan kredit UMKM dipengaruhi oleh upaya bank untuk menjaga kualitas kredit di tengah risiko kredit UMKM yang masih tinggi, meski masih di bawah *threshold*. Pembiayaan UMKM oleh Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) juga tumbuh melambat, terutama dipengaruhi perlambatan pada pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan (PP). Dari sisi *demand*, perlambatan pembiayaan UMKM dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat khususnya kelas menengah-bawah.

PS 04 Memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi erat dengan lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan perekonomian di tengah ketidakpastian/gejolak di pasar keuangan global dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi. Bank Indonesia juga melakukan penguatan sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan lembaga anggota KSSK dan otoritas terkait lainnya dalam rangka mendukung ketersediaan likuiditas bagi perbankan serta mendorong pertumbuhan kredit yang seimbang dan berkualitas. Selain itu, sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dilakukan untuk mendorong peningkatan

pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya pencegahan dan penanganan krisis.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

11) Terjalannya sinergi kebijakan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal dalam kisaran target

Bank Indonesia terus bersinergi dengan OJK untuk mendukung intermediasi yang seimbang dan berkualitas melalui harmonisasi kebijakan dan pengaturan. Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi bersama OJK yang menghasilkan 4 (empat) kesepakatan terkait harmonisasi beberapa pengaturan, yaitu *revisit* ketentuan KLM, RPLN, PLM, dan RPIM yang dilakukan melalui rangkaian pertemuan dan/atau pemberian rekomendasi tertulis terhadap ketentuan dimaksud.

Revisit ketentuan KLM melalui penguatan cakupan sektor dan realokasi besaran insentif KLM diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas. Hal ini sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses harmonisasi dilakukan baik melalui forum koordinasi maupun pemberian tanggapan tertulis terhadap rancangan ketentuan, sehingga diperoleh pandangan yang lebih komprehensif dari aspek mikroprudensial sehingga transmisi dan implementasi kebijakan dapat lebih efektif.

Sementara itu, dalam kaitan dengan RPLN, Bank Indonesia telah melakukan sinergi dengan OJK terkait proses harmonisasi ketentuan RPLN yang dilakukan melalui rangkaian forum koordinasi dan penyampaian tanggapan tertulis atas rancangan ketentuan. Kebijakan RPLN diperkuat untuk memperluas sumber pendanaan perbankan, baik Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun non-DPK, serta mendukung manajemen likuiditas guna menopang penyaluran kredit ke sektor riil di dalam negeri.

Sinergi Bank Indonesia bersama OJK juga ditempuh melalui penyampaian tanggapan tertulis mengenai penyempurnaan ketentuan RIM dan PLM. Penguatan kebijakan RIM dan PLM ditujukan untuk meningkatkan

fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan guna mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan, melalui penurunan rasio PLM menjadi 4% untuk BUK dan 2,5% untuk BUS.

12) Terjalinnnya sinergi kebijakan untuk mendukung ketahanan sistem keuangan, termasuk pencegahan dan penanganan krisis

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas otoritas sektor keuangan melalui KSSK. Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia bersama Kemenkeu, OJK, dan LPS melalui KSSK telah melaksanakan rangkaian kegiatan Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025. Rangkaian kegiatan diawali dengan diskusi bersama ekonom perbankan, *focus group discussion* (FGD) bersama *chief economist* lembaga anggota KSSK, dan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat Deputy (*Deputies Meeting*). Pembahasan dalam Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025 mencakup: (i) perkembangan ekonomi dan keuangan terkini, serta status kondisi SSK triwulan III 2025; (ii) *topical issues* antara lain laporan progres penyusunan peraturan pelaksanaan UUP2SK, serta progres evaluasi simulasi krisis tematik 2025 dan simulasi krisis nasional 2024; dan (iii) penetapan Rancangan Keputusan KSSK mengenai kerahasiaan informasi.

Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025 menyepakati status Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan III 2025 dan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga anggota KSSK serta dengan K/L terkait lainnya guna memastikan terjaganya SSK. Rapat KSSK juga menerima laporan (i) evaluasi Simulasi Tematik (Simtik) 2025 dan progres tindak lanjut hasil evaluasi Simulasi Krisis Nasional (Simkrisnas) 2024, (ii) progres penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang P2SK, dan (iii) permohonan penetapan Rancangan Keputusan KSSK mengenai Kerahasiaan Informasi KSSK.

13) Terjalinnnya sinergi kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya keuangan yang inklusif dan hijau

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas K/L dalam rangka kebijakan pengembangan keuangan berkelanjutan. Hingga triwulan IV 2025, telah terdapat 4 (empat) kesepakatan berdasarkan sinergi Bank Indonesia bersama K/L dalam mendorong tercapainya keuangan yang inklusif dan hijau. Bank Indonesia bersama OJK dan Kemenkeu telah menyepakati koordinasi dan sinergi kebijakan dalam inisiatif dan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, mencakup di antaranya pengembangan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Komite Keuangan

Berkelanjutan (KKB), taksonomi berkelanjutan, pengembangan definisi tunggal terhadap kredit berkelanjutan dan platform pelaporan data keuangan berkelanjutan, *tools* penghitungan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui Kalkulator Hijau, serta pelaksanaan dan penguatan *Climate Risk Stress Test* (CRST). Selain itu, Bank Indonesia telah menggelar serangkaian diskusi bersama K/L terkait antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK-IAI), serta akademisi dan *think tanks* untuk membahas berbagai inisiatif kebijakan keuangan berkelanjutan. Pembahasan tersebut mencakup upaya mobilisasi pendanaan berkelanjutan, potensi dukungan BI terhadap pasar karbon, penyusunan taksonomi berkelanjutan, pengembangan *nature-related policy*, serta penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Mekanisme Penetapan Peta Jalan dan Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Manusia Sektor Keuangan, serta pengembangan Indonesia *Climate Scenario* untuk harmonisasi *Climate Scenario* nasional antar K/L yang selaras dengan target iklim nasional (*Second NDC*) serta menjaga tercapainya proses transisi yang berkeadilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keterlibatan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK sebagai anggota *ex officio* dalam DSK-IAI turut berperan penting dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya perumusan kebijakan transisi yang lebih akurat, Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai *co-chair ASEAN Senior Level Committee Task Force on Sustainable Finance* (SLC TF) bersama State Bank of Vietnam periode 2024-2026 akan menjadi *lead* dalam pelaksanaan *forward agenda* SLC TF tahun 2026 yaitu pengembangan “*A Common Ground Scenario for CRST in ASEAN*”. Inisiatif ini menekankan pentingnya pertimbangan *country* dan *regional specificity* dalam asesmen risiko terkait iklim di mana model global yang tersedia saat ini masih berbasis ekonomi negara-negara maju yang tidak sepenuhnya mencerminkan konteks ekonomi kawasan ASEAN. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh bank sentral di ASEAN serta *think tanks* sebagai *technical experts* dalam kontribusi menyusun *A Common Ground Scenario for CRST in ASEAN*.



Peluncuran QRIS Tap In Tap Out pada Pagelaran FEKDI x IFSE 2025 di Jakarta

PS 05 Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Di tengah tingginya ketidakpastian global dan tantangan keamanan siber akibat akselerasi teknologi digital, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan sistem pembayaran untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sejalan dengan program Asta Cita. Bank Indonesia terus melakukan penguatan dan implementasi kebijakan sistem pembayaran dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk dalam pengelolaan uang Rupiah. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai stabilitas sistem pembayaran melalui digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi dan ekosistem EKD, terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal, serta tersedianya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

14) Transaksi sistem pembayaran ritel yang cepat, mudah, murah, berkualitas, dan terpercaya

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia mendorong perkembangan transaksi, jumlah pengguna, dan jumlah *merchant* sistem pembayaran agar terus berakselerasi dan melampaui target. Total pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada

triwulan IV 2025 tercatat sebanyak 59,53 juta, dengan jumlah *merchant* QRIS yang meningkat menjadi 42,75 juta. Akselerasi QRIS juga terlihat dari kenaikan volume transaksi sebesar 139,99% (yoy) dan kenaikan nominal transaksi sebesar 107,22% (yoy) pada triwulan IV 2025, sehingga secara kumulatif volume transaksi QRIS hingga triwulan IV 2025 mencapai 15,51 miliar transaksi.

Untuk mendukung pertumbuhan transaksi pembayaran digital tersebut, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi instrumen dan kanal sistem pembayaran untuk memperluas ekonomi dan keuangan digital, sekaligus memperluas stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Inovasi fitur QRIS terus dilakukan Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) berupa standar nasional QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP), khususnya dalam mendukung layanan publik dan transaksi ritel secara digital. Untuk semakin meningkatkan transaksi pembayaran digital bagi ekonomi kerakyatan, pada 2025 Bank Indonesia juga memberikan insentif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital. Insentif tersebut diwujudkan melalui kebijakan penyesuaian skema harga QRIS untuk *merchant* Badan Layanan Umum (BLU) dan *Public Service Obligation* (PSO), dari sebelumnya sebesar 0,4% menjadi 0%, sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap penyediaan layanan publik oleh Pemerintah kepada masyarakat.

15) Ketersediaan Rupiah untuk mendukung *sovereignty* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Bank Indonesia berkomitmen untuk menjamin ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan kualitas yang

prima di seluruh wilayah NKRI. Sebagai manifestasi upaya tersebut, pada triwulan III 2025, Bank Indonesia terus melaksanakan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan uang Rupiah, salah satunya melalui kegiatan layanan kas. Hal tersebut ditempuh dalam rangka menjaga ketersediaan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Untuk menjamin ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, Bank Indonesia melaksanakan monitoring secara berkala untuk memenuhi kebutuhan perbankan terhadap uang Rupiah. Hasil pemantauan menunjukkan kesesuaian 100% antara jumlah penarikan perbankan melalui aplikasi BI-SILK (Sistem Informasi Layanan Kas Bank Indonesia) dengan jumlah *outflow* yang disalurkan oleh Bank Indonesia.

Selain itu, sebagai wujud komitmen dalam menjaga dan menyediakan Uang Layak Edar (ULE) bagi masyarakat pada tingkat standar kelayakan uang Rupiah (*soil level*), Bank Indonesia meningkatkan kualitas pelaksanaan Survei Tingkat Kelayakan Uang (STKU). Penguatan dilakukan pada metodologi survei, khususnya pada desain kuesioner dan sebaran sampel responden, untuk mengukur kelayakan uang pecahan besar (UPB) dan uang pecahan kecil (UPK). Hasil STKU Semester II 2025, yang dilaksanakan pada Oktober 2025, menunjukkan kualitas uang yang diedarkan oleh Bank Indonesia telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pencapaian nilai 8 untuk UPB dan 6 untuk UPK.

Bank Indonesia bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyediakan layanan kas di wilayah 3T untuk menjaga ketersediaan uang Rupiah kartal yang berkualitas (layak edar) dan terpercaya melalui pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB). ERB merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam menyediakan layanan kas di wilayah 3T. Selain layanan kas, ERB juga dirangkaikan dengan kegiatan kampanye “Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBP)” yang bertujuan mengedukasi masyarakat agar tidak merusak Rupiah dengan melipat, mencoret, menstapler, meremas, atau membasahi uang Rupiah. ERB melayani 18 provinsi dengan 91 pulau 3T yang telah dikunjungi serta melibatkan pejuang Rupiah di seluruh satuan kerja kas Bank Indonesia. Adapun modal kerja yang terserap sebanyak Rp154,4 miliar. Kegiatan tersebut diharapkan dapat ikut menjaga ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) di seluruh wilayah NKRI.

16) Terwujudnya industri jasa sistem pembayaran yang memenuhi standard Kompetensi, Manajemen Risiko dan Infrastruktur Teknologi (KMI)

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia tidak hanya memastikan terpenuhinya standar Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi (KMI) pada industri sistem pembayaran, tetapi juga memperluas dan memperdalam penerapan standar tersebut secara lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Pemenuhan KMI secara konsisten telah menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan, keandalan, dan integritas operasional layanan sistem pembayaran, yang secara nyata memperkuat stabilitas sistem pembayaran nasional dan kepercayaan publik, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari penguatan implementasi standar KMI, Bank Indonesia telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pelaporan *online* Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (SK SP). Sistem ini memungkinkan monitoring pemenuhan kompetensi SDM pelaku industri secara *end-to-end* dan lintas jenjang, mencakup bank dan Lembaga Selain Bank (LSB), mulai dari level pelaksana, penyelia, pejabat eksekutif, hingga anggota direksi yang membawahi kegiatan sistem pembayaran. Langkah tersebut meningkatkan visibilitas risiko kompetensi secara nasional, memperkuat disiplin kepatuhan industri, serta mendorong akselerasi peningkatan kualitas SDM sistem pembayaran di atas standar minimum yang ditetapkan, sehingga memperkuat ketahanan industri secara menyeluruh. Pada triwulan IV tahun 2025, Bank Indonesia menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh Penyelenggara Sistem Pembayaran dalam rangka kesiapan operasional dan keamanan TI menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk memitigasi potensi risiko adanya *fraudster* yang melakukan tindak kejahatan pada periode tersebut.

17) Infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang aman dan andal

Pada triwulan IV 2025, kinerja stabilitas dan ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia terjaga pada tingkat yang sangat tinggi, mencerminkan ketahanan operasional yang tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu merespons dinamika peningkatan volume dan kompleksitas transaksi secara berkelanjutan. Seluruh sistem utama—BI-RTGS, SKNBI, dan BI-FAST—beroperasi secara andal dalam mendukung transaksi nilai besar dan ritel, tanpa gangguan sistemik.

Sebagai bagian dari modernisasi infrastruktur pembayaran ritel yang bersifat *national-driven*, BI-FAST terus diperkuat sebagai sistem *real-time*, beroperasi 24/7, berbiaya rendah, dan semakin resilien terhadap risiko siber. Penguatan keamanan BI-FAST diakselerasi melampaui praktik saat ini, melalui langkah strategis yang terintegrasi pada aspek *people*, *process*, dan *technology*, termasuk eksplorasi awal pemanfaatan *machine learning* (ML) pada *Fraud Detection System* (FDS) guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan deteksi *fraud* secara proaktif.

Selain itu, pada tahun 2025, Bank Indonesia berhasil memperkuat kerangka manajemen risiko infrastruktur nilai besar melalui penerbitan PADG No. 24 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem BI-RTGS. Kebijakan ini tidak hanya mendukung efisiensi dan keamanan setelmen dana seketika, tetapi juga merefleksikan pembaruan kebijakan berbasis evaluasi menyeluruh, mencakup penguatan kewajiban peserta BI-RTGS, rencana implementasi peserta *platform* berbasis *web*, serta penyesuaian terhadap dinamika operasional BI-RTGS yang telah berjalan.

Lebih lanjut, pada 15 November 2025, Bank Indonesia menyelenggarakan *User Group* SP FMI sebagai penguat capaian kelembagaan melalui forum evaluasi, komunikasi kebijakan, dan *knowledge sharing* yang secara aktif melibatkan seluruh peserta. Dengan tema “SP-FMI S.A.T.U: Sinergi, Aman, Tangguh, Unggul”, kegiatan ini melampaui fungsi koordinasi rutin dengan mendorong peningkatan awareness dan kesiapan industri terhadap

tantangan keamanan siber dan risiko *fraud* yang semakin kompleks, sebagai bagian dari penguatan keandalan dan pelancaran SP FMI secara berkelanjutan.

18) Terwujudnya kebijakan dan program perlindungan konsumen nasional

Sampai dengan triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah menyelenggarakan 8 kegiatan edukasi perlindungan konsumen sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen, dengan rerata tingkat pemahaman sebesar 4,97. Salah satu kegiatan besar terkait edukasi Pelindungan Konsumen yang dilakukan bersama dengan K/L yaitu Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK) dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025 bersama Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sekretariat Negara, Bareskrim Polri, Bappebti, Badan Siber dan Sandi Negara, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia, Perhimpunan Bank Nasional, dan Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Pelaksanaan program edukasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemitraan dengan K/L dan industri dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen. Kolaborasi dengan mitra kerja turut ditingkatkan melalui Forum SIGUNA (Diskusi Reguler Pelindungan Konsumen untuk Indonesia) sebagai wadah bagi Bank Indonesia, otoritas terkait, dan penyelenggara untuk berbagi informasi, materi, serta membahas isu-isu perlindungan konsumen beserta mitigasi dan solusinya.



Peluncuran Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK) di Jakarta



Peluncuran program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (KATALIS P2DD) pada Pagelaran FEKDI x IFSE 2025 di Jakarta

PS 06 Memperkuat sinergi kebijakan, pengawasan, dan perlindungan konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Sinergi dalam digitalisasi ekonomi keuangan nasional memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tengah akselerasi teknologi digital dengan sejumlah manfaat dan risikonya. Bank Indonesia terus melakukan penguatan sinergi kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas lain untuk mendorong akselerasi inovasi sistem pembayaran sehingga berjalan seimbang dengan kemampuan ekosistem dalam mengelola risiko dan melindungi konsumen. Perkembangan *fintech* dan *e-commerce* membuka peluang bagi banyak *start-up* dan pelaku non-bank untuk menghadirkan solusi pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien. Oleh karena itu, kolaborasi antara Bank Indonesia, asosiasi, dan industri menjadi kunci untuk mendorong percepatan ekonomi dan keuangan digital (EKD), termasuk dalam rangka pengelolaan uang Rupiah. Selain itu, sinergi juga dilakukan dalam rangka pengawasan ekonomi dan keuangan digital serta penerapan prinsip anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT). Hal ini dilakukan guna mewujudkan (i) efisiensi transaksi dan ekosistem EKD, (ii) terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal, serta (iii) tersedianya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan

keuangan digital sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

19) Terjalinnnya sinergi dalam rangka mendukung percepatan ekonomi dan keuangan digital

Bank Indonesia senantiasa mempercepat digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Dalam kaitan itu, Bank Indonesia melakukan dua kali sinergi dengan berbagai K/L dan pihak terkait pada triwulan IV 2025 yang difokuskan pada penguatan koordinasi lintas K/L. Koordinasi tersebut menghasilkan dua kesepakatan dalam rangka perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah, penguatan literasi dan akseptasi digital melalui program QRIS Jelajah Indonesia, serta perluasan konektivitas pembayaran lintas negara melalui implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang. Ke depan, Bank Indonesia akan memperluas cakupan kerja sama QRIS antarnegara melalui koordinasi intensif dengan Korea Selatan, Arab Saudi, dan India.

Penguatan sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah dilakukan dalam rangka implementasi elektronifikasi di sektor transportasi. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, ASPI, PJP, dan operator moda transportasi dalam melakukan perluasan akseptasi QRIS TAP. Hingga saat ini, 13 provinsi telah mengadopsi QRIS TAP fitur *single tap* di berbagai moda transportasi, seperti DAMRI dan berbagai Trans di daerah. Pasca peluncuran pada 30 Oktober 2025, QRIS TAP fitur *Tap In Tap Out* kini telah diimplementasikan pada lima moda utama di

Jabodetabek, yaitu Kereta Commuter Indonesia (KCI)/ Kereta Rel Listrik (KRL), Transjakarta, *Mass Rapid Transit* (MRT), *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, LRT Jabodebek, dan area parkir.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mendorong perluasan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan antara lain melalui penguatan peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia meluncurkan program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (KATALIS P2DD) sebagai bagian dari rangkaian FEKDI x IFSE 2025. Program ini merupakan langkah

konkret dalam mendorong terciptanya layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. KATALIS P2DD dikembangkan sebagai wadah sinergi lintas daerah sekaligus *knowledge hub* untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah, meningkatkan literasi fiskal masyarakat, memperluas kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Selain itu, Bank Indonesia bersama K/L terkait juga mengumumkan pemenang *Championship* TP2DD kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah. Program ini diharapkan dapat semakin memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah sekaligus mendorong pengembangan ekosistem digital pada pemerintahan daerah.

Boks.6: Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) & Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025



Pembukaan Festival Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 di Jakarta

Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2025 (FEKDI) ke-5 digelar sebagai salah satu *flagship event* Bank Indonesia tahun 2025, berkolaborasi dengan *Indonesia Fintech Summit and Expo* (IFSE) 2025 yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia”, FEKDI x IFSE 2025 berlangsung pada 30 – 31 Oktober dan 1 November 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Kolaborasi strategis ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI),

serta Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH), dan menjadi panggung sinergi kebijakan nasional untuk mempercepat transformasi digital Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Pembukaan FEKDI x IFSE 2025 dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia serta dihadiri oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Momentum ini menegaskan komitmen bersama pemerintah, otoritas, dan industri dalam menjadikan ekonomi dan keuangan digital sebagai *new source of growth* perekonomian nasional. Upaya tersebut akan terus diperkuat melalui pengembangan inovasi yang



Pembukaan Festival Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 di Jakarta

aman, andal, dan berkelanjutan, didukung oleh tata kelola yang kuat, mitigasi risiko yang memadai, serta penguatan perlindungan konsumen.

Transformasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan menjadi salah satu yang tercepat di dunia. Pada triwulan III 2025, volume transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar transaksi atau tumbuh 38,08% (yoy), mencerminkan semakin kuatnya fondasi digitalisasi sistem pembayaran nasional. Pemanfaatan QRIS telah menjangkau hampir 60 juta pengguna, dimana sekitar 93% di antaranya merupakan pelaku UMKM. Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran berkembang secara organik dan inklusif, sekaligus memperkuat peran QRIS sebagai instrumen strategis dalam mendorong perluasan akses ekonomi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, FEKDI x IFSE 2025 menjadi wahana konkret untuk memperkuat sinergi kebijakan dan inovasi industri. Rangkaian kegiatan meliputi *High Level Talk*, *Leaders Talk*, *casual talk*, seminar, peluncuran inovasi digital, pameran teknologi, hingga *networking session*. Pada momentum ini diluncurkan berbagai inisiatif strategis, antara lain QRIS TAP dengan fitur *Tap In-Tap Out* pada lima moda transportasi dan sarana parkir, serta inisiasi *sandbox* QRIS Antarnegara Indonesia–Korea Selatan sebagai langkah penguatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

Pada hari kedua FEKDI x IFSE 2025 diluncurkan program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (KATALIS P2DD) sebagai langkah konkret dalam mendorong layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. KATALIS P2DD dikembangkan sebagai wadah sinergi lintas daerah sekaligus *knowledge hub* untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah, meningkatkan literasi fiskal masyarakat, memperluas kanal pembayaran digital

untuk pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Pada hari ketiga, FEKDI x IFSE 2025 mengangkat tema *Frugal Digital Innovation*, yaitu inovasi yang tepat guna, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa inovasi merupakan salah satu pilar utama Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, antara lain melalui pengembangan Digital Innovation Center sebagai ruang kolaborasi antara regulator, pemerintah, akademisi, dan industri. Selain itu, kompetisi QRIS Jelajah Budaya Indonesia (QJI) 2025 dan BI-OJK Hackathon 2025 dalam rangkaian FEKDI x IFSE 2025 turut menunjukkan tingginya antusiasme generasi muda dan inovator nasional dalam mendukung transformasi digital. Peningkatan jumlah peserta dan proposal inovasi mencerminkan berkembangnya talenta digital domestik yang siap berkontribusi dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional.

Secara keseluruhan, pelaksanaan FEKDI x IFSE 2025 menegaskan pentingnya pendekatan *whole-of-nation* dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Sinergi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kementerian koordinator, kementerian teknis, asosiasi industri, serta pelaku usaha menjadi fondasi utama dalam mempercepat transformasi digital nasional.

Ke depan, kolaborasi yang semakin erat dan konsisten diharapkan mampu memperkuat fondasi sistem pembayaran dan sektor keuangan digital sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian nasional. Dengan dukungan inovasi yang relevan dan penguatan talenta digital domestik, ekonomi dan keuangan digital Indonesia diyakini akan semakin berdaya saing global serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

20) **Terjalinnya sinergi dalam rangka mendukung Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)**

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah di bidang PUR sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melaksanakan tiga kegiatan koordinasi yang menghasilkan tiga kesepakatan dalam rangka penguatan pelaksanaan PUR. Salah satu bentuk koordinasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Mata Uang Rupiah (FOMARU) bersama Kementerian Keuangan pada 4 November 2025. Dalam forum tersebut dipaparkan rencana pengeluaran pemerintah pada akhir tahun 2025 yang berimplikasi pada kebutuhan uang kartal, serta perkembangan terkini perekonomian dan digitalisasi ekonomi yang turut memengaruhi kebutuhan uang kartal di masyarakat. Sebagai tindak lanjut forum dimaksud, serta dalam rangka meningkatkan akurasi penyusunan Estimasi Kebutuhan Uang (EKU), akan dilakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah, khususnya untuk memperoleh data penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan industri melalui penyelenggaraan Forum Industri PUR bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Rupiah (APJATIN) pada 21 November 2025. Forum ini membahas rencana kebijakan pengembangan Penyedia Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) ke depan, terutama terkait penguatan model bisnis dan pengembangan industri PUR yang berkelanjutan, termasuk kemitraan layanan kas dan PJPUR sebagaimana tercantum dalam Blueprint Pengelolaan Uang Rupiah 2024–2030 (BPPUR). Secara umum, baik Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan (FKDOP) maupun PJPUR mendukung arah kebijakan pengembangan tersebut dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan di era digital.

Selanjutnya, pemberantasan uang rupiah palsu tetap menjadi perhatian penting Bank Indonesia bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan K/L terkait yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal). Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu, rapat koordinasi telah diselenggarakan secara berkala dengan melibatkan seluruh unsur Botasupal, yaitu Badan Intelijen Negara, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Keuangan.

Untuk itu, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Botasupal Semester II Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Workshop Pemberantasan Uang Rupiah Palsu di Solo pada 12–13 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh unsur Botasupal dari wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali. Dalam Rakor tersebut disampaikan bahwa perkembangan peredaran Rupiah palsu berada dalam kondisi aman dan terkendali. Seluruh unsur Botasupal sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan uang Rupiah palsu, termasuk melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri keaslian uang Rupiah guna meningkatkan kewaspadaan serta mencegah peredaran uang palsu.

21) **Terjalinnya sinergi terkait penerapan prinsip Anti Pencurian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dan pengawasan Sistem Pembayaran (SP)**

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia terus berkolaborasi dengan otoritas terkait dalam penerapan prinsip APU/PPT, termasuk koordinasi intensif dalam pengawasan sistem pembayaran. Sampai dengan triwulan IV 2025, sinergi antarlembaga diwujudkan melalui empat kegiatan koordinasi yang mencakup (i) 2 kali koordinasi dengan OJK terkait pengawasan terhadap PSP Bank dan implementasi prinsip APU/PPT, serta (ii) 2 kali koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pelaksanaan *joint audit* terhadap PSP Lembaga Selain Bank. Rangkaian koordinasi tersebut menghasilkan empat kesepakatan tindak lanjut. Bank Indonesia dan OJK menyepakati dilakukannya pengawasan langsung terhadap PSP Bank serta pemantauan penyelesaian kasus yang terkait dengan sistem pembayaran pada industri pasar modal sesuai kewenangan masing-masing. Sementara itu, bersama PPATK dihasilkan kesepakatan untuk melaksanakan *joint audit* terhadap PSP Lembaga Selain Bank serta memantau penyelesaian kasus di industri perbankan yang merupakan hasil sinergi pengawasan dengan OJK dan PPATK.

22) **Terjalinnya sinergi terkait Pelindungan Konsumen**

Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan K/L terkait dalam rangka memperkuat implementasi pelindungan konsumen. Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Komunikasi

dan Digital (Komdigi), Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menghasilkan empat kesepakatan tindak lanjut terkait penguatan perlindungan konsumen.

Dalam rangka peningkatan literasi dan edukasi, Bank Indonesia bersama KP2MI menyelenggarakan kegiatan edukasi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kupang pada 1 Oktober 2025. Dalam kegiatan edukasi tersebut, PMI dibekali prinsip PeKA Bertransaksi (Peduli, Kenali, Adukan) yaitu: (i) Peduli terhadap manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen; (ii) Kenali modus penipuan dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi; (iii) Adukan setiap kendala atau penipuan ke kanal pengaduan resmi. Bank Indonesia juga bersama OJK memberikan edukasi kepada PMI guna meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan keberdayaan konsumen agar tidak hanya memahami, tetapi juga mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kemendag dalam memberikan edukasi “Konsumen Cerdas PeKA Bertransaksi” kepada masyarakat melalui ruang CERDAS (Cakrawala Edukasi dan Ruang Diskusi Aman untuk Semua Konsumen Indonesia) pada 13–14 November 2025. Sejalan dengan koordinasi tersebut, Bank Indonesia juga menyusun *quick win* bersama Komdigi, khususnya terkait penguatan perlindungan konsumen dan strategi edukasi dalam upaya pemberantasan judi online.

PS 07 Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi

Bank Indonesia terus memperkuat strategi OM *pro-market* guna menarik aliran masuk portofolio asing sekaligus mendorong pendalaman PUVA di tengah ketidakpastian ekonomi global dan masih tingginya *yield* UST. Bank Indonesia juga terus melakukan pengembangan dan pendalaman PUVA yang modern, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas sebagai dasar untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur, mengawasi, dan mengembangkan PUVA untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan

dan pembiayaan ekonomi sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

23) Terlaksananya pengembangan produk dan harga untuk mendukung likuiditas di pasar sekunder

Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan produk dan harga melalui reformasi pengaturan, penguatan sinergi dan koordinasi, serta sosialisasi. Reformasi pengaturan PUVA diiringi dengan upaya Bank Indonesia untuk terus mengoptimalkan pengembangan berbagai instrumen moneter *pro-market*. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Pengembangan pasar uang dan pasar valas terus dilanjutkan dengan fokus pada aspek *product*, *pricing*, pelaku, dan infrastruktur (3P+1I) dalam rangka mewujudkan pasar uang Rupiah dan valas yang modern, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas melalui pengembangan instrumen-instrumen sebagai berikut:

a) Pengembangan Instrumen Repo

Pada triwulan IV 2025, volume transaksi repo tercatat mengalami peningkatan secara marjinal dibandingkan triwulan sebelumnya. Rata-Rata Harian (RRH) transaksi repo triwulan IV 2025 mencapai Rp20,57 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp20,55 triliun. Lebih lanjut, RRH *outstanding* repo triwulan IV 2025 sebesar Rp80,8 triliun atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan III 2025 sebesar Rp87,0 triliun. Volume transaksi repo relatif tetap stabil di tengah kondisi likuiditas pasar yang cukup *ample* di akhir tahun.

Sebagian besar *underlying* transaksi repo pada triwulan IV 2025 menggunakan SBN sebesar Rp13,9 triliun atau 67,6% dan diikuti dengan menggunakan SRBI sebesar Rp6,7 triliun atau 32,4% dari total transaksi repo pada triwulan IV 2025. Efisiensi pembentukan harga repo semakin meningkat pasca implementasi *Dealer Utama* (DU) PUVA secara bertahap sejak Mei 2024, tecermin dari penyempitan *spread* kuotasi *bid-ask* di berbagai tenor. Berdasarkan pengamatan pada *platform market operator*, *spread* kuotasi *bid-ask* untuk tenor *overnight* (O/N) cukup konsisten berada di kisaran 5 bps, tenor 1 minggu di kisaran 10 bps, dan tenor 1 bulan di kisaran 20 bps. Pada triwulan IV, harga repo tenor O/N relatif masih lebih tinggi dibandingkan harga PUAB O/N.

Kebijakan Bank Indonesia mengimplementasikan *Dealer Utama (DU) PUVA* juga mendorong peningkatan transaksi repo pada tenor 2 minggu s.d. 1 bulan dan memperkuat likuiditas transaksi SRBI dengan sisa jangka waktu jatuh tempo 3 bulan. Hal ini mendukung peningkatan efisiensi pembentukan harga dan kurva imbal hasil repo tenor 1 minggu s.d. 1 bulan serta SRBI tenor 3 bulan s.d. 12 bulan, sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi pelaku pasar melakukan *price discovery*. Bank Indonesia juga telah berkoordinasi dengan DU PUVA dalam rangka penguatan likuiditas untuk repo dan SRBI di tenor tersebut guna membentuk kurva pasar uang (*money market curve*).

b) **Pengembangan Instrumen *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)***

Bank Indonesia terus mengembangkan DNDF sebagai salah satu instrumen lindung nilai (*hedging*) di pasar valuta asing dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar sejalan dengan arah strategi pengembangan PUVA pada BPPU 2030. Pengembangan DNDF diarahkan untuk diintegrasikan dengan strategi pengelolaan moneter dan pengembangan PUVA melalui implementasi DU. Implementasi DU PUVA untuk DNDF dilakukan secara bertahap dari tahap inisiasi/*piloting*, dilanjutkan tahap pengembangan, dan pendalaman. Selanjutnya, tahap pengembangan dan pendalaman akan mempertimbangkan kondisi pasar, volatilitas nilai tukar, serta kesiapan pelaku pasar dan infrastruktur pendukung.

Pada triwulan IV 2025, perkembangan rata-rata harian (RRH) transaksi DNDF tercatat sebesar USD346 juta, sedikit meningkat dibandingkan RRH triwulan III 2025 sebesar USD337 juta. Peningkatan transaksi DNDF didorong oleh transaksi lindung nilai valuta asing untuk portofolio asing. Pada periode triwulan III 2025, tepatnya 1 September 2025, telah berlaku penerapan *margin* untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP atau dikenal dengan kebijakan *Non Centrally Cleared Derivatives (NCCD)*. Pengaturan NCCD ini utamanya berlaku untuk transaksi DNDF antarbank yang tidak dikliringkan melalui CCP sehingga pada awal implementasi masih memerlukan adaptasi perbankan. Dalam rangka mendukung kelancaran implementasi kebijakan NCCD, Bank Indonesia telah melaksanakan serangkaian langkah koordinatif dan pendalaman

kebijakan bersama otoritas terkait. Upaya tersebut dilakukan melalui diskusi pengaturan *Transfer of Title* dalam UU P2SK pada 13 November 2025, serta penyelenggaraan BI-APUVINDO-ISDA *Trilateral Meeting* pada 18 November 2025 guna memperkuat keselarasan pemahaman dan kesiapan kontraktual penerapan margin. Selanjutnya, Bank Indonesia juga melaksanakan sosialisasi terkait Lindung Nilai (*hedging*) di Makasar pada 4 Desember 2025. Selain itu, Bank Indonesia telah melakukan tindak lanjut atas permohonan konsultasi atas perubahan *Rule Book CCP PUVA*, khususnya terkait ketentuan penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* pada Desember 2025.

c) **Reformasi Suku Bunga Rupiah**

Bank Indonesia senantiasa berupaya memastikan kelancaran proses transisi reformasi suku bunga rupiah di pasar domestik sekaligus memastikan ketersediaan referensi harga PUVA untuk pelaku pasar. Reformasi referensi suku bunga rupiah dilakukan melalui proses transisi *Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)* yang dibentuk dari kuotasi panel bank, yang secara bertahap digantikan dengan referensi suku bunga rupiah yang dihitung berdasarkan transaksi aktual atau Indonesia *Overnight Index Average (INDONIA)*. Bank Indonesia selaku administrator JIBOR telah mengumumkan penghentian secara permanen publikasi JIBOR yang akan efektif pada tanggal 1 Januari 2026.

Penetapan tanggal penghentian publikasi JIBOR tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian bagi pelaku pasar terkait INDONIA. Sinergi dan koordinasi dengan otoritas dan pelaku pasar melalui *National Working Group of Benchmark Reform (NWGBR)* juga senantiasa dilakukan untuk memastikan kelancaran proses transisi JIBOR ke INDONIA dan mendukung tindak lanjut pengembangan INDONIA-based market. Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan referensi harga di PUVA, termasuk INDONIA, yang berisi informasi data yang akurat dan kredibel sebagai acuan bagi pelaku pasar.

Bank Indonesia telah mempersiapkan berbagai inisiatif dalam menghadapi transisi penghentian JIBOR dan mengakselerasi pembentukan *term structure* suku bunga referensi berbasis transaksi *Overnight Index Swap (OIS)* di tenor

1 bulan s.d. 12 bulan. Hal ini dilakukan untuk mendorong perluasan *counterparty line* dan mendukung proses *price discovery* di pasar OIS. Pada tanggal 26 September 2025, Bank Indonesia telah melaksanakan *High Level Event* Penandatanganan Perjanjian Induk Bersama untuk Kontrak Derivatif. Kegiatan ini dihadiri oleh Bank Indonesia serta perbankan dan disambut antusias oleh pelaku pasar karena dapat mendorong perluasan *counterparty line* untuk transaksi derivatif, termasuk OIS. Kegiatan tersebut menghasilkan capaian konkret berupa 105 kontrak perjanjian induk derivatif baru dan 27 komitmen kontrak penerapan margin, dengan partisipasi aktif dari 56 bank.

Transisi penuh dari JIBOR menuju INDONESIA diharapkan dapat menjadi *milestone* dalam proses penguatan suku bunga domestik. Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat kesiapan pelaku pasar, pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia menyelenggarakan sosialisasi secara luas kepada pelaku pasar dari industri keuangan dan korporasi selaku pihak debitur pengguna JIBOR. Ke depan, Bank Indonesia bersama *National Working Group on Benchmark Reform* (NWGBR) akan terus mengampanyekan secara luas adopsi INDONESIA sebagai suku bunga acuan Rupiah pada berbagai kontrak keuangan, termasuk memperkuat kompetensi serta kesiapan teknis maupun infrastruktur pelaku pasar.

d) Pengembangan Pelaku PUVA

Selaras dengan arah kebijakan BPPU 2030, Bank Indonesia terus memperkuat kualitas pelaku PUVA. Penguatan dilakukan agar pelaku PUVA semakin terkonsolidasi, berintegritas, dan kompeten dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter dan pendalaman pasar keuangan. Peningkatan kapasitas pelaku dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan kompetensi, integritas, dan kepatuhan kelembagaan. Dalam aspek kompetensi, kerja sama Bank Indonesia dengan *Association Cambiste Internationale Financial Market Association* (ACI FMA) Indonesia dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) diwujudkan melalui penyelenggaraan uji sertifikasi tresuri, *refreshment*, dan pendidikan berkelanjutan bagi tresuri *dealer*, yang menjadi instrumen dalam menjaga standar kompetensi dan profesionalisme pelaku pasar. Pada triwulan IV 2025, uji sertifikasi tresuri diikuti oleh 284 peserta dari seluruh jenjang sertifikasi yang

ditetapkan. Dari sisi integritas dan kepatuhan, Bank Indonesia memastikan seluruh Tresuri *Dealer* bank dan perusahaan pialang terdaftar di Bank Indonesia sesuai amanat UU P2SK dan PBI No.6 Tahun 2024 tentang PUVA. Hingga Desember 2025, tercatat 99,7% atau sebanyak 1.926 Tresuri *Dealer* telah terdaftar di Bank Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen industri terhadap penerapan tata kelola pasar yang kredibel, transparan, dan sejalan dengan praktik terbaik internasional.

Dalam rangka memperkuat kerangka kompetensi pelaku PUVA, Bank Indonesia memfasilitasi kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Tresuri PUVA. Kaji ulang SKKNI bidang Tresuri PUVA bertujuan memperbarui standar minimum kompetensi yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan sertifikasi tresuri. Hal ini dilakukan agar tresuri *Dealer* mampu memiliki kapabilitas teknis, integritas, dan profesionalisme di tengah dinamika pasar keuangan yang semakin kompleks.

Sebagai tahap selanjutnya dari *Kick-off Kaji Ulang SKKNI Bidang Tresuri PUVA* yang telah dilaksanakan pada 26 September 2025, pada triwulan IV 2025 telah diselesaikan seluruh rangkaian kaji ulang SKKNI bidang Tresuri PUVA. Tahapan kaji ulang yang telah dilaksanakan, yaitu: i) Perumusan rancangan SKKNI yang dilaksanakan oleh Tim Perumus (Oktober 2025), ii) Verifikasi Internal oleh Tim Verifikasi (15 November 2025), iii) Pra-Konvensi Rancangan SKKNI (27-28 November 2025), iv) Verifikasi Eksternal oleh Tim Verifikasi Eksternal dari Kementerian Ketenagakerjaan (8 Desember 2025), dan v) Konvensi Nasional SKKNI (15 Desember 2025). Pada Konvensi Nasional, telah disepakati 25 (dua puluh lima) Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI bidang Tresuri PUVA yang mencakup 3 (tiga) fungsi kunci yaitu mengelola aset dan liabilitas, mengelola transaksi tresuri, dan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui manajemen risiko dan kode etik. Pada akhir Desember 2025, Rancangan SKKNI hasil Konvensi Nasional telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditetapkan sebagai SKKNI bidang Tresuri PUVA.

e) Pengembangan Derivatif PUVA

UU P2SK mengamanatkan pengalihan tugas pengaturan serta pengawasan derivatif Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Derivatif

PUVA) dari Bappebti ke Bank Indonesia. Dengan peralihan ini, seluruh pengaturan dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk transaksi derivatifnya diharapkan dapat berjalan lebih harmonis dengan kebijakan stabilitas nilai tukar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sebagai langkah awal dari peralihan, Bank Indonesia memperkuat koordinasi antarlembaga melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dan Bappebti pada 10 Januari 2025. NK ini menjadi landasan formal bagi Bank Indonesia dan Bappebti untuk memastikan proses peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA dari Bappebti ke Bank Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

Sebagai langkah persiapan pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA, Bank Indonesia menyusun *Roadmap Pengembangan Derivatif PUVA*. Pedoman tersebut disusun sebagai panduan strategis sehingga pengembangan Derivatif PUVA dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur. Penyusunan *roadmap* ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berjalan selaras dengan arah BPPU 2030. Melalui keselarasan ini, diharapkan tercipta ekosistem PUVA yang lebih likuid, efisien, dan memiliki daya saing tinggi guna mendukung stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Sebagai hasil nyata dari seluruh rangkaian persiapan dan *roadmap* tersebut, Bank Indonesia menerbitkan PADG Derivatif PUVA pada November 2025 yang menjadi landasan regulasi komprehensif bagi penguatan ekosistem pasar. Peraturan ini mengatur secara *end-to-end* terkait Derivatif PUVA dari aspek 3P+I yaitu produk, *pricing* (harga), pelaku, dan infrastruktur. Selain itu, peraturan tersebut juga mencakup perizinan, pengawasan, pelaporan, dan perlindungan konsumen. Melalui kerangka hukum yang solid tersebut, diharapkan implementasi pengaturan Derivatif PUVA konsisten dan terintegrasi dengan kebijakan pasar uang dan pasar valas Bank Indonesia, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku pasar dalam mengelola risiko melalui transaksi Derivatif PUVA. Selain hal tersebut, dalam rangka pengembangan pelaku PUVA syariah, Bank Indonesia telah mengembangkan profesi penunjang baru berupa Ahli Syariah Pasar

Uang (ASPU) dengan menerbitkan PADG Nomor 25 Tahun 2025 tentang Ahli Pasar Uang Syariah.

f) **Pengembangan Produk PUVA berdasarkan prinsip syariah**

Bank Indonesia terus mengembangkan produk PUVA syariah yang *pro-market* untuk mendukung manajemen likuiditas, mendorong peningkatan pembiayaan syariah, serta memperdalam pasar keuangan syariah. Bank Indonesia telah melakukan pengembangan instrumen Operasi Moneter Syariah (OMS) Rupiah antara lain berupa perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SukBI) pada Oktober 2025 berupa perluasan jenis investor dari sebelumnya hanya bank menjadi nonbank dan nonresiden di pasar sekunder. Untuk mendukung transaksi pasar sekunder SukBI, Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk penerbitan kode ISIN SukBI serta telah menetapkan PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) sebagai penyedia harga pasar wajar SukBI. Upaya untuk meningkatkan likuiditas dan utilitas SukBI serta SBSN di pasar sekunder juga dilakukan dengan mendorong transaksi keuangan yang dilakukan antarlembaga jasa keuangan syariah, lembaga jasa keuangan syariah dengan lembaga jasa keuangan konvensional melalui skema repo syariah dan/atau transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA), maupun transaksi antarlembaga jasa keuangan konvensional melalui skema repo konvensional.

Upaya dalam mengakselerasi pengembangan PUVA syariah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pembentukan Kelompok Kerja (KK) PUVA Syariah yang beranggotakan otoritas dan pelaku industri. KK PUVA Syariah menghasilkan output dan *deliverables* berupa kajian, pedoman, dan rekomendasi untuk pengembangan produk dan *pricing* PUVA Syariah, dengan fokus pada (i) repo syariah; (ii) inovasi produk PUVA Syariah; (iii) evaluasi lindung nilai syariah; dan (iv) pengembangan *reference rate* syariah. Penyusunan kajian dan rekomendasi ini melibatkan otoritas serta industri, sehingga pengembangan produk dapat selaras dengan kebutuhan industri. Terkait produk pasar valas syariah, KK PUVA Syariah telah melakukan kajian awal mengenai produk *Islamic Profit Rate Swap* (IPRS) dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) Syariah.



Peluncuran Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2025 di Bali

Dalam kaitan KK PUVA Syariah, Bank Indonesia juga melanjutkan penyusunan *handbook* transaksi SIPA, repo syariah, lindung nilai syariah, dan SBK syariah yang mencakup antara lain panduan terkait mekanisme, pencatatan, dan pelaporan transaksi untuk mendorong peningkatan transaksi *secured* di pasar uang syariah serta pemanfaatan produk PUVA syariah yang belum aktif. Melalui berbagai pengembangan PUVA Syariah tersebut, pada triwulan IV 2025, rata-rata harian volume pasar uang syariah tercatat sebesar Rp 4,52 triliun.

24) Sinergi Bank Indonesia dengan otoritas terkait dalam pelaksanaan kewenangan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan infrastruktur pasar keuangan. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi erat bersama otoritas terkait, K/L, industri, dan asosiasi dalam mendukung pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko pasar keuangan. Koordinasi diarahkan untuk mengakselerasi pengembangan PUVA, termasuk PUVA Syariah (PUVAS).

Terkait aspek pengawasan *market*, Bank Indonesia secara konsisten berkoordinasi dan bekerja sama dengan otoritas terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan Bank Indonesia. Koordinasi antarotoritas sektor keuangan tersebut dilakukan melalui berbagai forum, seperti Komite Anggota

Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisiner OJK (KKD), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta forum koordinasi lainnya. Pada triwulan IV 2025, pengawasan Bank Indonesia dilaksanakan pada penyelenggara PUVA melalui pemeriksaan terhadap bank *Dealer Utama* dan *Central Counterparty* di Indonesia dalam rangka pemenuhan *Principles for Financial Market Infrastructure* (PFMI). Sementara itu, dengan peningkatan insiden siber dan kompleksitas ancaman terhadap sistem informasi teknologi, Bank Indonesia senantiasa melakukan penguatan pengawasan berbasis risiko termasuk penerapan kebijakan pelaporan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS).

Terkait aspek edukasi, Bank Indonesia, Kemenkeu, OJK, dan LPS, berkolaborasi dalam penyelenggaraan program “Literasi Keuangan Indonesia Terdepan” (LIKE IT). Pada tahun 2025, keempat otoritas sektor keuangan telah menggelar LIKE IT di beberapa kota untuk memastikan pemerataan literasi keuangan, mengingat adanya kesenjangan pemahaman dan akses keuangan antardaerah. Selain itu, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk memperluas basis investor retail dan meningkatkan sinergi antar otoritas sektor keuangan. Adapun LIKE IT tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali di kota Jakarta, Banda Aceh, Manado, Pontianak, Gorontalo, Solo, dan Denpasar.

Bank Indonesia juga senantiasa memperkuat sinergi dan koordinasi Bank Indonesia dengan APUVINDO dalam pengembangan PUVA. Pada 3 November 2025

telah dilaksanakan pertemuan *High Level Meeting* (HLM) yang dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua APUVINDO beserta Badan Pengurus Inti APUVINDO, pimpinan tiga puluh lima bank pendiri APUVINDO, dan asosiasi. Pertemuan ini membahas secara *high level* mengenai perkembangan repo, perluasan *underlying* repo OM, serta penguatan suku bunga referensi Rupiah melalui BI-FRN dan *matchmaking* OIS.

Sejalan dengan upaya penguatan kualitas, integritas, dan tata kelola PUVA tersebut, sinergi antar-otoritas sektor keuangan dan pemerintah juga diarahkan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan amanat UU P2SK yang mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA dari Bappebti ke Bank Indonesia. Selama tahun 2025, sinergi antara Bank Indonesia, OJK, dan Bappebti terus diperkuat untuk mencapai peralihan yang lancar tanpa menimbulkan gejolak yang berarti di pasar Derivatif PUVA. Sinergi tersebut diwujudkan melalui koordinasi intensif dalam penyelarasan kerangka regulasi, penyiapan mekanisme perizinan dan pelaporan, pengelolaan masa transisi, serta penanganan isu lintas kewenangan (*cross-cutting issues*) guna memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas, kepastian hukum bagi pelaku pasar, dan terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA telah diterbitkan PADG Derivatif PUVA pada tanggal 28 November 2025. Bank Indonesia melaksanakan rangkaian sosialisasi atas PADG Derivatif PUVA kepada pelaku Derivatif PUVA dengan melibatkan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO). Pengembangan sistem pelaporan serta *coaching clinic* sebagai persiapan implementasi sistem pelaporan Bank Indonesia bagi pelaku Derivatif PUVA juga telah dilaksanakan seiring dengan diimplementasinya sistem pelaporan kepada Bank Indonesia efektif pada 2 Februari 2026.

Bank Indonesia juga telah melaksanakan koordinasi yang intensif dengan Bappebti dan OJK untuk membahas berbagai *cross-cutting issues* dalam proses perizinan, pelaporan, dan pengawasan, termasuk pengawasan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM). Hasil pembahasan menjadi dasar dalam penyusunan Nota Kesepahaman Bank Indonesia, OJK, dan Bappebti untuk melakukan

koordinasi trilateral dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang terkait Derivatif PUVA, Derivatif EFEK, dan Derivatif Komoditi.

25) Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) Bank Indonesia yang aman dan andal

Bank Indonesia terus mengembangkan IPK secara terarah dengan memperhatikan strategi pengembangan IPK pada BPPU 2030. Strategi tersebut ditujukan untuk mencapai visi BPPU 2030 terkait pengembangan IPK, yakni mengembangkan dan memperkuat infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3I) sehingga IPK dapat berjalan secara andal, efisien, dan aman. Cakupan pengembangan IPK sebagaimana visi BPPU 2030 dilakukan pada sisi *front-end*, *middle-end*, sampai *back-end*.

Implementasi *Electronic Trading Platform Multimatching Systems* (ETP MMS) di sisi *front-end* terus dipersiapkan untuk terintegrasi dengan CCP di sisi *middle-end* sesuai tahapan pengembangan produk dan layanan. Hal tersebut memungkinkan pelaku pasar keuangan bertransaksi terotomasi secara *end-to-end* dan *seamless* (STP) sehingga meminimalkan adanya intervensi manual. Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dengan calon penyelenggara ETP MMS sebagai sarana transaksi dan CCP sebagai sarana kliring dan manajemen risiko untuk menciptakan efisiensi pemrosesan transaksi yang pada akhirnya dapat menciptakan pendalaman pasar keuangan di Indonesia yang modern dan maju. Pada Triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan reviu atas dokumen pendukung pengajuan rekomendasi interkoneksi ETP MMS dan CCP untuk memastikan proses pemberian rekomendasi dan operasionalisasi ke depan berjalan baik dan lancar.

Dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUVA, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sarana Transaksi pada 10 Juni 2025. Peraturan tersebut merupakan pengaturan teknis penyelenggaraan sarana transaksi yang juga mencakup pengaturan terkait ETP MMS. Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan infrastruktur PUVA untuk memastikan agar infrastruktur PUVA termasuk ETP MMS dan CCP diselenggarakan dengan memenuhi prinsip keandalan, efisiensi, dan keamanan serta selaras dengan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku, yakni *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) dan ISO 20022.

Pasca penerbitan PADG mengenai Penyelenggara Sarana Transaksi, Bank Indonesia telah memberikan izin operasional kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai Penyedia ETP Antarpasar pada 28 November 2025. Izin operasional tersebut mencakup layanan yang diselenggarakan berupa *platform* Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) untuk instrumen dan/atau transaksi repo. Dengan beroperasinya SPPA Repo tersebut, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar repo, serta mengurangi beban operasional dalam melakukan transaksi repo.

Berdasarkan aspek stabilitas dan ketersediaan layanan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) non-Sistem Pembayaran berada pada level yang sangat terjaga. Hal ini mencerminkan ketahanan operasional yang melampaui kebutuhan *baseline* operasional. Penyelenggaraan BI-ETP dan BI-SSSS oleh Bank Indonesia berjalan lancar dan stabil, sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan melalui OM *Pro Market* dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Sebagai bentuk penguatan yang bersifat *forward-looking*, Bank Indonesia tidak hanya menjaga kelangsungan layanan, tetapi juga mengakselerasi kesiapan operasional jangka menengah melalui penyusunan petunjuk teknis (panduan) operasional BI-ETP dan BI-SSSS serta dukungan terhadap proyek pengembangan sistem sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Langkah ini memperkuat fondasi penyelenggaraan IPK non-SP agar semakin *robust*, efisien, dan selaras dengan standar internasional, sehingga mampu mendukung pasar keuangan yang likuid, transparan, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan ketahanan sistem keuangan secara berkelanjutan.

PS 08 Merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus mendorong peningkatan inklusi ekonomi keuangan dan ekonomi keuangan syariah, termasuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan perlunya upaya untuk mendukung perbaikan daya beli masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sepanjang triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan program Bank Indonesia serta memperkuat sinergi untuk meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

26) Kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan syariah serta akses keuangan bagi UMKM dan pelaku usaha syariah

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia melanjutkan berbagai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah, termasuk pembiayaan hijau. Inisiatif ini didukung oleh sinergi dengan K/L terkait dan pelaku industri keuangan syariah, baik di sektor komersial maupun sosial. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyelenggarakan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) sebagai rangkaian kegiatan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) 2025. BPS merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari forum sinergi dan kolaborasi lintas K/L dan industri jasa keuangan syariah untuk memperkuat pembiayaan syariah pada sisi *supply* dan *demand*, khususnya pada sektor ekonomi yang dapat mendorong daya ungkit perekonomian. Rangkaian kegiatan BPS diawali dengan kegiatan *road to event* yang diselenggarakan di seluruh wilayah FESyar, dengan beberapa subkegiatan meliputi *business matching*, *business deals*, dan gerakan sadar wakaf, khususnya wakaf produktif. Selain itu, untuk memperkuat intermediasi dan literasi eksyar, dalam rangkaian BPS juga dilakukan *coaching* agar pelaku usaha syariah lebih mudah memahami dan mengakses produk keuangan syariah. Berbagai upaya tersebut memberikan kontribusi pada penguatan peran intermediasi perbankan syariah, tercermin dari pertumbuhan pembiayaan syariah sebesar 9,66% (yoy) pada triwulan IV 2025.

Selain itu, sebagai upaya mendukung program Asta Cita Pemerintah melalui kegiatan peningkatan literasi masyarakat terkait ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK, Kemenkeu, Kementerian Koperasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Institut Pertanian Bogor (IPB) serta beberapa universitas dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan 31 (tiga puluh satu) kegiatan edukasi secara masif untuk mendorong pemahaman masyarakat dan UMKM terkait literasi keuangan dengan rata-rata tingkat pemahaman sebesar 5,17. Selain edukasi, Bank Indonesia memfasilitasi perluasan akses keuangan melalui *business matching* pembiayaan (*one-on-one meeting*) antara 314

UMKM dan koperasi dengan 11 lembaga keuangan bank dan nonbank untuk meningkatkan inklusi keuangan UMKM. Sejalan dengan komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat literasi dan inklusi ekonomi syariah, Bank Indonesia terus melakukan edukasi khususnya kepada generasi muda melalui kegiatan Sekolah Ekonomi Syariah (SES), berkolaborasi dengan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI) di Pontianak.

27) Terlaksananya program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia terus mendorong berbagai inisiatif dalam mencapai inklusi ekonomi-keuangan dan keuangan berkelanjutan, dengan fokus pada akselerasi UMKM agar naik kelas dan berdaya saing. Program yang dilaksanakan mencakup: i) UMKM Go Ekspor; ii) UMKM Go Digital; iii) UMKM yang menerapkan *digital farming*; iv) UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan; v) UMKM yang masuk dalam *database* UMKM potensial; serta vi) pelaku usaha syariah (UMKM syariah) komoditas *halal food* dan *modest fashion*. Dukungan akselerasi UMKM berdaya saing secara kontinu dilakukan melalui fasilitasi perluasan akses pasar untuk meningkatkan omzet, komitmen *business matching* ekspor, serta fasilitasi akses pembiayaan. Hingga akhir triwulan IV 2025, tercatat 9.794 UMKM telah berdaya saing. Adapun nilai akses pasar UMKM konvensional telah mencapai Rp 635,93 miliar.

Dalam rangka mendorong program UMKM Go Ekspor, Bank Indonesia terus mendorong promosi perdagangan. Produk UMKM yang sudah terkurasi diikuti sertakan dalam promosi perdagangan domestik maupun internasional. Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia mengikutsertakan 17 UMKM di *Saudi Business Forum and Trade Promotion* 2025 pada 6 dan 7 Oktober 2025, 4 UMKM di *Singapore Coffee Week* pada 9-12 Oktober 2025, 78 UMKM di *Trade Expo Indonesia* pada 15-19 Oktober 2025, 22 UMKM di *Showcase SEACEN BoG Bali* pada 28-29 Oktober 2025 dan 9 UMKM di *Marrakech Coffee and Tea Festival* pada 6-8 Desember 2025.

Bank Indonesia juga secara aktif meningkatkan akses pembiayaan dan literasi pencatatan keuangan digital melalui kegiatan literasi. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui aplikasi SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan), bekerja sama dengan K/L terkait melaksanakan *Training of Trainers* bagi *trainer* di berbagai wilayah. *Business matching* pembiayaan juga dilaksanakan bersama lembaga keuangan bank dan nonbank. Selain itu, Bank Indonesia juga mengembangkan kelompok subsisten untuk meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas usaha bagi masyarakat

berpenghasilan rendah. Dalam konteks syariah, upaya peningkatan literasi pencatatan keuangan digital juga didorong melalui pelatihan dan uji kompetensi pencatatan keuangan pesantren yang memanfaatkan aplikasi Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) yang diikuti oleh 92 perwakilan pondok pesantren dari 46 KPwDN.

Bank Indonesia senantiasa mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah termasuk upaya meningkatkan akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku syariah. Hal ini dilakukan melalui upaya Bank Indonesia dalam memberdayakan dan mengembangkan ekosistem produk halal, a.l pada sektor *modest fashion*, pariwisata ramah Muslim, serta makanan dan minuman halal. Upaya tersebut menghasilkan 2.017 UMKM Syariah yang berdaya saing. Adapun nilai akses pasarnya telah mencapai Rp 1.177,17 miliar.

Pada sektor *modest fashion*, Bank Indonesia secara aktif mendukung peningkatan kualitas, kapasitas produksi, dan perluasan pasar domestik serta global. Hal tersebut ditempuh melalui penyelenggaraan berbagai program, yaitu IKRA Indonesia sektor *modest fashion*, Indonesia *International Modest Fashion Festival* (IN2MOTIONFEST), dan partisipasi dalam beragam *event* fesyen. Pada tahun 2025, 42 pelaku usaha syariah sektor *modest fashion* yang terpilih menjadi anggota IKRA telah mengikuti pelatihan dan pendampingan dalam bentuk *bootcamp*. Ikhtiar promosi dan akses pasar melalui gelaran IN2MOTIONFEST ISEF pada Oktober 2025 merupakan kolaborasi dengan banyak mitra strategis. Kegiatan ini melibatkan 255 desainer nasional dan internasional dalam 20 parade *fashion show*. Lebih lanjut, IN2MOTIONFEST ISEF menghadirkan beragam kegiatan untuk pengembangan sektor *modest fashion*, yakni *fashion show*, *exhibition*, *business matching* wastra, FGD, seminar, dan *clearance sale for charity*. Menjelang akhir triwulan IV, tujuh anggota IKRA juga ikut berpartisipasi pada JMFw (Jakarta Muslim Fashion Week) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan bersama dengan mitra kerja terkait sebagai Road to IN2MOTIONFEST 2026.

Bank Indonesia juga secara konsisten berperan aktif dalam pengembangan pariwisata ramah muslim melalui beberapa inisiatif yang mendorong pengembangan pariwisata ramah Muslim, dilakukan dengan sinergi bersama Kementerian Pariwisata. Inisiatif pertama ialah pelaksanaan Program Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim berbasis Desa Wisata melalui Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Program ini dilakukan dengan fokus meningkatkan daya saing Pokdarwis sebagai pelaku usaha syariah yang menjadi motor utama penggerak

ekosistem pariwisata ramah Muslim berbasis desa. Peningkatan daya saing Pokdarwis dilakukan dengan pemberian pendampingan penguatan manajerial, asistensi penyusunan paket wisata, penguatan promosi dan *branding* dengan bekerja sama dengan *online travel agent*. Pelaksanaan program ini, termasuk di dalamnya

penyusunan model bisnis, kunci keberhasilan, *lesson learned*, serta evaluasi kemudian disajikan dalam sebuah bentuk pedoman atau *guiding principle* pengembangan pariwisata ramah Muslim berbasis desa yang dapat digunakan oleh mitra kerja terkait untuk memperluas dan mereplikasi program.

Boks.7: Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025



Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta

Penyelenggaraan ISEF ke-12 dilaksanakan pada tanggal 8-12 Oktober 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Convention Centre & Theatre dengan tema "*Synergy of Sharia Economy and Finance to Strengthen Economic Self-Reliance and Inclusive Economic Growth*". ISEF merupakan puncak dari rangkaian Festival Ekonomi Syariah (FESyar) di 3 (tiga) regional yaitu Jawa, Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), Bulan Pembiayaan Syariah, dan rangkaian *Road to FESyar* di 43 wilayah. Penyelenggaraan ISEF 2025 melibatkan sinergi dengan berbagai K/L anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan seluruh mitra kerja terkait. Rangkaian kegiatan ISEF 2025 dihadiri oleh 106.291 pengunjung, baik secara luring maupun daring, yang terdiri dari pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum.

ISEF 2025 melibatkan 723 pelaku usaha dari berbagai sektor termasuk *modest fashion*, makanan halal, UMKM, lembaga keuangan syariah, pelaku industri kreatif, serta investor domestik dan internasional, dengan dukungan dari 858 mitra strategis yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, asosiasi industri halal, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan mitra internasional.

Penyelenggaraan ISEF ke-12 tahun 2025 merupakan perwujudan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Pembukaan ISEF 2025 dilaksanakan secara *hybrid* pada 8 Oktober 2025, dengan peluncuran 4 (empat) program pengembangan eksyar nasional. Rangkaian *opening ceremony* dilanjutkan dengan *launching* ekosistem *Holding Digital Business Pesantren* (*pesantara.id*) pada 9 Oktober 2025 untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, serta *kick-off* Kompetisi *Sharia Hackathon* pada *Youth Sharia Entrepreneurship Forum* tanggal 11 Oktober 2025 bersama Kemendikti-Saintek, KNEKS, dan HIPMI Syariah.

Sebagai *event modest fashion* berskala global, IN2MOTIONFEST tidak hanya diselenggarakan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Pada 20 – 22 Agustus 2025, IN2MOTIONFEST diselenggarakan di Istanbul, Turki, yang dirangkaikan dengan IFCO (*Istanbul Fashion Connection*). IN2MOTIONFEST Istanbul ini merupakan pelaksanaan tahun kedua, mencakup satu slot *fashion show* dan trade show IFCO dengan menghadirkan 6 (enam) desainer anggota IKRA dan 1 (satu) desainer mitra. Sebelum penyelenggaraan *fashion show*, terdapat *press conference* yang menghadirkan media internasional dan nasional untuk melakukan peliputan dan penulisan artikel pemberitaan IN2MOTIONFEST Istanbul. Penyelenggaraan kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pelaku industri fesyen global dan membuka ruang kolaborasi antara pelaku industri *modest fashion* Indonesia dan mitra bisnis di Turki. Lebih lanjut, produk *modest*

fashion Indonesia dengan ciri khas wastra Nusantara dipandang memiliki daya tarik dan relevansi untuk pasar fesyen Turki dan sekitarnya.

ISEF 2025 juga menyelenggarakan berbagai sharia forum yang terdiri dari 6 forum internasional dan 8 forum domestik, mencakup BI-IILM-IFSB-IsDB *Joint High-Level Seminar and Investment Forum*, 7th *International Hajj Fund Forum*, 7th *International Halal Conference*, *Global Islamic Social Finance Forum*, *Silaturahmi Pesantren*, *Forum Bisnis Pesantren*, *Forum Keuangan Sosial Syariah*, serta 3rd *Indonesia Conference on Islamic Economics*. Rangkaian *business linkage* dan *business matching* diselenggarakan untuk mempertemukan pelaku usaha dengan *potential buyers*, lembaga pembiayaan syariah, dan investor.

ISEF 2025 mencatat capaian signifikan dalam mendorong literasi dan inklusi ekonomi syariah di

Indonesia. Melalui penyelenggaraan 100 rangkaian kegiatan, ISEF 2025 berhasil menarik 106.291 pengunjung dan dihadiri oleh berbagai mitra kerja strategis, seperti Menteri Koordinator Perekonomian, Wakil Menteri, Anggota Komisi XI DPR, Duta Besar, serta CEO lembaga keuangan domestik dan internasional yang menunjukkan tingginya dukungan pemerintah dan mitra kerja terhadap pengembangan ekonomi syariah. Kolaborasi dengan 858 mitra strategis yang mencakup 34 kementerian dan lembaga, 34 mitra internasional, 23 lembaga keuangan syariah, hingga 614 UMKM halal, menghasilkan transaksi bisnis senilai Rp2,7 triliun. Antusiasme juga terlihat dari 13.542 peserta kompetisi serta penyerapan 1.785 karya wastra melalui IN2MOTIONFEST. Hal ini membuktikan semakin masifnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing pariwisata ramah Muslim nasional, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Pariwisata, ENHAIL Halal Tourism Center Politeknik Pariwisata NHI Bandung, dan CrescentRating menyusun *Kajian Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025*. Kajian ini bertujuan menampilkan kondisi pengembangan pariwisata ramah Muslim nasional di tingkat provinsi. Dengan menyajikan kondisi tersebut, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan *awareness* dan mendorong perumusan strategi pengembangan pariwisata ramah Muslim di tingkat daerah dan provinsi. IMTI 2025 dilaksanakan di 15 provinsi yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Hasil kajian menunjukkan adanya kemajuan pada aspek kuliner halal, akomodasi, dan warisan budaya, meskipun masih dihadapkan pada tantangan di bidang infrastruktur, promosi, dan standarisasi layanan. Secara nasional, skor rata-rata IMTI meningkat dari 50 pada tahun 2023 menjadi 57 pada tahun 2025, mencerminkan peningkatan pemahaman dan adopsi ekosistem *Muslim-friendly* secara lebih merata.

Pada sektor makanan dan minuman halal, Bank Indonesia mengembangkan ekosistem rantai nilai halal yang berfokus pada upaya mendukung stabilitas harga, menjaga inflasi, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Upaya ini dilakukan pada beberapa program, yaitu: (i) program INFRATANI (*Integrated Farming with Information Technology and Society*) dan Program DESA BERDIKARI (Berdaya, Kreatif, Religi, dan Inspiratif), (ii) program kemandirian ekonomi pesantren berbasis GNPIP untuk komoditas strategis penyumbang

inflasi (cabai, bawang merah, ayam pedaging, beras, dan perikanan), serta (iii) program Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia sektor *halal food*.

Program INFRATANI merupakan inisiatif pengembangan ekosistem rantai nilai yang bertujuan memperkuat sektor pertanian terintegrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan melibatkan kelompok masyarakat, termasuk jaringan pesantren. Sementara itu, Desa Berdikari merupakan program pemberdayaan masyarakat desa yang berfokus pada pengembangan ekosistem komoditas unggulan berbasis halal melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas produksi, dan pengelolaan rantai nilai. Adapun program IKRA dilakukan melalui kurasi, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar. Pada tahun 2025, anggota IKRA sektor *halal food* bertambah sebanyak 43 pelaku usaha yang dipilih melalui seleksi. Pelaku usaha dimaksud kemudian mengikuti pelatihan dan pendampingan dalam bentuk *bootcamp*. Sepanjang tahun 2025, anggota IKRA dilibatkan dalam beragam kegiatan promosi perdagangan, baik skala domestik maupun internasional, seperti Ubud Food Festival, Foodex, MIHAS (Malaysia International Halal Showcase), dan ISEF. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan eksposur produk, tetapi juga kesempatan *business linkage* dan transaksi B2B. Selain itu, penguatan daya saing sektor pangan halal juga didorong melalui peluncuran dukungan ekosistem *holding business* digital pesantren dengan pengembangan *virtual market* Pesantren Nusantara (Pesantara). Melalui *platform* Pesantara, peluang kolaborasi bisnis antarpesantren dapat ditingkatkan sehingga memperkuat peran

pesantren sebagai motor kemandirian ekonomi umat dan pilar ketahanan pangan nasional.

- 28) Terjalannya kesepakatan / program / koordinasi dengan otoritas / asosiasi / komunitas / lembaga nasional dan internasional dalam ekonomi keuangan inklusif dan hijau, baik konvensional maupun syariah

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan serangkaian koordinasi dengan K/L dan mitra kerja terkait dalam rangka mendukung ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, termasuk penguatan industri halal sehingga menghasilkan 13 (tiga belas) kesepakatan/ tindak lanjut program. Penguatan industri halal dilakukan dengan prioritas pada sektor *halal food*, *modest fashion*, dan Pariwisata Ramah Muslim (PRM). Pada sisi hulu, dilakukan kolaborasi dengan pesantren, UMKM, dan pelaku usaha syariah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan tata kelola kelembagaan. Sementara itu, pada sisi hilir dilakukan kolaborasi dengan berbagai K/L untuk fasilitasi akses pasar pelaku usaha syariah, utamanya dalam rangkaian kegiatan ISEF 2025, *business matching*, dan penyelenggaraan atau partisipasi dalam event promosi perdagangan lainnya.

Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan berbagai K/L dan mitra kerja sebagai bagian dari upaya mendukung ekonomi-keuangan inklusif dan hijau. Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) dan Kementerian Hukum dalam bentuk kegiatan seminar serta ruang interaksi dalam rangkaian kegiatan Karya Kreatif Indonesia. Di samping itu, pada triwulan IV 2025,

Bank Indonesia menginisiasi NK dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Selama triwulan IV 2025, Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan berbagai lembaga dalam rangka mendukung pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Pariwisata melalui penyusunan kajian Indonesia Muslim *Travel Index* (IMTI) tahun 2025 untuk mengukur daya saing destinasi ramah Muslim di 15 provinsi. Integrasi dan penyelarasan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah dalam rencana pembangunan tingkat pusat dan daerah diwujudkan dengan peluncuran buku “Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Daerah”. Panduan ini diluncurkan pada Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah yang diselenggarakan melalui sinergi bersama Kementerian PPN/Bappenas, KNEKS, dan Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, pada bulan September 2025 telah dilakukan penandatanganan PKS antara Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem rantai nilai halal di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga senantiasa berupaya melakukan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Agama terkait pertukaran data dan informasi. Penguatan ini dilakukan melalui perjanjian kerja sama yang pada saat ini dalam tahap pembahasan secara intensif bersama dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Dirzawa) dan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Boks.8: Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah



Pembukaan Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Sebagai upaya memperkuat penyelarasan kebijakan pusat dan daerah dalam pengembangan ekonomi syariah, Bank Indonesia menginisiasi Forum Sinergi

Pusat dan Daerah (Forsinpusda) dalam Pengembangan Ekonomi Syariah yang diselenggarakan pada rangkaian ISEF ke-12 tahun 2025. Forum ini menjadi wadah

strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan utama dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat pusat dan daerah, antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta perwakilan pemerintah daerah yang terdiri dari Bappeda, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Mengusung semangat kolaborasi dan akselerasi, Forsinpusda dirancang untuk mendorong implementasi kebijakan ekonomi syariah secara lebih masif, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Forum ini dilatarbelakangi oleh telah dimuatnya arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk memastikan agenda nasional tersebut dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke tingkat daerah, Bank Indonesia mendorong percepatan adopsi kebijakan serupa dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Integrasi muatan ekonomi syariah di level daerah dinilai

krusial guna menjaga koherensi kebijakan, memperkuat kesinambungan program, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan ekonomi syariah.

Dalam forum ini ditegaskan bahwa adopsi kebijakan tidak cukup berhenti pada level perencanaan, tetapi perlu ditopang oleh panduan operasional yang jelas. Oleh karena itu, pelaksanaan forum sekaligus meluncurkan buku Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. Panduan tersebut berfungsi sebagai acuan implementatif agar arah kebijakan yang telah dimuat dalam dokumen perencanaan dapat diterjemahkan dan direalisasikan ke dalam program yang terukur, yang dapat dianggarkan, serta dapat dimonitor dan dievaluasi.

Pelaksanaan forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi dan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah. Melalui forum ini, selain menciptakan *awareness* dan kesamaan pemahaman atas arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah, tercapai juga sosialisasi atas landasan atau panduan operasional atas realisasi dari arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dimaksud.

Dengan semakin selarasnya ekonomi syariah dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, diharapkan ekonomi syariah dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan serta kesejahteraan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan. Hingga saat ini, capaian penyelarasan perencanaan pembangunan daerah menunjukkan progres yang baik dengan 26 provinsi yang telah mencantumkan agenda ekonomi syariah dalam RPJPD, 23 provinsi dalam RPJMD, serta 14 provinsi yang telah menetapkan indikator ekonomi syariah dalam RPJMD.

PS 09 Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional untuk mendukung stabilitas makroekonomi, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional di tengah dinamika lingkungan strategis global dan peningkatan

ketidakpastian kebijakan ekonomi negara maju. Melalui kebijakan internasional yang strategis dan proaktif, seperti mendorong transaksi berbasis mata uang lokal, memperkuat kerja sama keuangan internasional termasuk jaring pengaman keuangan internasional, menjaga kepercayaan lembaga internasional melalui pengelolaan persepsi positif terhadap perekonomian nasional, dan strategi diplomasi di forum internasional, Bank Indonesia turut menjaga perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan global. Komitmen ini tidak hanya mendukung stabilitas makroekonomi, sistem pembayaran, dan sistem keuangan, tetapi juga mengukuhkan posisi

Indonesia sebagai mitra penting dan strategis dalam arsitektur keuangan dunia.

Sepanjang triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

29) Terjaganya persepsi positif lembaga internasional, lembaga pemeringkat, dan investor global terhadap perekonomian Indonesia

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global yang meningkat, Bank Indonesia terus melakukan berbagai strategi yang proaktif dan kredibel untuk menjaga persepsi positif lembaga internasional dan pemeringkat terhadap perekonomian Indonesia. Sepanjang triwulan IV 2025, terdapat 1 (satu) laporan yang mencerminkan pengelolaan persepsi positif ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Bank Indonesia selaku sekretariat *Investor Relations Unit* (IRU) Nasional, dengan tujuan utama untuk mendorong peningkatan arus masuk modal asing melalui investasi portofolio (PI) dan investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI). AMRO sebagai lembaga *surveilans* kawasan ASEAN+3 telah mempublikasikan 1 (satu) laporan, yaitu *AMRO Financial Stability Report* (AFSR) 2025. Dalam laporan tersebut, AMRO menyampaikan bahwa kawasan ASEAN+3, termasuk Indonesia, tetap tangguh di tengah tekanan eksternal global yang meningkat. Ketahanan tersebut tecermin pada fundamental ekonomi makro Indonesia yang solid, ditopang oleh stabilitas sistem keuangan, kecukupan cadangan devisa, serta ruang kebijakan moneter dan makroprudensial yang memadai. Selain itu, penguatan permintaan domestik dan akselerasi digitalisasi sektor keuangan di Indonesia turut memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Meskipun risiko eksternal masih perlu dicermati, respons kebijakan yang kredibel dan terkoordinasi, baik di tingkat nasional maupun kawasan, menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Upaya menjaga persepsi positif perekonomian nasional juga tercermin dalam siaran pers hasil kunjungan *Mission Team Article IV* IMF dalam rangka penyusunan *Staff Report 2025 Indonesia Article IV Consultation*. *Mission Team Article IV* IMF telah menyelesaikan rangkaian kunjungan Article IV

(AIV) Indonesia pada kurun waktu 3–12 November 2025. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan AIV *mission*, IMF telah menerbitkan siaran pers hasil kunjungan AIV Indonesia 2025 yang membahas pandangan *Mission Team* IMF secara garis besar pada 15 November 2025. Dalam siaran *pers* dimaksud, IMF menyatakan bahwa Indonesia tetap menjadi *global bright spot* dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah tantangan lingkungan eksternal, serta inflasi yang diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran. Lebih lanjut, IMF menekankan bahwa bauran kebijakan yang terkalibrasi dengan baik mampu mendukung perekonomian, di mana upaya menjaga kredibilitas dan *policy space* tetap menjadi hal yang krusial di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Reformasi struktural yang berani, termasuk penguatan perjanjian dagang, dinilai akan meningkatkan iklim bisnis dan produktivitas demi mencapai jalur pertumbuhan berkelanjutan menuju visi Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi (*high-income economy*).

Selain itu, lembaga pemeringkat *Rating and Investment Information, Inc. (R&I)* pada 24 Oktober 2025 mempertahankan *Sovereign Credit Rating (SCR)* Republik Indonesia pada peringkat **BBB+**, dua tingkat di atas *investment grade*, dengan *outlook* stabil. Keputusan ini mencerminkan keyakinan R&I terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, didukung oleh ekspansi demografi, sumber daya yang melimpah serta sektor industri pengolahan yang bertumbuh. R&I menilai inflasi Indonesia tetap stabil, dengan tingkat utang pemerintah yang tetap rendah, serta kebijakan moneter dan fiskal yang *prudent*. Namun, R&I menilai perlu asesmen lebih lanjut terhadap langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kondisi fiskal yang tetap sehat dalam jangka menengah. R&I memperkirakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 5%, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia di atas titik tengah kisaran 4,6%–5,4%. R&I juga meyakini inflasi akan terjaga dalam kisaran target, sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah sekitar 1% dari PDB. Dari sisi fiskal, Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dan memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global serta domestik, mengambil langkah kebijakan yang diperlukan, serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- 30) Terjalannya sinergi kebijakan dan kerja sama internasional untuk mendukung kebijakan utama secara optimal

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama *Local Currency Transaction* (LCT) dengan bank sentral mitra sebagai strategi diversifikasi mata uang pada transaksi bilateral untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal. Dalam mendorong implementasi LCT, Bank Indonesia menerapkan dua strategi yaitu (i) *refocusing* melalui penajakan intensifikasi cakupan kerja sama dengan negara mitra *existing* dan perluasan kerja sama dengan negara mitra baru, serta (ii) *restrategizing* pelaksanaan sosialisasi 3T (*Targeted*, Terintegrasi, Terencana), termasuk melalui koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional LCT. Strategi ini berhasil meningkatkan capaian nilai transaksi LCT dan rerata pengguna bulanan pelaku LCT secara signifikan. Sepanjang 2025, nilai transaksi LCT mencapai sebesar ekuivalen USD 25,74 miliar, meningkat sebesar 58% (yoy) dari capaian 2024 USD 16,28 miliar. Rerata bulanan pengguna LCT mencapai 9.720 pelaku usaha, meningkat 94% dari tahun sebelumnya sebesar 5.020 pelaku usaha pengguna per bulan.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang telah menyepakati Penguatan Kerja sama LCT pada Desember 2025. Pada Desember 2025, Bank Indonesia memperbarui kerja sama LCT dengan Jepang melalui penandatanganan penguatan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Cooperation/MOC*) oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Jepang (JMOF) untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Kesepakatan ini juga memperluas kerangka kerja LCT sehingga mencakup penyelesaian transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan. Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas sistem pembayaran sekaligus mempererat kerja sama moneter di pasar keuangan kedua negara.

Pada triwulan IV 2025, implementasi kerja sama bilateral dengan bank sentral mitra telah terlaksana sebanyak 31 kegiatan dengan 16 bank sentral, yang terdiri atas 10 mitra *Structured Bilateral Cooperation* (SBC) dan 6 mitra non-SBC. Pelaksanaan SBC dan kerja sama bilateral lainnya telah diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda BI, seperti akuisisi keahlian, *institutional leadership* Bank Indonesia, serta akselerasi implementasi kerja sama *cross-border payments*. Pada area akuisisi keahlian, kerja sama ditargetkan untuk meningkatkan kapabilitas BI melalui diskusi teknis pada area *green central banking*,

tokenisasi, pengelolaan rupiah, likuiditas dan cadangan devisa, *oversight* infrastruktur pasar keuangan, pengembangan pasar repo, manajemen risiko, hingga isu siber dan digitalisasi. Selanjutnya, area *institutional leadership* diwujudkan melalui pemberian *capacity building* sesuai *expertise* BI kepada mitra dengan topik a.l. pasar keuangan (BSP), *macro stress testing* dan *digital innovation* (BDCB), manajemen pagedaran uang (BoU), *financial risks management* (NBK), hingga pengelolaan SDM (SBV). Lebih lanjut, pengembangan area *cross-border payments* dieksplorasi melalui pertemuan dalam rangka mendorong implementasi QRIS Antar negara dengan negara mitra maupun dengan calon mitra baru a.l. Jepang dan Korea Selatan.

- 31) Terjaganya kepentingan Bank Indonesia/Republik Indonesia melalui penyampaian posisi Bank Indonesia/Republik Indonesia di forum/kerja sama internasional

Bank Indonesia senantiasa memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan/atau ekonomi Republik Indonesia melalui diplomasi dan/atau negosiasi di forum/lembaga/kerja sama internasional. Sampai dengan triwulan IV 2025, 45 (empat puluh lima) posisi/*stance* Indonesia telah diterima di berbagai forum internasional utama yang mencakup area stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sistem pembayaran/digital, pengembangan pasar keuangan, *sustainable finance*, inklusi ekonomi dan keuangan, perdagangan/investasi, ekonomi syariah, hingga kelembagaan. Posisi/*stance* Indonesia dimaksud diterima dalam berbagai forum internasional, baik dalam forum regional maupun multilateral.

Dalam forum regional, Bank Indonesia berperan aktif di South East Asian Central Banks (SEACEN) sebagai *chair* dalam 45th SEACEN Board of Governors (BOG) Meeting, ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM+3), dan 69th Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) Deputies. Pada forum AFCDM+3 (25 November 2025), Bank Indonesia bertukar pandangan mengenai kebijakan makroekonomi, reformasi struktural, dan isu integrasi kawasan, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Selain itu, dibahas pula beberapa isu strategis terkait *roadmap* transisi struktur pembiayaan Chiang Mai Initiative on Multilateralization (CMIM) dan isu tata kelola kelembagaan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Rangkaian pertemuan The 45th SEACEN BOG Meeting (29 Oktober 2025) telah terselenggara dengan baik dan menjadi momentum

strategis dalam memperkuat posisi SEACEN sebagai regional *learning hub* yang relevan, *agile*, dan *impactful*. Diskusi dalam 45th SEACEN BOG Meeting menegaskan kembali komitmen bersama untuk mencetak *central banking* yang *future-ready* melalui

penguatan aspek *capacity building*, *policy dialog*, serta *research collaboration* di tingkat kawasan. *Chairmanship* SEACEN serta peran aktif Bank Indonesia dalam forum regional strategis mempertegas kepemimpinan dan pengaruh Bank Indonesia di kawasan.

Boks.9: South East Asian Central Banks (SEACEN) Governors' Conference ke-61



The 61st SEACEN Governors' Conference di Bali

South East Asian Central Banks (SEACEN) Governors' Conference ke-61 yang diselenggarakan di Bali pada 28 Oktober 2025 menjadi forum strategis bagi para gubernur bank sentral negara anggota SEACEN untuk memperkuat kerja sama regional. Konferensi ini menjadi wadah pertukaran gagasan dalam rangka penguatan kapasitas, kebijakan, dan kelembagaan bank sentral di kawasan. Dalam forum tersebut, para gubernur sepakat memperkuat ketahanan ekonomi kawasan melalui kolaborasi regional yang lebih erat di tengah ketidakpastian global, transformasi digital, dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan, seiring dengan potensi Asia yang besar dalam membentuk tatanan ekonomi regional yang lebih tangguh dan inklusif.

Dalam SEACEN Governors' Conference ke-61 tersebut, Gubernur Bank Indonesia membagikan 5 (lima) langkah utama yang ditempuh Bank Indonesia dalam merespons dinamika dan tantangan. Pertama, memperkuat kerangka bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran agar berjalan terpadu. Kedua, memperkuat pengawasan sistemik, termasuk pendalaman pasar uang dan pengawasan terhadap lembaga keuangan nonbank. Ketiga, mempercepat konektivitas pembayaran digital lintas negara, baik ritel maupun *wholesale*. Keempat,

memperkuat kapasitas kelembagaan guna menjaga independensi bank sentral sekaligus memastikan sinergi dengan pemerintah dan sektor riil. Kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia agar siap menghadapi tantangan kebanksentralan ke depan.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif SEACEN, Dr. Cyn-Young Park, juga menyampaikan, bahwa kerja sama ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk membuka potensi pertumbuhan, mendorong inovasi, dan memperkuat ketahanan di dunia yang penuh ketidakpastian.

Rangkaian pertemuan SEACEN ini menjadi awal masa transisi Bank Indonesia menuju keketuaan SEACEN, yang akan resmi dijalankan pada tahun 2026 menggantikan Bank of Korea. SEACEN merupakan forum kerja sama antar-bank sentral di kawasan Asia-Pasifik yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, dan riset kebijakan. Kepemimpinan Bank Indonesia di SEACEN pada tahun 2026 mencerminkan pengakuan terhadap peran aktif Indonesia dalam memperkuat kapasitas kebanksentralan di kawasan, sekaligus mendorong agar hasil riset dan pelatihan SEACEN semakin berkontribusi terhadap kebijakan di negara anggota.

Sementara, dalam 69th EMEAP *Deputies* (3-5 Desember 2025), Bank Indonesia berbagi pandangan dengan bank sentral di kawasan Asia-Pasifik mengenai kondisi ekonomi dan keuangan terkini serta beberapa isu strategis bank sentral.

Pertemuan juga digunakan oleh Bank Indonesia untuk mendorong isu strategis terkait penggunaan *Local Currency Transaction* (LCT) di kawasan dan efisiensi mekanisme *Working Group* (WG) di EMEAP.

Boks.10: 69th EMEAP *Deputies*' and Related Meetings



69th EMEAP *Deputies*' and Related Meetings di Seoul, Korea Selatan

Delegasi Bank Indonesia yang dipimpin oleh Deputi Gubernur menghadiri rangkaian 69th EMEAP *Deputies* and Related Meetings yang diselenggarakan pada 3 – 5 Desember 2025 di Seoul, Korea Selatan. Rangkaian pertemuan tersebut meliputi 38th *Monetary and Financial Stability Committee* (MFSC) Meeting serta 69th *Deputies* Meeting, yang merupakan forum koordinasi Deputi Gubernur bank sentral anggota EMEAP untuk membahas isu-isu strategis di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, serta agenda kerja sama kawasan.

Dalam pertemuan 38th MFSC, pembahasan mencakup perkembangan ekonomi dan keuangan global dan kawasan yang dinilai relatif resilien namun tetap menghadapi risiko, sehingga memerlukan penguatan koordinasi kebijakan. Selain itu, anggota EMEAP masih mengeksplorasi pengaturan dan pemanfaatan *stablecoin*. Pertemuan juga membahas pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) secara *prudent* di bank sentral, perkembangan proyek riset (*Forex Exchange Intervention/FXI reaction function*, *green Foreign Direct Investment/FDI*, dan *Central Bank Digital Currencies/CBDC*), rencana *Crisis Communication Test* (CCT) 2026, serta arah MFSC *Workplan* terkait isu geopolitik dan digitalisasi.

Sementara itu, pada 69th EMEAP *Deputies* Meeting, para deputi gubernur bank sentral membahas *progress report* dan *workplan* berbagai EMEAP *Working Groups* (WGs).

Dalam *progress report*, deputi gubernur bank sentral EMEAP mengapresiasi hasil kerja WGs dan memberikan arahan agar dilakukan penguatan koordinasi antar-*working group*. Terkait dengan *workplan* masing-masing WG ke depan, EMEAP WGs akan berfokus pada empat *strategic priorities* sebagaimana arahan 30th EMEAP *Governors* Meeting, antara lain ketegangan geopolitik, dinamika inflasi, digitalisasi dan AI, serta risiko iklim. Para deputi gubernur bank sentral juga membahas isu strategis lainnya, termasuk upaya peningkatan efektivitas tata kelola pertemuan serta rencana pelaksanaan pertemuan EMEAP *Deputies* Meeting ke-70 pada April 2026.

Secara keseluruhan, pertemuan ini menjadi *platform* penting bagi Bank Indonesia untuk memperoleh informasi terkini mengenai dinamika kawasan dan global serta menyampaikan posisi dan kepentingan nasional. Bank Indonesia antara lain menegaskan pentingnya penguatan *Local Currency Transaction* (LCT), menyampaikan fokus pengembangan *wholesale CBDC*, serta memaparkan *AI Strategic Plan 2025–2030*. Partisipasi aktif tersebut memperkuat kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong kerja sama di kawasan yang selaras dengan mandat menjaga stabilitas nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Dalam forum multilateral strategis, Bank Indonesia menunjukkan peran aktif dan konstruktif melalui penyampaian pandangan kebijakan serta partisipasi dalam perumusan agenda global di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Posisi Bank Indonesia disampaikan pada berbagai forum seperti IMF-World Bank Annual Meeting (13-18 Oktober 2025), G20 South Africa 4th Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting (13-16 Oktober 2025), Bank for International Settlement (BIS) Bimonthly Meeting (8-10 November 2025), Financial Services Board (FSB) Plenary dan Emerging Market and Developing Economics (EMDEs) Forum (18-19 November 2025), the International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet) Annual General Meeting (26-27 November 2025), 4th BRICS Brazil Finance and Central Bank Deputies (FCBD) (1 Desember 2025), dan United States G20 1st FCBD Meeting (15-16 Desember 2025).

Keterlibatan tersebut mencakup isu-isu utama seperti ketahanan stabilitas keuangan global di tengah ketidakpastian, dinamika aliran modal dan

risiko lembaga keuangan non-bank, percepatan pembayaran lintas negara, dampak digitalisasi dan pemanfaatan AI, penguatan kerja sama pengaturan aset digital seperti *crypto-asset* dan *stablecoins*, serta penguatan pengawasan *market conduct* dengan menggunakan *media intelligence* berbasis *web scraping* dan AI untuk mendukung perlindungan konsumen di sektor keuangan. Melalui forum-forum tersebut, Bank Indonesia secara konsisten mendorong penguatan kerja sama multilateral, harmonisasi standar regulasi/pengawasan aset digital, optimalisasi peran regulasi dan pengawasan di sektor keuangan dalam mendukung pembiayaan perekonomian, serta pendekatan yang seimbang antara upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan, khususnya bagi negara *emerging market* dan *developing economies* (EMDEs). Kontribusi Bank Indonesia dalam forum multilateral strategis tersebut tertuang dalam berbagai *deliverables*, antara lain IMF-World Bank Annual Meeting Chair's Statement dan G20 Chair's Summary.

Boks.11: Pertemuan Tahunan IMF-WB Annual Meeting dan G20 2025



Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat

Dalam Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang diselenggarakan pada 13 – 18 Oktober 2025, pembahasan yang mengemuka adalah mengenai perekonomian global yang menunjukkan ketahanan seiring menguatnya semangat multilateralisme dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Pertumbuhan tercatat lebih baik dari perkiraan,

ditopang kebijakan yang kredibel, peningkatan investasi dan perdagangan menjelang penyesuaian tarif, serta dampak ketidakpastian perdagangan yang lebih terbatas dari estimasi. Namun, prospek ekonomi global masih dibayangi oleh risiko proteksionisme, ketimpangan pasar kerja, meluasnya peran institusi keuangan non-bank, serta ketidakpastian

dampak *Artificial Intelligence* terhadap produktivitas. Situasi ini menegaskan pentingnya respons kebijakan internasional yang adaptif dan kolaboratif.

Dalam pertemuan dimaksud, Gubernur Bank Indonesia mewakili negara kawasan, yakni *Southeast Asia Voting Group* (SEAVG) dalam keanggotaan *International Monetary and Financial Committee* (IMFC) tahun 2025, menyampaikan tiga langkah kebijakan utama yang ditempuh Indonesia untuk menjaga resiliensi ekonomi sekaligus memastikan inflasi tetap dalam sasaran. Pertama, implementasi bauran kebijakan yang selaras antara moneter, fiskal, dan stabilitas keuangan. Kedua, reformasi struktural untuk memperkuat pertumbuhan melalui hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi, inklusi keuangan, dan penciptaan lapangan kerja. Ketiga, penguatan kerja sama perdagangan dan investasi, baik di kawasan ASEAN maupun dengan mitra dagang utama seperti AS, Tiongkok, Jepang, India, dan Eropa. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa multilateralisme jauh lebih efektif dibandingkan dengan unilateralisme dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global dan mengatasi ketidakseimbangan.

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati agenda kebijakan global, yang berisi langkah-langkah menjaga stabilitas dan memperkuat resiliensi pertumbuhan di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. IMF merekomendasikan empat arah kebijakan utama. Pertama, setiap negara didorong untuk menerapkan pengelolaan keuangan negara jangka menengah yang lebih berhati-hati guna memperkuat ketahanan fiskal tanpa mengorbankan investasi dan belanja sosial. Kedua, bank sentral perlu menjaga

stabilitas harga dengan tetap menjaga independensi dan transparansi. Ketiga, kebijakan di sektor keuangan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko pasar dan keterkaitan antarlembaga keuangan. Keempat, reformasi struktural diarahkan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui perbaikan iklim usaha, penguatan tata kelola, pemberantasan korupsi, penyederhanaan regulasi, pengembangan pasar modal, serta peningkatan kewirausahaan dan daya saing. Hasil pembahasan dalam forum tersebut dituangkan dalam *IMFC Chair's Statement* yang merangkum pandangan bersama anggota mengenai prospek ekonomi global, risiko yang perlu diwaspadai, serta arah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat resiliensi pertumbuhan.

Lebih lanjut, dalam pertemuan G20 yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama multilateral dan kebijakan yang kredibel guna menjaga stabilitas ekonomi dengan mendorong kebijakan fiskal dan moneter yang berimbang, memperkuat ketahanan terhadap risiko keuangan, serta melanjutkan reformasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Secara khusus, pertemuan juga menyoroti upaya memperkuat arsitektur keuangan internasional melalui reformasi lembaga keuangan multilateral (*Multilateral Development Banks/MDBs*) dan penanganan kerentanan utang. Pertemuan G20 ditutup dengan penyerahan Presidensi G20 dari Afrika Selatan kepada Amerika Serikat untuk tahun 2026.

Pada forum multilateral syariah, Bank Indonesia turut berperan aktif dalam 47th *Islamic Financial Services Board (IFSB) Council Meeting* (10 Desember 2025) dan 35th *International Islamic Liquidity Management (IILM) Governing Board Meeting* (3 Desember 2025). Bank Indonesia menyampaikan pandangan dan berkontribusi dalam pembahasan strategis terkait penguatan tata kelola dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah global, pengembangan pasar keuangan syariah, serta peningkatan efektivitas manajemen likuiditas syariah internasional. Partisipasi tersebut mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung penguatan arsitektur keuangan syariah global sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam forum keuangan syariah internasional. Dalam 47th *IFSB Council Meeting*, Bank Indonesia menyampaikan usulan pembentukan *task force* dalam rangka memperdalam kajian kelayakan

dari opsi pendanaan *Temporary (Cash) Waqf* sebagai salah satu opsi pendanaan untuk memperkuat tata kelola IFSB. Selanjutnya, pada pertemuan 35th *IILM Governing Board*, Bank Indonesia berperan aktif dalam pembahasan 4 (empat) agenda utama, yaitu bisnis dan strategi IILM, keuangan IILM, tata kelola, serta pembaruan organisasi dan SDM.

PS 10 Merumuskan dan implementasi bauran kebijakan kelembagaan dengan kepemimpinan profesional dan tata kelola yang baik untuk mencapai kinerja unggul

Di tengah tantangan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja serta penyempurnaan proses bisnis kebijakan dan kelembagaan, Bank Indonesia senantiasa mengutamakan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional dalam menjalankan tugas

dan wewenangnya sebagaimana amanat UU. Selain itu, penguatan kewenangan Bank Indonesia, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, dan pergeseran demografi pegawai ke generasi milenial dan generasi Z yang semakin besar, mendorong Bank Indonesia untuk selalu memperkuat pengelolaan SDM dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Sepanjang triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan bauran kebijakan kelembagaan dengan kepemimpinan profesional dan tata kelola yang baik untuk mencapai kinerja unggul sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

32) Terjaganya kinerja kelembagaan yang efektif dan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik

Bank Indonesia secara konsisten menjaga tata kelola yang baik dan profesional yang tecermin pada pencapaian tingkat maturitas tata kelola pada level *Enhanced*. Level *Enhanced* merupakan level tertinggi dalam skala penilaian tingkat maturitas tata kelola. Pada kategori ini, praktik Sistem Tata Kelola Bank Indonesia dipandang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang memadai dengan penerapan yang konsisten dan telah dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pencapaian tersebut didukung melalui berbagai upaya, yakni implementasi tindak lanjut atas sejumlah rekomendasi penguatan tata kelola pada periode sebelumnya, serta pemetaan seluruh mandat Bank Indonesia berdasarkan UU P2SK yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam ketentuan internal Bank Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diterbitkan. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam implementasi praktik tata kelola yang baik dan profesional, terdapat sejumlah rekomendasi yang akan dimonitor secara berkala guna memperkuat tata kelola di Bank Indonesia.

Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, Bank Indonesia secara berkelanjutan melakukan penguatan terhadap fungsi audit intern, baik dari sisi kebijakan, struktur organisasi maupun pelaksanaan tugas audit intern. Penguatan tersebut dilakukan antara lain melalui penerbitan ketentuan internal mengenai manajemen audit intern, yang menjadi landasan penguatan peran audit intern dalam melaksanakan fungsi asesmen, perumusan strategi, advisori atas pengendalian intern, serta pelaksanaan audit atas pelaksanaan program strategis dan program transformasi pada area tata kelola, keuangan, dan operasional, sesuai dengan Rencana Kerja Audit

Intern Tahun (RKAT) 2025. Untuk memastikan kecukupan kerangka kebijakan dan efektivitas implementasinya pada tahun 2025 juga dilakukan asesmen terhadap kecukupan ketentuan, termasuk petunjuk teknis, antara lain pada area Pengelolaan Operasi Moneter, Pengelolaan Cadangan Devisa, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Pengadaan. Asesmen tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan satuan kerja fungsi hukum dan fungsi pengelola risiko guna memastikan keselarasan dan kecukupan desain pengaturan serta konsistensi penerapan pengendalian intern dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.

Pada triwulan IV 2025, telah dilaksanakan asesmen audit internal di Bank Indonesia oleh asesor independen. Sejalan dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik serta dalam rangka memastikan kesesuaian praktik audit intern dengan standar internasional, ruang lingkup asesmen dilakukan berdasarkan kesesuaian terhadap *International Professional Practices Framework (IPPF)* 2017 dan *Global Internal Audit Standards (GIAS)* 2024, serta penilaian maturitas berdasarkan *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). Hasil asesmen tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan aktivitas audit intern Bank Indonesia memperoleh predikat “Secara Umum Sesuai (*Generally Conform*)” terhadap standar internasional, serta telah memenuhi 94% *Key Process Area (KPA)* yang berada pada level *Managed*. Kenaikan level IACM Bank Indonesia dari 66% pada level *Managed* pada periode penilaian sebelumnya menjadi 94% pada level *Managed* di tahun 2025 tersebut mencerminkan peningkatan kredibilitas manajemen audit intern di Bank Indonesia yang telah menerapkan praktik terbaik dan diakui secara global. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kredibilitas serta akuntabilitas fungsi audit intern secara kelembagaan.

Pada aspek integritas kelembagaan, Bank Indonesia secara konsisten juga menunjukkan kinerja yang kuat. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 yang dirilis oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 9 Desember 2025, Bank Indonesia berhasil memperoleh skor 82,6 atau berada pada kategori terjaga serta secara signifikan di atas rata-rata tingkat Indeks Integritas Nasional Indonesia yang tercatat sebesar 72,32 yang berada pada kategori rentan. Pelaksanaan kegiatan SPI 2025 diikuti oleh 647 instansi yang terdiri dari 50 kementerian, 58 lembaga, 5 BUMN, 38 pemerintah provinsi dan 508 pemerintah kabupaten/kota. Keberhasilan Bank Indonesia tersebut

menunjukkan efektivitas kebijakan penguatan integritas dan pengendalian intern yang diterapkan secara berkelanjutan.

Melalui rangkaian penguatan fungsi audit intern, pelaksanaan asesmen eksternal, serta partisipasi aktif dalam SPI, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga kesinambungan peningkatan maturitas audit intern, memperkuat integritas kelembagaan, dan memastikan terpeliharanya kepercayaan publik terhadap institusi, sejalan dengan penerapan tata kelola yang baik dan profesional, serta sesuai dengan praktik terbaik internasional.

Lebih lanjut, dalam menjaga maturitas manajemen risiko dan manajemen keberlangsungan tugas, Bank Indonesia senantiasa menindaklanjuti *Opportunity for Improvement (OFI)* hasil penilaian tahun 2024. Hasil penguatan yang dilakukan yaitu Bank Indonesia berhasil menjaga pencapaian maturitas Manajemen Risiko (MR) berada pada level “*Managed*”. Sepanjang triwulan IV 2025, penguatan manajemen risiko dilakukan melalui: (i) penyusunan metadata bisnis dan program *use case* terkait MR; (ii) penyempurnaan ketentuan sebagai dasar hukum pelaksanaan manajemen risiko yang selaras dengan area tata kelola yaitu fungsi audit intern dan hukum; (iii) penyempurnaan metodologi asesmen risiko secara terintegrasi khususnya untuk area kecukupan ketentuan (dhi. aspek kecukupan *checks and balances*, *decision making process*, dan manajemen risiko dari proses bisnis); serta (iv) penguatan kapabilitas SDM dan budaya sadar risiko melalui berbagai pelatihan manajemen risiko yang berkelanjutan seperti penyelenggaraan Seminar Internasional Manajemen Risiko dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

Sementara itu, penguatan manajemen keberlangsungan tugas (MKT) dilakukan melalui pelaksanaan simulasi dengan *multiple scenario*, pelaksanaan program *awareness* bagi Satgas MKT, pengkinian asesmen risiko disruptif, dan strategi pemulihan. Hasil penguatan yang dilakukan yaitu Bank Indonesia berhasil menjaga pencapaian maturitas MKTBI pada level Terkuantifikasi Menuju Teroptimasi (*Quantified to Optimize Managed*) dengan nilai yang semakin baik, serta mempertahankan perolehan sertifikasi ISO 22301 *Business Continuity Management System (BCMS)*. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menyelesaikan ketentuan mengenai Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang terintegrasi antara Kebijakan dan Kelembagaan sebagai dasar penguatan implementasi MKT ke depannya. Pencapaian maturitas MKT tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan MKT telah secara konsisten dijalankan

sesuai *international best practices* dan terdokumentasi dengan baik yang mencakup aspek kebijakan, proses dan/atau sasaran. Selanjutnya, *output* dari proses-proses kritikal telah diukur, dianalisis, dan dievaluasi dengan *continuous improvement* yang terus dijalankan.

33) Pemenuhan penerbitan dan pelaksanaan peraturan per-Undang-Undang Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang dan kebutuhan Bank Indonesia

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan yang berlaku dan menerbitkan ketentuan baru dalam rangka menjaga kecukupan landasan hukum dalam pelaksanaan tugas. Pada periode tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan 67 (enam puluh tujuh) peraturan pada triwulan IV 2025. Dengan demikian, total peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia mencapai 155 ketentuan sampai dengan triwulan IV 2025.

Penerbitan peraturan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan maupun tindak lanjut atas peraturan perundang-undangan antara lain UU Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Bank Indonesia No. 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia. Selain itu, penerbitan peraturan juga dilakukan untuk merespons dinamika kebijakan dan kebutuhan penguatan fungsi kelembagaan secara menyeluruh. Secara umum, pembentukan peraturan di Bank Indonesia dilaksanakan melalui 3 (tiga) bagian yaitu: (i) asesmen hukum secara komprehensif terhadap area kebijakan utama dan kebijakan kelembagaan; (ii) proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; serta (iii) koordinasi dengan mitra kerja terkait. Seluruh proses tersebut dimaksudkan agar peraturan yang diterbitkan dapat mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia, selaras dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta sesuai dengan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

34) Terjaganya akuntabilitas dan kinerja keuangan lembaga

Sebagai wujud akuntabilitas kelembagaan kepada publik, Bank Indonesia menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban publik. Pengelolaan keuangan Bank Indonesia dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan kredibilitas Bank Indonesia

yang berlandaskan kinerja efektif, efisien, dan berkepatuhan melalui terjaganya akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia.

Sebagai bentuk akuntabilitas keuangan Bank Indonesia sebagaimana amanat Undang-undang Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2024 *audited* dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini tersebut telah diperoleh oleh Bank Indonesia untuk ke-22 secara berturut-turut sejak tahun 2003 dengan menjaga kualitas laporan keuangan yang menyajikan informasi yang relevan, transparan, dan wajar. Hal ini dicapai melalui proses pemeriksaan BPK RI atas LKTBI tahun 2024 yang dilaksanakan pada awal Februari sampai dengan awal Mei 2025 (selama 90 hari). Dalam pemeriksaan BPK RI, Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mencapai opini WTP.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan keuangan dengan memperhatikan prinsip *good governance* dalam menjaga akuntabilitas keuangan sesuai amanat UU. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penyempurnaan proses bisnis, penguatan peran dan kapabilitas pengelola keuangan, serta penguatan fungsi *internal control officer*, khususnya dalam rangka pemenuhan pemaparan dan permintaan data/dokumen pemeriksaan BPK RI, sehingga diharapkan pemeriksaan BPK RI dapat berjalan dengan baik. Pencapaian opini WTP juga didukung oleh penyelesaian tindak lanjut terhadap pemeriksaan BPK atas LKTBI tahun sebelumnya guna senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Bank Indonesia.

35) Tersedianya SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia

Penguatan pengelolaan SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia dilakukan melalui penerapan strategi perencanaan, pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan (4P). Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia memfokuskan strategi pengelolaan SDM melalui penajaman terhadap perencanaan SDM beserta strategi pemenuhannya. Penajaman perencanaan SDM dilakukan melalui optimalisasi strategi pengelolaan SDM yang didukung oleh *Digital Business Process* (DBP) untuk menghasilkan SDM yang unggul, baik dari sisi kompetensi teknis maupun kompetensi perilaku, guna menciptakan calon pemimpin Bank Indonesia yang profesional dengan memiliki aspek 3-Smart, yaitu: berkompetensi (*book smart*), berpengalaman (*street smart*), dan berperilaku

mulia (*spiritual smart*). Transformasi pada area pemenuhan SDM melalui penyempurnaan strategi rekrutmen dan penguatan manajemen karier pegawai ini bertujuan agar pegawai memiliki kepemimpinan yang kuat dan dapat bekerja secara optimal di era digital. Terkait aspek pemeliharaan SDM, Bank Indonesia menyusun PDG Manfaat Pensiun Pegawai Bank Indonesia, PDG Peraturan Dana Pensiun (PDP) DAPENBI dan DAPENBI IP. Pengaturan ditujukan untuk kebijakan manfaat pensiun yang dapat menjamin kesinambungan penghasilan yang layak bagi pegawai Bank Indonesia setelah memasuki masa pensiun, dengan memperhatikan *Employee Value Proposition* berdasarkan prinsip kesetaraan antarpegawai, dengan tetap menjaga kondisi keuangan Bank Indonesia serta sustainabilitas DAPENBI dan DAPENBI IP.

Selain itu, pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia terus menyempurnakan aplikasi HR Apps. Penyempurnaan dilakukan dalam rangka optimalisasi dan perluasan fitur aplikasi untuk mendukung pengelolaan proses 4P dan perencanaan karier pegawai ke depan secara lebih efektif dan efisien, di mana HR Apps sebagai *employee experience platform* menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan pegawai secara terintegrasi, interaktif dan dapat diakses (*mobile, anytime, anywhere*) yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan *engagement* pegawai. Dalam pengembangan HR Apps *Employee Experience* Tahap II terdapat penambahan *Personalized Content* berupa *Enriched Information*, penambahan *Engagement Features* berupa layanan terintegrasi untuk memberikan kemudahan bagi pegawai seperti *enrollment* IHT dan *reschedule* GMCU, serta *leveraging AI* berupa interaksi dua arah untuk memberikan informasi dan rekomendasi yang *personalized*.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia juga telah mengimplementasikan postur program pengembangan karier dan pengembangan kompetensi kepada seluruh level pegawai. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan kurikulum Bank Sentral Digital yang telah diimplementasikan dan terus disempurnakan. Penguatan dilakukan dalam seluruh program pembelajaran yaitu Program *Onboarding* pegawai baru, Program Meningkatkan Kompetensi (*Competencies Development Program*), Program Pengembangan Karier (*Career Advancement Program*), Program Transisi Karier (*Career Transition Program*), serta program kemitraan pembelajaran dengan mitra nasional dan internasional. Dalam bidang riset, Bank Indonesia melakukan penguatan pengelolaan jurnal Bank Indonesia yaitu *Bulletin of Monetary, Economics, and Banking* (BMEB), *Journal*



17th SEACEN-BIS High Level Seminar di Seoul, Korea Selatan

of Islamic Monetary and Finance (JIMF), dan Journal of Central Banking Law and Institution (JIMF), sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan ekosistem riset nasional. Selain program pembelajaran yang diselenggarakan untuk pihak internal, terdapat juga program pembelajaran dan riset dengan *international exposure* berupa seminar internasional, *Joint Course* dengan lembaga pendidikan bank sentral di kawasan regional ASEAN, serta *International Conference Call For Papers* untuk mendukung pengembangan ketiga jurnal Bank Indonesia.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia memfokuskan strategi pengembangan SDM melalui penajaman postur program pendidikan kebanksentralan. Hal ini dilakukan baik pada aspek kebijakan utama maupun kebijakan kelembagaan, dan kapabilitas baru yang merupakan isu terkini di lingkup global seperti penilaian dan mitigasi risiko iklim pada sistem keuangan dan pemanfaatan AI pada proses bisnis bank sentral. Selain itu, pada aspek *leadership*, Bank Indonesia berfokus pada upaya untuk penguatan kapabilitas *strategic visioning*, *strategic action*, dan *strategic influencing*. Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan literasi publik mengenai kebanksentralan melalui berbagai program kerja sama pembelajaran dan riset dengan berbagai mitra strategis, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, Bank Indonesia juga terus menyempurnakan aplikasi HR Apps. Pengembangan yang dilakukan antara lain melalui *enhancement* di antaranya integrasi dengan *Learning Management System* (LMS) untuk personalisasi pengembangan kompetensi pegawai, informasi hasil Asesmen Potensi

mencakup profil karakter *leadership* dan *job fitness*, *database* profil pegawai yang lebih komprehensif, integrasi dengan sistem presensi pegawai, serta personalisasi *chatbot* sebagai *Personal Assistant* terkait kinerja, kompetensi, dan kesehatan.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia juga telah mengimplementasikan postur program pengembangan karier dan pengembangan kompetensi kepada seluruh level pegawai. Pelaksanaan program pembelajaran dilakukan dalam bentuk *In-House Training*, sekolah kepemimpinan, seminar nasional/internasional, *workshop*, dan *joint course* dengan South East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN Centre), serta lembaga internasional lainnya. Topik yang diangkat adalah topik-topik yang merupakan *current issues* seperti bauran kebijakan bank sentral, ekonomi dan keuangan hijau, dan *leadership*. Untuk mendukung kemitraan di area pembelajaran dan riset, Bank Indonesia juga mengundang pihak eksternal baik kementerian/lembaga/universitas untuk mengambil bagian dalam berbagai program pembelajaran, baik sebagai peserta maupun narasumber.

PS 11 Merumuskan dan implementasi kebijakan komunikasi dan pengaturan hukum untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai bank sentral dan lembaga publik, komunikasi kebijakan perlu diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank

Indonesia. Komunikasi kebijakan kepada publik berperan besar dalam meningkatkan efektivitas kebijakan bank sentral, termasuk dalam memperkuat pemahaman dan pembentukan ekspektasi terkait dengan perkembangan ekonomi terkini dan berbagai langkah kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Selain itu, penguatan akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia juga ditempuh dengan memastikan tersedianya landasan aturan hukum yang cukup sehingga pelaksanaan tugas Bank Indonesia senantiasa dilakukan sesuai kewenangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Upaya tata kelola ini juga dikomunikasikan secara kelembagaan untuk memperkuat kredibilitas Bank Indonesia dan menjadi bagian dari pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik dan profesional sebagaimana amanat UU P2SK.

Sepanjang triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan komunikasi dan pengaturan hukum untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

36) Komunikasi untuk mendukung efektifitas kebijakan serta pemenuhan transparansi

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga keterbukaan informasi publik dengan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Sepanjang triwulan IV 2025, komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi dan sinergi kelembagaan bersama Komisi Informasi Pusat dalam peningkatan kapasitas SDM Bank Indonesia agar mendorong pelaksanaan layanan informasi yang berkualitas, memenuhi monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik, serta melaksanakan monev terhadap layanan informasi publik Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Pemenuhan monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat merupakan upaya Bank Indonesia dalam mempertahankan peringkat sebagai Badan Publik Informatif 2025. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan pemenuhan berbagai indikator sesuai ketentuan. Upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 juga disampaikan oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bank Indonesia kepada KIP melalui presentasi uji publik. Hasilnya, Bank Indonesia berhasil meraih predikat Badan Publik Informatif dengan peringkat ke-6. Predikat ini adalah kualifikasi tertinggi KIP dan mencerminkan konsistensi Bank Indonesia dalam transparansi dan akuntabilitas.

Bank Indonesia senantiasa merespons permohonan, keberatan, dan sengketa informasi yang diajukan publik untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik. Respons tersebut disalurkan melalui jalur BICARA dan jalur PPID sesuai dengan ketentuan UU KIP. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui berbagai kanal komunikasi resmi Bank Indonesia sehingga dapat menjangkau masyarakat secara luas.

37) Komunikasi untuk menjaga persepsi publik yang positif terhadap Bank Indonesia

Pada triwulan IV 2025, komunikasi Bank Indonesia diarahkan pada pengelolaan ekspektasi dan literasi mitra kerja sejalan dengan *stance* bauran kebijakan Bank Indonesia. Komunikasi kebijakan diharapkan dapat memperkuat ekspektasi publik terhadap efektivitas bauran kebijakan moneter Bank Indonesia yang diarahkan pada keseimbangan *pro-stability and growth*, serta kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau yang diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, komunikasi kebijakan juga diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi seluruh lapisan masyarakat terkait dengan *stance* kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

Komunikasi bauran kebijakan Bank Indonesia berfokus pada hasil keputusan RDG Bulanan 2025 sepanjang triwulan IV 2025 yang memutuskan untuk mempertahankan BI Rates pada level 4.75% sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas. Komunikasi intensif dilakukan untuk memperkuat ekspektasi masyarakat bahwa keputusan Bank Indonesia tetap konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional. Dalam konteks pengendalian inflasi, Bank Indonesia juga mengomunikasikan rangkaian kegiatan sinergi bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis lainnya dalam TPIP/TPID, dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Sementara itu, komunikasi kebijakan *pro-growth* pada triwulan IV

2025 difokuskan pada penguatan ekspansi likuiditas moneter dan pelonggaran kebijakan makroprudensial yang diperkuat dengan meningkatkan efektivitas implementasi pemberian likuiditas kepada perbankan untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

Bank Indonesia juga secara aktif melaksanakan komunikasi kebijakan melalui berbagai kanal yang disesuaikan dengan mitra kerja yang disasar. Komunikasi Bank Indonesia secara konsisten diarahkan untuk mengelola literasi publik melalui beragam kanal yaitu (i) *above the line* (ATL), seperti website, media sosial Bank Indonesia, serta media massa, (ii) *below the line* (BTL), antara lain dilakukan melalui konferensi pers, taklimat media, FGD dengan ekonom, akademisi, lembaga riset, K/L, parlemen, dan media, serta (iii) *through the line* (TTL) dilakukan

melalui kegiatan edukasi yang dipublikasikan pada kanal media sosial Bank Indonesia dan kegiatan komunikasi interaktif yang diselenggarakan oleh Museum Bank Indonesia (MuBI). Melalui berbagai strategi komunikasi dimaksud, Bank Indonesia dapat menjaga keterlibatan mitra kerja pada level yang memadai. Hal ini tecermin pada persepsi positif-netral dari mayoritas mitra kerja terhadap pesan yang dikomunikasikan Bank Indonesia melalui berbagai kanal.

Dalam meningkatkan literasi kebanksentralan bagi berbagai pihak eksternal, Bank Indonesia juga aktif melakukan berbagai program edukasi kebanksentralan melalui berbagai program kemitraan di area pembelajaran. Inisiatif ini diwujudkan melalui kerja sama pembelajaran dan riset dengan perguruan tinggi dan K/L, antara lain dalam bentuk implementasi mata kuliah kebanksentralan di perguruan tinggi mitra, *training of trainers* untuk dosen mata kuliah kebanksentralan, kuliah umum dengan topik kebanksentralan, seminar kajian kebijakan publik, serta menjadi narasumber pada program pendidikan karier di lembaga anggota KSSK, *workshop/bootcamp* pengembangan riset, serta kerja sama pengembangan ekosistem riset nasional.

Boks.12: Bank Indonesia Bersama Masyarakat (BIRAMA) 2025



Pembukaan Bank Indonesia Bersama Masyarakat (BIRAMA) 2025 di Jakarta

Bank Indonesia Bersama Masyarakat (BIRAMA) 2025 merupakan acara yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman publik tentang kebijakan BI dan memberikan panduan bagi masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan ekonominya ke depan. Sebagai bagian dari Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, BIRAMA diharapkan dapat

menjadi katalisator yang memperkuat pemahaman, optimisme, dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menggerakkan perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan.

Indonesia memiliki modal fundamental yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan di tengah dinamika global yang penuh

tantangan. Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap baik serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga. Terdapat tiga kunci untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan pada 2026 yaitu optimisme, upaya maksimal seluruh pihak, dan sinergi.

Pada acara tersebut, Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2026 kepada peserta yang berasal dari lembaga keuangan, ekonom, akademisi, dan media massa. Pertama, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Kedua, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memperkuat kemampuan intermediasi perbankan dalam rangka mendukung sektor-sektor prioritas Pemerintah. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk meningkatkan transaksi pembayaran digital, termasuk

QRIS dan BI-FAST. Keempat, dari sisi kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, difokuskan pada penguatan aspek produk (*product*), harga (*pricing*), pelaku (*participants*), dan infrastruktur (*infrastructure*) pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional. Kelima, Bank Indonesia terus memperkuat UMKM, ekonomi hijau, dan ekonomi syariah untuk mendukung ekonomi kerakyatan Pemerintah.

Sebagai rangkaian kegiatan BIRAMA 2025 diselenggarakan *Edutainment & Live Podcast* yang mengangkat isu perekonomian terkini dan prospek ke depan serta relevansinya dengan generasi muda. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya Bank Indonesia dalam menjaga perekonomian agar tetap stabil dan penuh dengan kesempatan bagi semua generasi muda dalam mencapai Indonesia Emas.

PS 12 Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi dengan pengadaan dan pengelolaan program untuk mendukung pencapaian kinerja kelembagaan optimal

Pesatnya perkembangan teknologi menuntut Bank Indonesia untuk mempercepat adopsi atas berbagai teknologi terkini guna meningkatkan kapabilitas baik di area kebijakan maupun di area kelembagaan dengan tetap menjaga tata kelola yang baik dan profesional. Untuk itu, Bank Indonesia terus melakukan penguatan pengelolaan sumber daya, khususnya pada aset teknologi digital dan aset fisik yang didukung oleh pengadaan yang *govern* dan pengelolaan program yang terintegrasi. Penguatan yang dilakukan berupa pembangunan dan pemanfaatan berbagai inovasi digital dan inovasi data, sarana dan prasarana *modern office* dan *modern living*, serta pengelolaan pengadaan dan proyek yang terintegrasi dan bertata kelola baik.

Sepanjang triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi dengan pengadaan dan pengelolaan program untuk mendukung pencapaian kinerja kelembagaan optimal sebagaimana tercermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

38) Tercapainya *Service Excellent* melalui Manajemen Aset Fisik yang Terintegrasi, Modern, dan Digital

Bank Indonesia memastikan ketersediaan berbagai inovasi dan teknologi serta layanan digital yang

agile, resilient, dan intelligent untuk mendukung transformasi pada area kebijakan dan kelembagaan. Pada triwulan IV 2025, penyediaan layanan kelogistikan telah dilakukan secara optimal yang tercermin pada kualitas layanan terhadap aplikasi kritikal BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, BI-ETP, dan BI-FAST secara kontinu 24/7.

Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi dengan PLN dan Pelaksana Operasional Pemeliharaan sebagai upaya dalam mendukung layanan kelogistikan. Hal ini dicapai antara lain dengan memastikan ketersediaan *supply* daya listrik terjaga serta memastikan kualitas tegangan dan frekuensi listrik dicapai secara optimal melalui instalasi peralatan pendukung kelistrikan pada aplikasi kritikal dan kecukupan ketersediaan solar untuk mendukung peralatan *backup*. Di sisi lain, Bank Indonesia turut menjalin kemitraan strategis dengan PLN, Pertamina, dan mitra lainnya guna memastikan kualitas layanan listrik pada aplikasi kritikal serta peralatan *backup* selalu dalam kondisi yang prima sehingga operasionalisasi aplikasi dapat berjalan 24/7.

39) Terwujudnya aset teknologi digital yang berkualitas melalui penerapan manajemen aset yang terstandar dan tingkat layanan yang optimal

Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan kapabilitas teknologi digital dalam mendukung pelaksanaan tugas. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan dan implementasi berbagai digitalisasi yang didukung oleh inovasi data, serta

diiringi dengan peningkatan keandalan, *availability*, dan keamanan sistem informasi melalui asesmen *Information Technology Service Management (ITSM)* dan *Cyber Security Maturity (CSM)*.

Pada triwulan IV 2025, upaya peningkatan kapabilitas tersebut diwujudkan melalui implementasi berbagai penguatan sistem. Hal ini dilaksanakan untuk mendukung layanan pengelolaan uang rupiah, layanan SP, serta pengelolaan produk OM Pro-Market. Pengembangan digitalisasi DMP serta peningkatan pemanfaatan data juga terus dilanjutkan pada area perumusan kebijakan, khususnya RDG Bulanan guna memperkuat kualitas perumusan kebijakan. Selain itu, implementasi digitalisasi proses bisnis pengelolaan aset khususnya pada area pengadaan aset serta digitalisasi pelayanan dan operasional aset fisik.

Dalam rangka meningkatkan keandalan aset teknologi digital dan untuk memastikan keberlanjutan layanan digital, dilakukan perluasan implementasi standar *best practice* terkait ITSM sesuai dengan International Organization for Standardization (ISO) 20022 untuk sistem strategis dan kritikal serta penguatan pengamanan siber. Upaya dilakukan melalui peningkatan maturitas seluruh proses dalam pengelolaan layanan digital dan pengamanan siber melalui proses review, evaluasi, serta perbaikan terhadap sistem pendukung untuk memastikan target *Service Level Agreement (SLA)* dan tingkat keamanan siber dapat tercapai.

Bank Indonesia senantiasa berupaya menjaga tingkat keandalan, *availability*, dan keamanan sistem informasi serta memperkuatnya melalui asesmen ITSM dan CSM. Pada triwulan IV 2025, untuk memastikan keberlanjutan layanan digital, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menjaga tingkat maturitas layanan digital pada skala yang optimal dengan pencapaian yang sudah *mature*. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui pengelolaan aset teknologi digital yang berkesinambungan dan antisipatif terhadap peningkatan kebutuhan layanan dalam rangka menjaga ketersediaan layanan digital dan tingkat kepuasan pengguna terhadap aset teknologi digital di Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia melanjutkan penguatan *cyber security* secara menyeluruh melalui proses review, evaluasi, serta perbaikan terhadap sistem keamanan siber, dan pelaksanaan pengembangan inovasi layanan digital dapat berjalan sesuai rencana.

Pada triwulan IV 2025, asesmen ITSM dan CSM telah dilaksanakan dengan nilai maturitas yang meningkat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bank Indonesia terus mengupayakan pemenuhan target SLA melalui pemantauan performa secara proaktif, antisipasi potensi gangguan sejak dini, dan pemastian rencana pemulihan aplikasi berjalan optimal. Untuk melakukan peningkatan layanan digital yang semakin andal, Bank Indonesia mempertahankan perolehan ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, ISO 20000 IT Service Management, ISO 9000 Quality Management Standard - Requirements, ISO 9001 Quality Management Systems - Fundamentals and Vocabulary, ISO 22301:2019 Business Continuity Management System serta Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (TIA 942).

40) Terwujudnya pengadaan yang berkualitas untuk mendukung pengelolaan aset dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia secara konsisten memperkuat tata kelola pengadaan melalui pengukuran *Procurement Maturity Assessment (PMA)*. Pengukuran tersebut dilaksanakan oleh pihak eksternal menggunakan model *Procurement Excellence Plus*, sehingga dapat menilai kematangan fungsi pengadaan secara holistik yang mencakup dimensi strategi, operasional, organisasi, dan teknologi. Pada tahun 2024, Bank Indonesia berhasil menjaga level maturitas pengadaan di level strategis dan proaktif pada berbagai aspek penilaian. Penilaian strategis pada aspek strategi, operasional, dan organisasi mencerminkan pengelolaan pengadaan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis kinerja. Sementara penilaian proaktif pada aspek teknologi menunjukkan kemajuan dalam pemanfaatan teknologi secara optimal dalam mendukung proses pengadaan.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melaksanakan penilaian PMA. Berdasarkan penilaian tersebut disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 1 *key driver* sistem informasi berupa *system implementation* menuju level *strategic*, sehingga saat ini 13 dari 15 *key drivers* pengadaan berada pada level *strategic* sedangkan 2 *key drivers* lainnya terkait sistem informasi terjaga pada level *proactive*. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya penguatan pada tahun 2025 yang difokuskan pada aspek sistem informasi sebagaimana arah pengembangan digitalisasi yang selaras dengan transformasi kelembagaan dan arah strategi Bank Indonesia. Ke depan, seiring dengan kebijakan digitalisasi Bank Indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan *key drivers* di level strategis pada PMA tahun 2026. Selanjutnya,

dalam mendukung pengadaan yang bertata kelola, Bank Indonesia menerapkan penguatan koordinasi internal dalam rangka penyelesaian pengadaan strategis sesuai rencana sebagaimana strategi 3S+I (simplifikasi, standardisasi, sistemisasi, dan integrasi)

pada area pengadaan, *monitoring* berkala melalui laporan pengadaan yang dilakukan secara periodik, serta penyusunan program kerja dan *timeline* untuk pelaksanaan PMA 2026.



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan

LAMPIRAN



DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, interkoneksi, interoperabilitas yang menggambarkan bentuk keterhubungan antarinfrastruktur pasar keuangan.
3-Smart	Program kepemimpinan Bank Indonesia untuk menciptakan pemimpin yang profesional yang memiliki kompetensi (<i>book smart</i>), berpengalaman (<i>street smart</i>), dan memiliki perilaku mulia (<i>spiritual smart</i>).
Agile	Kemampuan untuk bergerak cepat dan mudah
Bantuan Langsung Tunai	Pemberian transfer uang tunai secara langsung dari pemerintah kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat tertentu yang memenuhi kriteria penerima manfaat, dengan tujuan utama menjaga daya beli, mengurangi kemiskinan, serta memberikan perlindungan sosial dalam situasi ekonomi tertentu.
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Integrasi kebijakan secara dinamis yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, yakni kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan system pembayaran, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk memperoleh kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
Bauran Kebijakan Kelembagaan	Penggunaan beberapa kebijakan pada area kelembagaan dengan basis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan/ <i>compliance</i> . Hal ini diperlukan sebagai langkah dalam memastikan keseimbangan antara memastikan tercapainya mandat Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif dengan upaya mendorong produktivitas sumber daya secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik.
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan SKNBI.
BI-Payment Clear dan BI-Payment Info	Infrastruktur untuk mendeteksi anomali transaksi dan potensi fraud di sektor keuangan.
Bank Indonesia – Real-Time Gross Settlement	Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
Bank Indonesia- Scripless Securities Settlement System	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
Blueprint	Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja.
Business matching	Temu bisnis antarpelaku ekonomi.

ISTILAH	PENJELASAN
Cadangan devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.
Central Bank Digital Currency	Mata uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.
Central Counterparty	Lembaga kliring yang mengambil alih risiko <i>counterparty</i> dari transaksi antar pelaku pasar melalui proses novasi dan melakukan multilateral <i>netting</i> atas eksposur transaksi para pelaku pasar.
Countercyclical Capital Buffer (CCyB)	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (<i>excessive credit growth</i>) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Counterparty Line	Jumlah kredit atau limit eksposur yang diberikan oleh satu pihak kepada <i>counterparty</i> dalam transaksi keuangan.
Cross Border	Lintas batas, lintas negara.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Derivatif	Instrumen turunan yaitu kontrak, perjanjian, atau transaksi yang nilainya diturunkan dari suatu instrumen keuangan.
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
Digital BPR	Pendekatan komprehensif untuk mendesain ulang dan mengoptimalkan proses bisnis berbasis digital dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan beradaptasi, antara lain mencakup aspek pengambilan keputusan, manajemen informasi, <i>digital environment</i> , dan pola kerja.
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital.
Domestic Non-Deliverable Forward	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.
Dynamic Systemic Risk Surveillance	Kerangka pengawasan yang bersifat <i>forward looking</i> dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara <i>online</i> atau menggunakan teknologi internet.
Ekonomi dan keuangan hijau	Sistem ekonomi dan keuangan yang mendukung upaya menjaga dan memperhatikan aspek lingkungan dan/atau iklim.
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
<i>Electronic Trading Platform</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.
<i>Employee Value Proposition</i>	Nilai tambah yang ditawarkan pegawai dan sebagai imbalan atas kontribusi terhadap perusahaan.
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif.
Festival Ekonomi Syariah (FESyar)	Kegiatan sejenis Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang berskala regional dan nasional serta merupakan kegiatan <i>road to ISEF</i> .
<i>Financial Market Infrastructure</i> (PFMI)	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya.
<i>Financing to Value</i>	Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Forward looking</i>	Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/ <i>time lag</i> kebijakan moneter.
Government Shutdown	Penghentian sementara fungsi administrasi pemerintahan akibat kegagalan lembaga legislatif dan eksekutif mencapai kesepakatan terkait pengesahan anggaran negara.
<i>Hedging</i>	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko.
HLM	<i>High Level Meeting</i>
Industri Halal	Industri yang sejalan dengan kriteria kehalalan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri.
<i>Imported Inflation</i>	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri akibat dampak perubahan nilai tukar.
IndONIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia.
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunannya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (<i>cost-push</i>) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (<i>demand-pull</i>).

ISTILAH	PENJELASAN
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>volatile foods</i> dan <i>administered prices</i> .
Infrastruktur Pasar Uang	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya
Integrasi	Penyatuan infrastruktur <i>post trade</i> dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (<i>value chain</i>) layanan transaksi.
Interkoneksi	Kemampuan antarsistem bertukar informasi atau bertransaksi membutuhkan perantara, atau dengan kata lain interkoneksi antar sistem terjadi secara tidak langsung.
Interoperabilitas	Kemampuan dua sistem untuk berkomunikasi atau bertransaksi secara langsung.
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)	Acara tahunan Bank Indonesia yang berskala nasional dan internasional dan terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu <i>Sharia Economic Forum</i> dan <i>Sharia Fair</i> . Kegiatan forum terdiri dari seminar/ <i>workshop</i> , sedangkan <i>Sharia Fair</i> merupakan <i>outlet</i> bagi pelaku usaha industri halal, pesantren, Lembaga keuangan, dan lembaga terkait.
<i>Joint Audit</i>	Proses audit keuangan yang dilakukan oleh dua atau lebih firma audit secara bersamaan untuk menilai laporan keuangan suatu entitas.
Kuangan digital	Kuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau <i>web</i> melalui pihak ketiga.
Kuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal.
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
<i>Loan to Value</i>	Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Local Currency Bilateral Swap Agreement</i>	Bentuk kerja sama keuangan bilateral yang lazim dilakukan oleh bank sentral, yang memungkinkan suatu bank sentral untuk mendapatkan valuta asing dari bank sentral mitra dengan cara saling mempertukarkan mata uang lokal masing-masing negara, untuk kemudian dipertukarkan Kembali pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.
<i>Local Currency Transaction</i>	Transaksi bilateral antar dua negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, untuk mendiversifikasi <i>currency exposure</i> .

ISTILAH	PENJELASAN
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
<i>Market Maker</i>	Pihak yang secara aktif menyediakan likuiditas dengan menawarkan harga beli (bid) dan harga jual (ask) dalam transaksi pasar uang.
<i>Merchant Discount Rate</i>	Tarif yang dikenakan kepada <i>merchant</i> oleh bank.
Mikroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan Lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
<i>Modern Strategic Sourcing</i>	Pendekatan strategis dalam pemilihan dan manajemen pemasok yang mengutamakan efisiensi, inovasi, keberlanjutan, dan teknologi untuk meningkatkan nilai bisnis serta mengoptimalkan rantai pasok.
<i>Money Market Curve</i>	Kurva yang menggambarkan hubungan antara tenor (jangka waktu) dan suku bunga instrumen pasar uang.
<i>National Driven</i>	Pendekatan atau strategi yang berfokus pada tujuan, kepentingan, dan prioritas suatu negara, dengan dorongan kuat dari pemerintah atau institusi nasional untuk mencapai visi atau target tertentu.
Neraca Pembayaran Indonesia	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
<i>Net inflows</i>	Selisih antara total kontribusi atau pembelian baru (<i>inflows</i>) dan total penarikan atau penjualan (<i>outflows</i>) dari suatu investasi atau entitas.
<i>Non Performing Loan</i>	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
Operasi Moneter	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (<i>Standing Facilities</i>).
<i>Outstanding</i>	Jumlah yang masih berjalan, beredar, atau belum lunas dalam suatu instrumen keuangan.
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Primary Dealer</i>	Institusi yang disetujui oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan obligasi pemerintah secara langsung dari pemerintah.
<i>Pro-growth</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
<i>Pro-stability</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi.
<i>Project Based</i>	Pendekatan kerja yang berfokus pada penyelesaian program dengan tim khusus, batas waktu tertentu, dan hasil yang terukur.
Proyek Garuda	Sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) Indonesia yang kemudian disebut Rupiah Digital.
<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS)	Standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
QRIS <i>Cross Border</i> /Lintas Negara	Salah satu inisiatif kolaboratif untuk membangun standardisasi infrastruktur setelmen untuk perdagangan lintas batas.
QRIS Tap (NFC)	Sistem pembayaran berbasis teknologi <i>Near Field Communication</i> (NFC) yang memungkinkan pengguna cukup mendekatkan ponsel ke terminal pembayaran tanpa perlu memindai QR code secara manual.
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi.
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial	Penyempurnaan dari kebijakan rasio kredit UMKM antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif
<i>Regional Payment Connectivity</i> (RPC)	Perjanjian kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan yang disepakati oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Banko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand.
<i>Regulatory Reform</i>	Proses perubahan, penyempurnaan, atau penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas kebijakan dalam suatu sektor atau industri.
<i>Repurchase Agreement</i> (Repo)	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
Rupiah Digital	Bentuk digital mata uang Rupiah.
<i>Seamless</i>	Sistem atau proses yang berjalan lancar, otomatis, dan tanpa hambatan.

ISTILAH	PENJELASAN
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI)	Surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia.
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.
<i>Sovereign Credit Rating</i>	Peringkat utang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. <i>Sovereign Credit Rating</i> mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.
<i>Spot</i>	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari.
Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP)	Standar Nasional <i>Open API</i> Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau meningkatkan praktik pasar (<i>market practice</i>) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
<i>Straight-through</i>	Pemrosesan otomatis yang dilakukan dalam transaksi bisnis
<i>Streamlining</i>	Peningkatan efisiensi suatu proses tertentu dalam suatu organisasi
<i>Stress test</i>	Uji ketahanan.
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah.
<i>Supervisory Technology</i> (Suptech)	Penggunaan teknologi inovatif oleh lembaga pengawas untuk mendukung implementasi fungsi pengawasan.
<i>Supplier Relationship Management</i>	Strategi dan proses yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pemasok secara efektif, dengan tujuan meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi risiko, dan menciptakan nilai tambah dalam bisnis.
Surat Berharga Negara	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<i>Swap</i>	Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.

ISTILAH	PENJELASAN
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (<i>mitra kerja</i>) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
Transformasi kelembagaan	Transformasi yang mencakup penguatan organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digitalisasi.
<i>Triple Intervention</i>	Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar <i>spot</i> , penyediaan likuiditas valas terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah.
Uang Elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.
Uang Layak Edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
<i>Volatile Food</i>	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
<i>White Paper</i>	Laporan atau panduan yang ditulis secara mendalam untuk menginformasikan secara ringkas tentang suatu permasalahan dan solusinya.
<i>Yield</i>	Imbal hasil.

DAFTAR SINGKATAN

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, Interkoneksi, Interoperabilitas
3S	Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi
3T	Terdepan, Terluar, dan Terpencil
3P + 1I	<i>Product, Pricing</i> , Pelaku dan Infrastruktur
4P	Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, Pemeliharaan
ACC-BIS	The Council dari Asian Consultative Council – Bank for International Settlement
AI	Artificial Intelligence
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
APUVINDO	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia
APU PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATL	<i>Above The Line</i>
BTL	<i>Below The Line</i>
BIDIC	Bank Indonesia-Digital Innovation Center
BI-ETP	Bank Indonesia – <i>Electronic Trading Platform</i>
BI-FAST	Bank Indonesia – <i>Fast Payment</i>
BI-RTGS	Bank Indonesia – <i>Real Time Gross Settlement</i>

ISTILAH	PENJELASAN
BI-SSSS	Bank Indonesia- <i>Scriptless Securities Settlement System</i>
BIS	Bank for International Settlements
BKBI	Bauran Kebijakan Bank Indonesia
BKK	Bauran Kebijakan Kelembagaan
BNM	Bank Negara Malaysia
BoP	<i>Balance of Payments</i>
BoT	Bank of Thailand
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPPU	<i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang
BPPUR	<i>Blueprint</i> Pengelolaan Uang Rupiah 2024-2030
BPR	Business Process Reengineering
BSP	Bangko Sentral ng Pilipina
BSPI	<i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
CBDC	<i>Central Bank Digital Currency</i>
CBUAE	Bank Sentral Uni Emirat Arab
CCP	<i>Central Counterparty</i>
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
DC	Data Center
DHE SDA	Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam
DMP	<i>Decision Making Process</i>
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>

ISTILAH	PENJELASAN
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPSP	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DU	Dealer Utama
DWP	<i>Digital Workplace Platform</i>
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
EKDA	Ekonomi dan Keuangan Daerah
EMEAP	Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks
ERB	Ekspedisi Rupiah Berdaulat
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
ETP	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
EVP	<i>Employee Value Proposition</i>
FAQ	<i>Frequently Asked Question</i>
FDS	<i>fraud detection system</i>
FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FFR	<i>Fed Funds Rate</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKDOP	Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan
G20	Group of Twenty
GEBER PK	Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen
GIRU	<i>Global Investor Relation Unit</i>

ISTILAH	PENJELASAN
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
IEKB	Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan
IKKAT	Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi
IKN	Ibu Kota Nusantara
IKNB	Institusi Keuangan Non-Bank
IKRA	Industri Kreatif Syariah
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMF	International Monetary Fund
IN2MOTION Fest	Indonesia International Modest Fashion Festival
IPK	Infrastruktur Pasar Keuangan
IndONIA	Indonesia Overnight <i>Index Average</i>
INFRATANI	Integrated Farming with Information Technology and Society
IRU	<i>Investor Relation Unit</i>
IHT	<i>In House Training</i>
ISDA	<i>International Swaps and Derivatives Association</i>
ISEF	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
ITSM	<i>Information Technology Service Management</i>
JIBOR	<i>Jakarta Interbank Offered rate</i>
Kemenkeu	Kementerian Keuangan

ISTILAH	PENJELASAN
K/L	Kementerian/Lembaga
KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KKI	Kartu Kredit Indonesia
KKI	Kerja Sama Keuangan Internasional
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KOPERBI	Komplek Perkantoran Bank Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
LCT	<i>Local Currency Transaction</i>
LGA	Listrik-Gas-Air
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LMS	<i>Learning Management System</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LSB	Lembaga Selain Bank
LU	Lapangan Usaha
MAS	Monetary Authority of Singapore
MBG	Makanan Bergizi Gratis
MKTBI	Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
ML	<i>Machine Learning</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MuBI	Museum Bank Indonesia
MRBI	Manajemen Risiko Bank Indonesia
NCCD	<i>Non Centrally Cleared Derivative</i>

ISTILAH	PENJELASAN
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
NWGBR	<i>National Working Group on Benchmark Reform</i>
OECD	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OM	Operasi Moneter
P2DD	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
P2SK	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PCPM	Pendidikan Calon Pegawai Muda
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
Perpres	Peraturan Presiden
Pemda	Pemerintah Daerah
PFMI	<i>Principles for Financial Market Infrastructures</i>
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PMA	<i>Procurement Maturity Assessment</i>

ISTILAH	PENJELASAN
PMK	Program Meningkatkan Kompetensi
PMK	Protokol Manajemen Krisis
PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
PoC	<i>Proof of Concept</i>
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSP	Penyelenggara Sistem Pembayaran
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
PUVA	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
QRIS TUNTAS	QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Repo	<i>Repurchase Agreement</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIRU	<i>Regional Investor Relation Unit</i>
RPC	<i>Regional Payment Connectivity</i>
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPLN	Rasio Pendanaan Luar Negeri
RRH	Rata-Rata Harian
SAL	Saldo Anggaran Lebih
SBC	<i>Structured Bilateral Cooperation</i>

ISTILAH	PENJELASAN
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBN	Surat Berharga Negara
SBV	State Bank of Vietnam
SDM	Sumber Daya Manusia
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
Simkrisnas	Simulasi Krisis Nasional
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SNAP	Standar Nasional <i>Open API</i>
SPBI	Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SPIP	Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia
SP-PUR	Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSKI	Statistik Sistem Keuangan Indonesia
STP	<i>Straight Through Processing</i>
SupTech	<i>Supervisory Technology</i>
SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia
SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
ToT	<i>Training of Trainer</i>
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat

ISTILAH	PENJELASAN
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UE	Uang Elektronik
UGM	Universitas Gajah Mada
UI	Universitas Indonesia
ULE	Uang Layak Edar
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UPB	Uang Pecahan Besar
UPK	Uang Pecahan Kecil
UU	Undang-Undang

ISTILAH	PENJELASAN
UU P2SK	Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VITAL	<i>Visualizing the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning</i>
VF	<i>Volatile Food</i>
WB	World Bank
WTE	<i>Waste to Energy</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
yoy	<i>Year on Year</i>



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350
www.bi.go.id